

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama kami mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Solok Selatan baik yang berada dikampung halaman maupun yang berada di perantauan untuk memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang maha Esa karena atas rahmat dan karunianya telah terbentuk Kabupaten Solok Selatan.

Proses pembentukan Kabupaten tersebut perlu dituangkan di dalam bentuk tulisan agar berguna sebagai pengumpul data, informasi dan fakta hingga terhimpun menjadi sebuah naskah.

Tulisan ini sangat berguna dan besar artinya dalam mengungkap suatu kisah nyata untuk meluruskan sejarah dan mewedahi semua riwayat yang tentu saja tidak semuanya tertampung mengingat perjalanan yang sangat panjang dan berliku-likunya riwayat perjuangan Pembentukan Kabupaten Solok Selatan semenjak tahun 1950.

Diaharapkan bagi yang disebutkan namanya maupun yang tidak disebutkan namanya di dalam tulisan ini tidak terlalu bangga ataupun berkecil hati, karena semua lapisan masyarakat telah berjasa dan memberikan pengabdian terhadap kampung halamannya. Namun semuanya itu adalah sangat kecil jika dibandingkan dengan cita-cita untuk membangun Kabupaten Solok Selatan kedepan.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua lapisan masyarakat yang telah berjuang dan berjasa mulai dari generasi pertama, kedua, ketiga dan keempat yang dimotori oleh BP2KS2.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Solok, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Solok, Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Ketua DPRD Propinsi Sumatera Barat dan semua pihak yang telah ikut mendukung pemekaran Kabupaten Solok.

Akhirnya dengan mengharapkan keridhoan Ilahi, semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberkati kita semua.

Wabillahi Taufiq Walhidayah, Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Padang 26 Februari 2004

**Penulis
BP2KS2**

Ir. Musril Kusai
Sekretaris Umum

**Disusun / Dicitak kembali oleh
BP2KS2**

**Ketua Bidang Informasi
Komunikasi dan Humas**

H. SYUKRIAL SYUKUR DT. MAJO BASA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

- I. Proses Pembentukan Kabupaten Solok Selatan

- II. Tahapan-Tahapan yang dilalui

- III. Struktur Organisasi BP2KS2

- IV. Surat Keputusan BP2KS2 No. 01/KPTS/BP2KS2/2002 Tentang Pembentukan Panitia Khusus di Daerah dan di Jakarta.

- V. Surat Masuk BP2KS2

- VI. RUU RI No. 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat

- VII. Kliping Media Cetak

PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

I. LATAR BELAKANG

Kabupaten Solok dengan luas wilayah 7.084 Km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2002 adalah 450.082 jiwa, belum sepenuhnya dapat terjangkau dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, karena rentang kendali yang relatif jauh dari pusat pemerintahan.

Dengan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah dan pertimbangan lainnya maka Kabupaten Solok perlu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

Dengan pembentukan Kabupaten Solok Selatan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah.

II. PROSES PEMBENTUKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN

Proses pembentukan Kabupaten Solok Selatan telah melalui proses 4 (empat) generasi semenjak tahun 1950 s/d tahun 2003.

1. Generasi Pertama, pada tahun 1950 ditandai dengan Konferensi Timbulun di Kecamatan Sangir oleh Tokoh Masyarakat Solok Selatan pada waktu itu, keinginan tersebut belum terwujud karena berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi.
2. Generasi Kedua, pada tahun 1968, ditandai dengan dilaksanakan Konferensi oleh Tokoh Masyarakat di Gedung Nasional Muara Labuh. Hasil Konferensi tersebut telah disampaikan ke Departemen Dalam Negeri RI di Jakarta dan di catat dan di Agendakan di Direktorat Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah dengan Nomor Agenda 76. Perjuangan tokoh masyarakat tersebut belum terujud juga di sebabkan adanya kendala yang bersifat politis pada saat itu.

3. Generasi Ketiga, pada tanggal 10 Januari tahun 2000 Keluarga besar Solok Selatan bekerja sama dengan masyarakat yang pulang dari rantau melaksanakan seminar sehari dengan Agenda Pemekaran Kabupaten Solok. Diprakarsai Syukrial Syukur dan Syamsir Pane. Seminar sehari ini juga dihadiri oleh Bupati Kabupaten Solok serta jajarannya dan Ketua DPR-D Kabupaten Solok beserta anggotanya. Hasil Seminar ini telah disampaikan kepada Ketua DPR-D Kabupaten Solok dengan tembusan kepada Bupati Solok, Gubernur Sumatera Barat dan Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta dengan nomor surat 10/P3DSS/II/2000 tanggal 14 Februari 2000. Sampai bulan Maret 2001, belum direspon oleh Pemerintahan Kabupaten Solok, karena menurut informasi yang berkembang pada saat itu bahwa Pemekaran Kabupaten Solok adalah keinginan kelompok tertentu saja.

4. Generasi Keempat, pada bulan Februari 2002 beberapa orang tokoh masyarakat yang berada di Padang, Solok dan Sawah Lunto Sijunjung diantaranya; Syafri Duraman, Syamsir Pane, Asril Umar, Armen Muchtar, Musril Kusai dan Rosman Effendi berinisiatif untuk melaksanakan pertemuan antar tokoh masyarakat yang berada di kampung halamannya dengan tokoh masyarakat Solok Selatan yang berada di Padang, Solok, Sawahlunto Sijunjung dan Bukittinggi guna untuk membahas pentingnya pembentukan Kabupaten Solok Selatan. Pertemuan tersebut terlaksana pada tanggal 15 maret 2002 di Gedung IAIN Jalan Sudirman Padang.
Hasil dari pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain :
 - Perjuangan Tokoh Masyarakat dalam upaya mewujudkan pembentukan Kabupaten Solok harus ditindak lanjuti, dengan mengacu kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku hingga tidak terjadi lagi hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang tidak diingini.
 - Pembentukan Pengurus Badan Penggerak Pembentukan Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2).

III. TAHAP – TAHAP YANG DILALUI

1. Pada tanggal 16 Maret 2002, BP2KS2 (diwakili Ir. Musril Kusai) di utus ke Jakarta, untuk menyampaikan hasil keputusan rapat tanggal 15 Maret 2002 kepada Tokoh-tokoh Masyarakat Solok Selatan yang berada di Jakarta.

2. Pada Tanggal 18 Maret dilaksanakan pertemuan antara BP2KS2 (Ir. Musril Kusai) dengan Tokoh Masyarakat di Jakarta yang di kordinasikan oleh : Daulat yang di Pertuan Bagindo Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah, pertemuan tersebut dinamakan pertemuan senayan, hasil pertemuan tersebut adalah ; melengkapi kepengurusan BP2KS2 dan Perbaikan Struktur Organisasi BP2KS2.
3. Pada tanggal 15 April kembali digelar pertemuan antara BP2KS2 dengan Tokoh Masyarakat Solok Selatan di Jakarta, utusan BP2KS2 yang hadir adalah Ir. Musril Kusai, Drs. Bulasmi Aban dan Rosman Efendi SE, SH, sedangkan Tokoh Masyarakat di Jakarta diantaranya Daulat yang dipertuan Bagindo Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah, Letjen (Purn) TNI-AD H. Muzani Syukur, Bridjen TNI-AD Armein Achmad dan lain-lain. Hal-hal yang dibahas adalah : ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pembentukan Kabupaten Solok Selatan serta manfaat dari pemekaran Kabupaten Solok.
Hasil dari keputusan rapat tersebut adalah tercapainya kesamaan pandangan / persepsi yang sama antara tokoh masyarakat yang berada di Jakarta dengan daerah / kampung halaman dengan demikian diharapkan tidak ada kendala lagi dalam proses pemekaran lebih lanjut.
4. Pada tanggal 29 April dilaksanakan pertemuan antara BP2KS2 dengan pemerintah Kabupaten Solok di Gedung DPR-D Kabupaten Solok. BP2KS2 yang hadir pada waktu itu adalah DR. Armen Muchtar, Ir. Musril Kusai dan Drs. Jhonri Roza, MSc, sedangkan di Pihak Pemerintah Kabupaten Solok adalah Bapak Bupati, Gamawan Fauzi, Drs. Aliman Salim, Drs. Bustamar dan lain-lain.
Maksud pertemuan tersebut adalah dalam rangka penyampaian Aspirasi masyarakat tentang keinginan pembentukan Kabupaten Solok Selatan. Dari hasil pertemuan tersebut, Bupati Kabupaten Solok secara perinsip mendukung untuk melakukan pemekaran Kabupaten Solok.
Sehubungan dengan hal tersebut Bupati Kabupaten Solok meminta kepada BP2KS2 untuk melakukan penelitian guna untuk mengkaji kelayakan pemekaran Kabupaten Solok dan data-data yang diperlukan akan disediakan sebagaimana mestinya.

5. Pada awal Mei 2002 s/d 15 Juni 2002 BP2KS2 (diwakili Ir. Musril Kusai) sebagai Kordinator Tim melakukan penelitian berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, penghapusan dan pengembangan daerah di 19 Kecamatan di Kabupaten Solok. Kriteria penelitian yang dilakukan adalah Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Kondisi Sosial Budaya, Kondisi Sosial Politik, Jumlah Penduduk, Luas Daerah dan lain-lainnya. Sejalan dengan penelitian tersebut Ketua BP2KS2 yang mewakili Kecamatan Kota Parik Gadang Diateh (Andi Suryadi) Kecamatan Sungai Pagu (Masrial Dt. Indo Mangkuto) Kecamatan Sangir (M. Zen Dt. Bandaro) melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang pembentukan Kabupaten Solok Selatan di masing Kecamatan guna untuk menghimpun Aspirasi yang mendukung Pembentukan Kabupaten tersebut. Untuk kelancaran penelitian dan Sosialisasi tersebut Bapak Bupati Kabupaten Solok telah membuat Surat Kepada DPR-D, Dinas / Instansi dan Camat Kabupaten Solok dengan nomor surat 100/244/TP-2002 tanggal 4 Juni 2002.
6. Pada awal 22 Juni 2002 dilaksanakan rapat kordinasi terpadu di Hotel Pangeran Padang antara Tokoh Masyarakat yang berada di Rantau dan di Kampung halaman. Dari Perantau Jakarta di hadiri oleh Daulat yang Dipertuan Bagindo Sultan Besar Tuanku Rajo Disambah, Letjen (Purn) TNI-AD H. Muzani Syukur, Bridjen TNI-AD Armein Achmad dan lain-lain. Sedangkan dari Medan di hadiri oleh DR. Syofyan Abdullah, DR,Ir. Syafrul Latif, Darmi Basir dan lain-lain. Agenda dari pertemuan tersebut adalah membahas hasil penelitian dan langkah – langkah yang akan dilakukan oleh BP2KS2 untuk mempercepat proses pembentukan Kabupaten Solok Selatan.
7. Pada tanggal 23 Juni 2002 atas inisiatif tokoh masyarakat di Jakarta dilakukan pertemuan terbatas antara BP2KS2 dengan Bupati Kabupaten Solok. Hasil pertemuan tersebut Bupati Solok meminta agar hasil penelitian tersebut segera disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Solok.
8. Pada tanggal 25 Juni 2002, BP2KS2 dengan Surat No. 02/BP2KS2/PDG/VI/2002 tertanggal 25 Juni 2002 menyampaikan hasil Penelitian secara resmi kepada Pemerintah Kabupaten Solok dengan tembusan Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat dan DPR-D Kabupaten Solok.

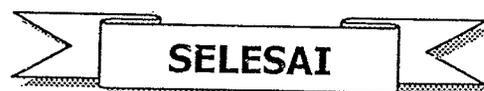
9. Pada tanggal 25 Juni 2002 yaitu pada hari yang sama Bupati Kabupaten Solok, meneruskan hasil penelitian tersebut kepada DPR-D Kabupaten Solok dengan nomor surat 100/285/TP-2002 tertanggal 25 Juni 2002.
10. Pada tanggal 12 Juli 2002 BP2KS2 / Pansus BP2KS2 di bawah kordinasi Sekretarias Umum melakukan pertemuan yang mendesak dengan DPR-D Kabupaten Solok, karena semenjak disampaikan hasil penelitian oleh Bupati tanggal 25 juni 2002 tidak direspon oleh DPR-D Kabupaten Solok. Hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa hasil penelitan tersebut akan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya dalam waktu yang tidak begitu lama.
11. Pada tanggal 16 Juli 2002 DPR-D Kabupaten Solok melayangkan Surat kepada BP2KS2 dengan No. 005/1466/DPR-D/VII-2002, tertanggal 16 Juni perihal : Permintaan Pemaparan hasil Penelitian oleh BP2KS2 pada tanggal 26 Juli 2002 di Gedung DPR-D Koto Baru Solok.
12. Pada tanggal 18 Juli 2002 BP2KS2 melaksanakan rapat kordinasi dengan tokoh/pemuka masyarakat Solok Selatan di Muara Labuh untuk menghimpun masukan dalam rangka memaparkan hasil penelitian di Gedung DPR-D Koto Baru Solok tanggal 26 Juli 2002.
13. Pada tanggal 18 Juli 2002 Sekretariat Daerah Kabupaten Solok melayangkan Surat Undangan kepada BP2KS2 dengan No. 100/333/TP-2002 tanggal 18 Juli 2002, meminta BP2KS2 memaparkan hasil Penelitan dan Proposal Pemekaran pada tanggal 20 Juli 2002 di Ruangan Rapat Bupati Sukarami – Kayu Aro Solok.
14. Pada tanggal 20 Juli 2002, BP2KS2 (Ir. Musril Kusai) memaparkan hasil Penelitian dan Proposal Pemekaran di Ruang Rapat Bupati Sukarami – Kayo Aro Solok. Pihak yang hadir, dari BP2KS2 adalah Pengurus BP2KS2 / Pansus BP2KS2 beserta Anggotanya dan dari pihak Pemerintah ; Dinas/Instansi Lembaga dan Camat Kabupaten Solok. Hasil pemaparan tersebut di respon dengan baik oleh pihak yang hadir namun beberapa data perlu diklarifikasi lagi dengan instansi terkait guna untuk penyempurnaan hasil penelitan.

15. Pada tanggal 26 Juli 2002, BP2KS2 (Ir. Musril Kusai) memaparkan hasil penelitian dan proposal pemekaran di gedung DPR-D Koto Baru Solok. Acara ini dihadiri oleh seluruh fraksi di DPR-D, Dinas/Instansi, Lembaga dan Camat se Kabupaten Solok. Sedangkan di Pihak Masyarakat di hadiri oleh seluruh pengurus BP2KS2, Tokoh masyarakat dan berbagai lapisan masyarakat Solok Selatan sebanyak \pm 500 orang guna untuk memberikan dukungan kepada BP2KS2 agar terwujudnya pembentukan Kabupaten Solok Selatan. Hasil dari pemaparan ini di respon positif baik di pihak legislatif maupun di pihak Eksekutif yang hadir pada waktu itu.
16. Pada tanggal 29 Juli 2002 DPR-D Kabupaten Solok melaksanakan Sidang Paripurna dengan Agenda Pemekaran Kabuapten Solok.
17. Pada tanggal 29 Juli 2002, DPR-D Kabupaten Solok menerbitkan Surat Keputusan No. 08 tahun 2002 tentang persetujuan pemekaran daerah Kabupaten Solok menjadi dua Kabupaten.
18. Pada tanggal 30 Juli 2002, Bupati Kabupaten Solok menyampaikan surat kepada Gubernur Sumatera Barat tentang usulan pemekaran Kabupaten solok dengan No. 100/359/TP-2002 30 Juli tahun 2002.
19. Pada tanggal 10 Agustus 2002 Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Barat melayangkan surat kepada BP2KS2 untuk memaparkan hasil penelitian pemekaran Kabupaten Solok dengan surat No. 100/681/PEM-2002, tertanggal 10 Agustus 2002.
20. Pada tanggal 12 Agustus 2002, BP2KS2 (Ir. Musril Kusai) memaparkan hasil penelitian Pemekaran Kabupaten Solok di ruang rapat Asst. I Sekda Propinsi Sumatera Barat.
21. Pada tanggal 15 Agustus 2002 Tim Kerja Pemekaran Propinsi melakukan kunjungan ke wilayah Solok Selatan, untuk melihat lebih dekat aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat tentang pemekaran Kabupaten Solok.
22. Pada tanggal 19 Agustus 2002 Tim Kerja DPR-D Propinsi melakukan kunjungan ke wilayah Solok Selatan, untuk melihat lebih dekat aspirasi yang berkembang di tengah – tengah masyarakat tentang pemekaran Kabupaten Solok.

23. Pada tanggal 22 Agustus 2002 DPR-D Propinsi Sumatera Barat melakukan sidang Paripurna Pemekaran Kabupaten Solok.
24. Pada tanggal 22 Agustus 2002 DPR-D Propinsi Sumatera Barat menerbitkan surat keputusan No. 12/SB/2002, tertanggal 22 Agustus 2002, tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Barat terhadap Pemekaran Daerah Kabupaten Solok menjadi dua Kabupaten.
25. Pada tanggal 22 Agustus 2002 Gubernur Propinsi Sumatera Barat menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 120/696/PEM-2002, tertanggal 22 Agustus 2002 perihal Usulan Pemekaran Kabupaten Solok menjadi dua Kabupaten.
26. Pada tanggal 29 Agustus s/d 4 September 2002 BP2KS2 bersama tokoh masyarakat Solok Selatan di Jakarta melakukan rapat kordinasi, mendiskusikan berbagai kendala yang mungkin terjadi di dalam proses Pembentukan Kabupaten Solok Selatan. Pada tanggal 4 September 2002 atas inisiatif pembina BP2KS2 di Jakarta. BP2KS2 dengan tokoh masyarakat di Jakarta beraudensi dengan Bapak Menteri dalam Negeri Hari Sabarno, dalam rangka mempercepat proses pemekaran Kabupaten Solok.
27. Pada tanggal 18 September 2002, atas Inisiatif Penasehat Hukum BP2KS2 di Jakarta, Tim BP2KS2 bersama tokoh masyarakat Solok Selatan yang berada di Jakarta menghadiri sidang dengar pendapat dengan DPR-RI dalam rangka untuk mempercepat proses pemekaran Kabupaten Solok.
28. Pada tanggal 31 Oktober 2002 digelar rapat Kordinasi antara BP2KS2 dengan pembina BP2KS2 di Hotel Bumi Minang Padang, Agenda Rapat adalah mengevaluasi Kinerja BP2KS2 dan Isu – isu yang berkembang di tengah masyarakat tentang Kinerja BP2KS2.
29. Tanggal 25 Agustus 2002 s/d 15 Januari 2003 dimana setelah proposal pembentukan Kabupaten Solok Selatan telah sampai di Jakarta, BP2KS2 yang ada di Jakarta bersama Pembina BP2KS2 sesuai dengan Kepentingan dan Kebutuhan melakukan lobby ke Departemen Dalam Negeri dan DPR-RI, melakukan rapat kordinasi dan membahas berbagai persoalan yang terjadi atau yang mungkin terjadi di dalam proses pemekaran Kabupaten Solok di Jakarta.

30. Tanggal 5 Januari 2003 BP2KS2 melaksanakan rapat kordinasi dalam rangka penyambutan tim DEP DAGRI turun ke daerah untuk melakukan klarifikasi terhadap hasil penelitian dan proposal pembentukan Kabupaten Solok Selatan. Rapat dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Pasir Talang.
31. Tanggal 11 Januari 2003 BP2KS2 melaksanakan rapat kordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Solok dalam rangka penyambutan Tim DEP DAGRI turun ke Daerah untuk melakukan Klarifikasi terhadap hasil penelitian dan proposal pembentukan Kabupaten Solok Selatan.
32. Tanggal 21 Januari 2003 bertempat di Kecamatan Sangir, BP2KS2 bersama Tokoh dan Pemuka Masyarakat Solok Selatan membentuk Panitia penyambutan Tim DEP DAGRI turun ke daerah.
33. Tanggal 12 Februari 2003 BP2KS2 melakukan checking terakhir tentang persiapan panitia penyambutan tim DEP DAGRI pada masing-masing Kecamatan di wilayah Solok Selatan.
34. Pada tanggal 26 Februari 2003 bertempat diruangan rapat Gubernur Sumatera Barat, BP2KS2 mengikuti rapat penjelasan Pemekaran 3 (tiga) Kabupaten di Sumatera Barat oleh Tim DEP DAGRI yang datang dari Jakarta.
35. Pada tanggal 26 Februari 2003, di Hotel Rocky Plaza BP2KS2 (Ir. Musril Kusai) diminta oleh Tim DEP DAGRI memberikan penjelasan tentang rencana pemekaran Kabupaten Solok.
36. Pada tanggal 27 Februari 2003 bertempat di Kantor Bupati Sukarami – Kayu Aro Solok Tim DEP DAGRI melakukan Klarifikasi data terhadap proposal yang telah disampaikan ke DEP DAGRI. Klarifikasi data dilakukan kepada Pemerintah Kabupaten Solok dan BP2KS2 yang masing-masing diwakili oleh Drs. Syamsir Pane sedangkan dari BP2KS2 diwakili oleh Ir. Musril kusai.
37. Pada tanggal 27 Februari 2003 ditempat yang berbeda di Kantor Bupati Sukarami-Kayu Aro Solok juga berlangsung pemaparan pemekaran Kabupaten Solok oleh Bupati Solok Gamawan Fauzi.

38. Pada tanggal 28 Februari 2003, Tim DEPDAGRI melakukan observasi kewilayah Solok Selatan, guna melihat lebih dekat kondisi daerah yang akan menjadi calon Kabupaten Baru.
39. Tanggal 28 Februari s/d Nopember 2003 Tim DEPDAGRI melakukan verifikasi dan klarifikasi serta kajian terhadap 24 Kabupaten / Kota yang akan dimekarkan diseluruh Indonesia. Hasil kajian tersebut disampaikan kepada Team DPOD. Dari hasil sidang Team DPOD Kabupaten Solok dinyatakan layak untuk dimekarkan menjadi dua Kabupaten, hasil sidang Team DPOD tersebut mendapat persetujuan dari Presiden melalui AMPRES. AMPRES tersebut disampaikan kepada DPR-RI untuk dibahas RUU pembentukan Kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat dan Dharmasraya di Propinsi Sumatera Barat.
40. Pada bulan Nopember 2003 dibahas RUU pembentukan Kabupatyeen Pasaman Barat, Dharmasraya dan Solok Selatan oleh komisi II DPR-RI dan pada tanggal 20 Nopember 2003 ditetapkan RUU menjadi Undang-Undang pembentukan Kabupaten Pasaman, Dharmasraya dan Solok Selatan oleh DPR-RI melalui sidang pleno.
41. Pada tanggal 7 Januari 2004, Kabupaten Solok Selatan bersama 23 Kabupaten lainnya diresmikan di Jakarta oleh Mendagri sebagai Kabupaten Otonomi Baru di Indonesia.
42. Pada tanggal 10 Januari 2004, untuk menjalankan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Solok Selatan Mendagri menetapkan Drs. Aliman Salim sebagai Pejabat Bupati yang dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat tanggal 10 Januari 2004 di Padang.

**SELESAI**

**KEPUTUSAN
BADAN PENGGERAK PEMBENTUKAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN (BP2KS2)
No. 01/KPTS/BP2KS2/2002**

**Tentang
Pembentukan Panitia Khusus untuk Membantu
BP2KS2 Dalam Pelaksanaan Tugasnya**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Badan Penggerak Pembentukan
Kabupaten Solok Selatan**

- MENIMBANG** : a. Bahwa di dalam pelaksanaan Pemekaran Kabupaten Solok diperlukan Tim Khusus yang praktis melakukan lobby, diskusi, koordinasi dengan pihak Pemerintah agar Proses pembentukan Kabupaten Solok Selatan berjalan lancar sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan.
- b. Bahwa hasil Keputusan Rapat Koordinasi Tokoh-tokoh Masyarakat Kabupaten Solok Selatan tanggal 22 Juni 2002 tentang Pembentukan Tim Khusus untuk mempercepat proses pembentukan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada *huruf a*.
- c. Bahwa untuk terlaksananya usulan pemekaran sebagaimana dimaksud *huruf a* tersebut diatas, perlu dituangkan di dalam suatu Keputusan Pengurus BP2KS2.

- MENGINGAT** : 1. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Daerah No. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

MENETAPKAN :

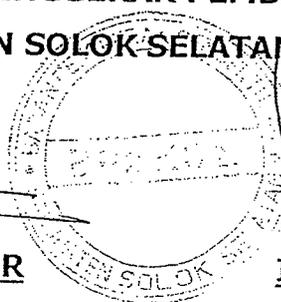
- Pertama** : Membentuk Tim Khusus BP2KS2 untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur di dalam keputusan ini.
- Kedua** : Tugas utama dari Tim Khusus ini adalah melakukan Lobby, Diskusi, Koordinasi dengan Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Propinsi dan Pemerintahan Pusat dalam rangka mempercepat Proses Pemekaran Kabupaten Solok Selatan.
- Ketiga** : Hasil tugas Tim Khusus harus dilaporkan ke Sekretariat BP2KS2.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini dibebankan kepada Panitia BP2KS2.
- Kelima** : Susunan Tim Khusus BP2KS2 sebagaimana lampiran surat Keputusan ini.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 24 Juni 2002

**BADAN PENGGERAK PEMBENTUKAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN (BP2KS2)**



DR. ARMEN MUCHTAR
Ketua



Ir. MUSRIL KUSAI
Sekretaris

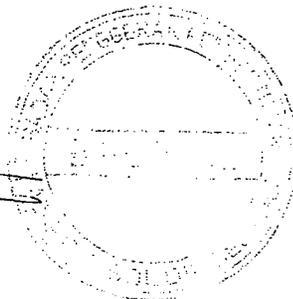
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
No. 01/KPTS/BP2KS2/2002

Drs. BULASMI ABAN	Ketua
AHMAD YANI	Anggota
HAZWAR MUIS DT. BAGINDO SATI	Anggota
SUHATRIL HAMID DT. NAN BATUAH DILANGUANG	Anggota
Drs. YUSRIZAL SAUTA	Anggota
Ir. THAMRIN NURDIN, Msi	Anggota
Drs. RAMALIS DT. TANGKEH RULLAH	Anggota
KAHAIDIR NUH, BE	Anggota
MOECHTAR IS, SH	Anggota
DR. ARMEN MUCHTAR	Anggota
Ir. MUSRIL KUSAI	Anggota
Ir. SYAHRIL EFFENDI	Anggota
NASRULLAH	Anggota
YUNIZAL BARI, SE	Anggota
PUTRA NUSA	Anggota
IRWANDI YUSUF	Anggota
MAHYUDDIN	Anggota
IRWANDI RAIS	Anggota
M. ZEN DT. BADARO	Anggota
MASRIAL DT. INDO MANGKUTO	Anggota
ANDI SYURYADI	Anggota
KHAIRUNNAS	Anggota

**BADAN PENGGERAK PEMBENTUKAN KABUPATEN
SOLOK SELATAN (BP2KS2)**



DR. ARMEN MUCHTAR
Ketua



Ir. MUSRIL KUSAI
Sekretaris

BADAN PENGGERAK PEMBENTUKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN (BP2KS2)

KEPUTUSAN
BADAN PENGGERAK PEMBENTUKAN
KABUPATEN SOLOK SELATAN (BP2KS2)
No. 01/KPTS/BP2KS2/2002

Tentang
Pembentukan Panitia Khusus BP2KS2 Tingkat Pusat

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Badan Penggerak Pembentukan
Kabupaten Solok Selatan

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi antar tokoh masyarakat Solok Selatan pada tanggal 15 Maret 2002 dan Rapat Terbatas antar tokoh masyarakat di Jakarta tanggal 18 Maret 2002 tentang Pembentukan Organisasi BP2KS2;
 - Bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi antar tokoh masyarakat tanggal 22 Juni 2002 di Hotel Pangeran Beach Padang tentang Pembentukan Tim Khusus BP2KS2 di tingkat pusat dan daerah;
 - Bahwa untuk pembentukan Panitia Khusus pada huruf b perlu dituangkan dalam keputusan BP2KS2.
- Mengingat :
- Aspirasi masyarakat Solok Selatan semenjak tahun 1950 menginginkan Pembentukan Kabupaten Solok Selatan;
 - Aspirasi masyarakat Solok Selatan menginginkan Pemerintah Pusat dapat menyelesaikan undang-undang pembentukan Kab. Solok Selatan pada tahun 2002 ini;
 - Aspirasi masyarakat Solok Selatan menginginkan 6 (enam) bulan kedepan, setelah lahirnya UU pembentukan Kab. Solok Selatan, Kab. Definitif telah terbentuk.
- Memperhatikan :
- Saran-saran dan masukan dari tokoh-tokoh masyarakat yang berada di daerah maupun di pusat agar ada kebersamaan di dalam memperjuangkan pembentukan Kab. Solok Selatan;
 - Penyampaikan aspirasi dan lobi terakhir pemekaran Kab. Solok adalah di Jakarta.

Sekretariat

Jalan Ikhlas IV No. 1
Andalas Barat Padang
Telp. (0751) 29720

BADAN PENGGERAK PEMBENTUKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN (BP2KS2)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Membentuk Tim Khusus di Jakarta sebagaimana yang diatur di dalam keputusan ini;
- Kedua : Tugas Tim Khusus adalah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan melakukan lobi dengan departemen/lembaga yang terkait dengan pemekaran kabupaten;
- Ketiga : Didalam penyampaian aspirasi/sosialisasi agar melibatkan seluruh tokoh masyarakat Solok Selatan yang berpotensi dan mendukung pembentukan Kab. Solok Selatan;
- Keempat : Didalam menjalankan tugas tersebut diatas dapat berkonsultasi/koordinasi dengan Pembina dan Penasehat Hukum BP2KS2 sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Struktur Organisasi terlampir;
- Kelima : Susunan Tim Khusus BP2KS2 di tingkat pusat sebagaimana lampiran keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 10 September 2002

BADAN PENGGERAK PEMBENTUKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN (BP2KS2)



DR. ARMEN MUCHTAR
Ketua Umum



IR. MUSRIL KUSAI
Sekretaris Umum

Sekretariat

Jalan Ikhlas IV No. 1
Andalas Barat Padang
Telp. (0751) 29720

BADAN PENGGERAK PEMBENTUKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN (BP2KS2)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
No. 01/KPTS/BP2KS2/2002

Tentang
Susunan Pengurus Tim Khusus
BP2KS2 di Jakarta

- Ketua Tim : Drs. Darmilus Adam
Wakil Ketua : Drs. Syafrizal, MSI.
Anggota : 1. Zulfahmi Burhan, SE. MM. MBA.
2. Ir. Kardiman
3. Zulkifli M. Noer
4. St. Mahisal Malay
5. Drs. H. Erman Hafni
6. Zulkifli Noer
7. Letkol (CPL) H. Soeheyemi Taib, SE.
8. Drs. Zul Kasim
9. Adril Soelaiman, SE. MPA. MA.
10. Asril Maas
11. Ir. Hasmurdi Hasan
12. H. Zulchairi, SE.
13. Drs. H. Mudjadid D. SH. MH. MBL.

BADAN PENGGERAK PEMBENTUKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN (BP2KS2)



DR. ARMEN MUCHTAR

Ketua Umum



IR. MUSRIL KUSAI

Sekretaris Umum

Sekretariat

Jalan Ikhlas IV No. 1
Andalas Barat Padang
Telp. (0751) 29720



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
Kayu Aro-Sukarami Telp (0755) 31334-31335 Fax 31333
SOLOK

Kayu Aro - Sukarami, 18 Juli 2002

Nomor : 100/555/TP-2002
Lampiran : --
Perihal : Penyampaian Paparan

Kepada

Yth. Sdr. Ketua Badan Penggerak Pemekaran
Kabupaten Solok Selatan.

di-

Padang

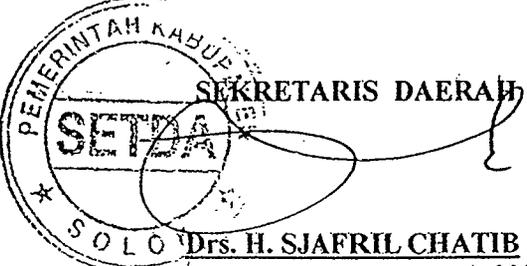
Dengan hormat,

Sehubungan dengan Proposal Pemekaran Kabupaten Solok Selatan yang telah kami terima, Pemerintah Daerah bermaksud akan membahasnya bersama DPRD Kabupaten Solok pada tanggal 24 Juli 2002.

Sekaitan dengan hal tersebut, kami harapkan pada Saudara untuk dapat memaparkan proposal dimaksud dihadapan Tim Peneliti Awal Pemekaran Daerah Kabupaten Solok, pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 20 Juli 2002
Jam : 13.⁰⁰ Wib.
Tempat : Ruang Rapat Kantor Bupati Solok di Kayu Aro.

Demikianlah kami sampaikan pada Saudara, untuk dimaklumi dan terima kasih.


SEKRETARIS DAERAH
SETDA
Drs. H. SJAFRIL CHATIB
Pembina Utama Muda NIP. 410002432

Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Solok di Koto Baru.
2. Yth. Bapak Muspida Plus Kabupaten Solok.

Revisi B.P.K.S. dg Bupati tgl 24 April 2002

KAMI BERTEKAT MENJADI KABUPATEN TERBAIK DARI YANG BAIK

- * Masyarakat Bangsa yang Uda Usaha dan Daerahnya, Bertakwa, Berakhlak, Berbudaya, dan Berdisiplin
- * Perantau Bangsa pada Kampung Halamannya
- * Aparatur Bangsa dalam Pengabdian



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SOLOK

Jl. Raya Koto Baru No. 7 Telp. (0755) 20148 Solok

Nomor : 005/1466/DPRD-VII-2002
Lampiran : -
Perihal : Usulan Pemekaran Kabupaten
Solok.

Koto Baru, 16 Juli 2002

K e p a d a

Yth. Sdr. Ketua Badan Penggerak
Pemekaran Kabupaten Solok
Selatan (BP2KS2)

di.-

Muara Labuh

Dengan hormat,

Untuk menindak lanjuti hasil pertemuan antara Badan Penggerak Pemekaran Kabupaten solok Selatan (BP2KS2) dengan Pimpinan DPRD dan Ketua-ketua Komisi DPRD Kabupaten Solok pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2002 tentang Usulan Pemekaran Kabupaten Solok, maka sesuai dengan hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Solok tanggal 11 Juli 2002, dengan ini kami harapkan kepada saudara untuk dapat hadir dan sekaligus menyampaikan Ekspose tentang Usulan Pemekaran Kabupaten Solok Selatan dalam Rapat DPRD Kabupaten Solok pada :

Hari / tanggal : Jum'at / 26 Juli 2002
J a m : 09.⁰⁰ WIB
Tempat : Ruang Rapat DPRD Kabupaten Solok
Acara : Penyampaian Ekpose Badan Penggerak
Pemekaran Kabupaten Solok Selatan
(BP2KS2) tentang Usulan Pemekaran
Kabupaten Solok.

Demikian untuk dimaklumi dan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
Ketua
= Drs. H. SA'ADUDIN. AS. KH. BGD =

Tembusan :

1. Yth Bupati Solok di Kayu Aro-Sukarami.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH

Jln. Jend. Sudirman No. 51 Telp. 31401 – 31402 – 34425 Padang

Nomor : 100 / 681 / Pem-2002
Lampiran :
Sifat : Biasa
Perihal : Undangan

Padang, 10 Agustus 2002

Kepada

Yth. Sdr. KETUA BPZ KSZ

di

Padang

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dibentuknya Tim Kerja Persiapan Proses Pemekaran Kab. Solok, bersama ini diharapkan kehadiran Saudara pada pertemuan anggota Tim dimaksud, yang akan diadakan pada :

Hari : Senin

Tanggal : 12 Agustus 2002

Pukul : 10.00 Wib.

Tempat : Ruang Rapat Asisten Pemerintahan

Acara : Ekspose Badan Penggerak Pembentukan
Kabupaten Solok Selatan.

Demikianlah disampaikan, atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH PROP SUMBAR

DRS. H. RUSDI LUBIS
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049138.-



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Kayu Aro - Sukarami Telp. (0755) 31334 - 31335 Fax. 31333
S O L O K

Kayu Aro - Sukarami, 6 Januari 2003

Nomor : 100/ 08 /TP-2003.
Lampiran : - " -
Perihal : Persiapan Pemekaran

K e p a d a,
Yth. Sdr. Ketua Badan Penggerak Pemekaran
Kabupaten Solok Selatan.

Di -
Padang.

Dengan hormat,

Guna menindak lanjuti hasil rapat tentang pemekaran Kabupaten Solok Selatan tanggal 18 Desember 1002 di Jakarta, bersama ini kami Informasikan pada saudara bahwa Tim Observasi Lapangan dari Pusat akan segera turun ke Kabupaten Solok.

Sekaitan dengan hal tersebut, bersama ini kami harapkan kehadiran Saudara pada :

H a r i : S a b t u

T a n g g a l : 11 Januari 2003

J a m : 10.00 wib.

T e m p a t : Ruang Rapat Kantor Bupati di Kayu Aro.

A c a r a : Persiapan Kunjungan Tim Observasi Lapangan Pemekaran Kabupaten Solok.

Demikianlah kami sampaikan, pada Saudara untuk dimaklumi dan atas kehadirannya kami aturkan terima kasih.



SEKRETARIS DAERAH

Drs. H. SJAFRIL CHATIB =
Pembina Utama Muda Nip. 410002432.-

Tembusan

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Yth. Bapak bupati Solok (sebagai laporan).
3. Yth. Bapak ketua DPRD Kabupaten Solok di Koto Baru.
4. ----- A r s i p -----

**LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
BP2KS2**

DAFTAR KEGIATAN DAN SUMBANGAN YANG DITERIMA BP2KS2
Dari Tanggal 15 Maret 2002 s/d 30 Maret 2003

NO	KEGIATAN DAN DANA SUMBANGAN	JUMLAH	NO	BIAYA PENGELUARAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Rapat Koordinasi antar Tokoh Masyarakat di Padang (Gedung IAIN) tanggal 15 Maret 2002 1. Irwandi Yusuf 2. Masyuadi Mansur	400.000 200.000 600.000	1	Biaya makan dan snack 60 x Rp. 10.000,-	600.000	
2	Rapat terbatas BP2KS2 dengan tokoh masyarakat di Jakarta 18 Maret 2002 1. Ir Musril Kusai Sub Total	3.310.000 3.310.000	2	Tiket PP 1 orang Pdg - Jkt Transportasi 5 hari di Jakarta Hotel 5 hari + makan Total	600.000 1.560.000 500.000 1.250.000 3.310.000	
3	Dalam rangka memenuhi undangan Rapat di Jakarta 3 orang (15/4-2002) 1. Irwandi Yusuf 2. Khairunas 3. Syamsir Pane 4. Asril Umar 5. Rusman efendi 6. Musril Kusai 7. Buiasmi Aban 8. Mujadid (2 hari biaya hotel)	1.150.000 1.000.000 500.000 300.000 250.000 275.000 526.000 4.001.000	3	Tiket 6 buah (6 x Rp. 526.000) Airport Tax Taksi (5 x Rp. 100.000) / Transport Hotel 2 hari (di Jakarta) Foto copy bahan rapat Makan 5 hari untuk 3 orang	3.156.000 72.000 500.000 450.000 262.000 1.125.000	
4	Dalam rangka pembuatan proposal dan penelitian dari 16 April 2002 s/d 15 Juni 2002 1. Irwandi Yusuf 2. Belly Saputra 3. Kahrunas 4. Musril Kusai (Penyusunan Proposal)	1.000.000 3.000.000 5.000.000 9.000.000	4	Biaya survey di 19 kecamatan dan kabupaten oleh Tim Survey (surveyor) 3 orang - 26 hari x Rp 225.000 - sewa mobil + BBM 26 hari x Rp 150.000 - survey ke kabupaten Solok 3 hari x Rp 225.000 - Pembantu Penyusunan Proposal 2 bulan x Rp. 1000.000 = Rp. 2.000.000,- - Foto copy proposal utk tgl 22-6-2002 - Meripbanyak bahan materi untuk kabupaten, propinsi dan Jakarta - Transparan - Biaya pengiriman proposal ke Jakarta Total	5.850.000 3.900.000 675.000 2.000.000 650.000 146.150 76.000 30.000 13.327.150	(1.564.000)
	Sub Total	9.000.000		Total	13.327.150	(4.327.150)

NO	KEGIATAN DAN DANA SUMBANGAN	JUMLAH	NO	BIAYA PENGELUARAN	JUMLAH	KETERANGAN
5	Rapat Koordinasi di Hotel Pangeran Padang 22 Juni 2002 1. Sumbangan masyarakat 2. Syamsir Pane 3. Zulkhairi 4. Musril Kusai 5. Irwandi Yusuf 6. Son/Kontraktor 7. Belly Saputra Sub Total	2.500.000 2.000.000 1.500.000 500.000 1.000.000 500.000 900.000 8.900.000	5	- Hotel - Sewa bis (2) - Wartawan - Cetak Foto - Biaya Panitia ke Sangir 23 Juli 2002	7.600.000 1.000.000 150.000 50.000 200.000	
6	Pembahasan materi proposal dengan Pemda dan DPRD Solok 20 & 26 Juli 2002 dan mobilisasi massa dari Solok Selatan 1. Ikasupa Jakarta 2. Irwandi / DPRD Sub Total	5.000.000 1.500.000 6.500.000	6	- Foto copy materi proposal - Transparan - Sewa mobil pribadi (4 buah) - Sewa bus dari Solok Selatan - Biaya makan (420 x 6000) - Wartawan - Polisi - Spanduk - Rokok dll - Biaya rapat di Muara Labuh 21 Juli 2002 Total	132.800 90.000 400.000 1.750.000 2.520.000 565.000 200.000 800.000 1.075.000 100.000 7.632.800	(100.000)
7	Biaya Operasional Pansus dan rapat rutin BP2KS2 Syamsir Pane Sub Total	3.200.000 3.200.000	7	Biaya Operasional - Pansus Tgl 25 Juni s/d 30 Juli (Transport + Makan) 8 X Rp. 400.000,- - Rapat rutin BP2KS2 tgl. 15 maret s/d 25 sept. 2002 24 x Rp. 200.000 Total	3.200.000 4.800.000 8.000.000	(1.132.800) (4.800.000)
8	Kunjungan Tim Kerja Persiapan Pemekaran Propinsi ke Muara Labuh tanggal 15 Agustus 2002 1. Syamsir Pane (± 15 orang + Masyarakat) Sub Total	1.300.000 1.300.000	8	- BBM - Makan Slang ± 80 orang - Foto copy proposal Total	400.000 1.200.000 300.000 1.900.000	(600.000)
9	Kunjungan kerja Tim DPR Propinsi ke Muara Labuh tanggal 19 Agustus 2002 1. Haji Musni 2. Airmen Mughtar 3. Syamsir Pane Sub Total	500.000 200.000 300.000 1.000.000	9	Biaya Makan Slang + Snack 80 orang Foto Copy Materi Total	1.400.000 200.000 1.600.000	(600.000) (600.000)

NO	KEGIATAN DAN DANA SUMBANGAN	JUMLAH	NO	BIAYA PENGELUARAN	JUMLAH	KETERANGAN
10	1. Sumbangan IKASUPA Medan Tanggal 22 Agustus 2002	2.500.000	10	- Foto copy Proposal 10 buah buku untuk Kantor Gubernur tanggal 22 Agustus 2002	200.000	
	Sub Total	2.500.000		Total	40.000	2.260.000
11	Rapat BP2KS2 dengan Pembina dan lobby di Dep Dagri Jakarta tgl. 29 Agust. 2002 s/d 4 Sept. 2002 M. Tulus	7.765.364	11	- Tiket 2 orang (OW) - Tiket 2 orang (Jakarta - padang) - Biaya Penginapan (2 orang) - Dana Taktis di Dep Dagri Via Syafrizal -Makan 6 x 150,000	1.398.000 1.294.000 321.364 4.000.000 900.000	
	Sub Total	7.765.364		Total	6.515.364	1.250.000
12	Biaya Sekretariat dari 15 Maret s/d 15 September 2002		12	- Honorium Pembantu Sekretariat 1 (satu) orang 1 x 6 x Rp. 500.000,- - Komunikasi 6 bulan x Rp. 700.000 - Alat - Alat Tulis 6 bulan x Rp. 300.000	3.000.000 4.200.000 1.800.000	
	Sub Total			Total	9.000.000	(9.000.000)
13	Hearing dengan wakil ketua DPR-RI tanggal 18 September 2002 1. Drs. Syafrizal 2. Drs. Mujadid D. SH. MBL 3, Mahizal 4. Khairunas (VCD Laserdisk 4 buah)	1.296.000 1.500.000 150.000 300.000	13	- Tiket Padang - Jakarta 2 x Rp. 604.000 - Tiket Jakarta - Padang 2 x Rp. 648.000 - Penginapan 3 hari + Makan - Transportasi 3 hari - Airport Tax - VCD Laser Disk (5 Unit) - Dokumentasi TVRI /Wartawan - Makan bersama Tim Khusus Jakarta (16 orang)	1.208.000 1.296.000 690.000 300.000 80.000 600.000 1.200.000 600.000	
	Sub Total	3.246.000		Total	5.974.000	(2.728.000)
14	Rapat Perjajakan Kerjasama dengan Donator Koordinasi di Restoran Mirama Padang tanggal 29 ssp' 2002 M. Tulus	1.040.000	14	Biaya Akomodasi Sebanyak 26 orang (biaya makan dan tempat)	1.040.000	
	Sub Total	1.040.000		Total	1.040.000	

NO	KEGIATAN DAN DANA SUMBANGAN	JUMLAH	NO	BIAYA PENGELUARAN	JUMLAH	KETERANGAN
15	Survey Sarana dan Prasarana Perkantoran sementara tgl. 5 Okt' 2002 (5 orang) M. Tulus Syamsir Pane Sub Total	800.000 150.000 950.000	15	- Makan untuk 5 orang x 4 - BBM untuk 2 buah Mobil Total	500.000 450.000 950.000	
16	Sumbangan dari Bapak DR. Rahmad Ali tanggal 15 Oktober 2002	10.000.000	16			
	Sub Total	10.000.000		Total		
17	Rapat Koordinasi dengan Pembina BP2KS2 tgl. 31 Okt' 2002 di Hotel Bumi Minang M. Tulus Sub Total	1.250.000 1.250.000	17	- Akomodasi (sewa tempat dan makan) utk 24 org Total	1.250.000 1.250.000	10.000.000
18	Persiapan untuk Penyambutan Tim DPOD M. Tulus tgl. 8 Nopember 2002 Sub Total	6.000.000 6.000.000	18	Total	1.250.000	
19	Rapat rutin BP2KS2 dari tanggal 15 Sep s/d 25 Des. 2002 Sub Total	6.000.000	19	- Honor pembantu Sekretariat 1 (satu) orang 1 x 3 x Rp. 500.000 - Komunikasi 3 x Rp. 700.000 - Rapat rutin BP2KS2 6 x Rp. 200.000,- Total	1.500.000 2.100.000 1.200.000 4.800.000	6.000.000
20	Rapat dengan Wali Nagari Solok Selatan Tgl 5 Januari 2003 Sub Total	4.800.000	20	- Konsumsi - Undangan Total	300.000 50.000 350.000	(4.800.000)
21	Pemindahan Pembukuan dari KAS BP2KS2 Jakarta ke KAS BP2KS2 Padang tanggal 20 Januari 2003 Sub Total	10.000.000 10.000.000	21	Total	350.000	(350.000)
22	Sumbangan Yus Kalana 20 Januari 2003 Sub Total	200.000 200.000	22	- Sepanduk Penyambutan Tim DPOD - Sepanduk Peta Kabupaten Solok Total	600.000 360.000 960.000	10.000.000
	Sub Total	200.000		Total	960.000	(760.000)

NO	KEGIATAN DAN DANA SUMBANGAN	JUMLAH	NO	BIAYA PENGELUARAN	JUMLAH	KETERANGAN
23	Biaya Secretariat tanggal 25 Desember s/d 25 Januari 2003		23	Honor Pembantu Secretariat 25 Desember s/d 25 Januari 2003 - Komunikasi, Alat-alat tulis	500.000 800.000	
	Sub Total			Total	1.300.000	(1.300.000)
24	Rapat Pembentukan Panitia Penyambutan Kunjungan Tim DPOD tanggal 21 Januari 2003		24	- Konsumsi oleh Khairunnas - Pengantar Undangan - Wartawan - Memperbanyak buku kronologis Pemb. Kab. 50 buah buku - memperbanyak bahan rapat	240.000 60.000 650.000 100.000	
	Sub Total			Total	1.050.000	(1.050.000)
25	Rapat Penjelasan Kunjungan Tim Observasi DPOD dan Checking terakhir Persiapan Panitia Penyambutan masing-masing Kecamatan tgl. 12-2-2003		25	- Konsumsi Rapat - Foto Copy Daftar Isian DPOD	100.000 80.000	
	Sub Total			Total	180.000	(180.000)
26	Pembahasan dan Penjelasan Proposal Kepada Tim Observasi DPOD tgl. 26-2-2003 di Roky Plaza Hotel			Teh dan Snack	120.000	
	Sub Total			Total	120.000	(120.000)
27	Pemindahan Pembukuan dari Kas BP2KS2 Jakarta ke BP2KS2 Padang 26-2-2003	2.500.000				
	Sub Total	2.500.000		Total	-	2.500.000
28	Kunjungan Tim Observasi DPOD ke Solok Selatan			Wartawan 9 (sembilan) Orang	450.000	
	Sub Total			Total	450.000	(450.000)
	Total 1 sampai 28	83.262.364		Total 1 sampai 28	85.114.314	(1.851.950)

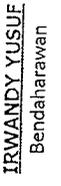
DIPERIKSA / DISETUJUI:


DR. ARMEN MUCHTAR
Ketua Umum

DIPERIKSA / DISETUJUI


M. MUSRIL KUSAI
Sekretaris Umum

Padang, Maret 2003
Dibuat Oleh

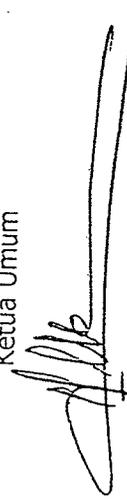

IRWANDY YUSUF
Bendaharawan

DAFTAR KEGIATAN DAN SUMBANGAN YANG DITERIMA BP2KS2
Dari Tanggal 15 Maret 2002 s/d 25 Februari 2004

NO	KEGIATAN DAN DANA SUMBANGAN	JUMLAH	NO	BIAYA PENGELUARAN	JUMLAH	KET
	Total Kegiatan dan Sumbangan tanggal 15 Maret 2002 s/d 30 Maret 2003	83.262.364			85.114.314	-1.851.950
1	Bantuan ke-1 dari Pemda Kab. Solok via Syamsir Pane tgl. ...	25.000.000	1	Dana Taktis BP2KS2 di Jakarta via Syafrizal	15.000.000	
	Sub Total	25.000.000		Sub Total	15.000.000	10.000.000
2	Bantuan ke-2 dari Pemda Kab. Solok via Armen Muchtar tgl. ...	17.500.000	2	Dana Operasional Lo via Syafrizal	2.500.000	
	Sub Total	17.500.000		Sub Total	2.500.000	15.000.000
3			3	Tanggal 20 Nopember 2003 Mengikuti Pembahasan RUU Kab. Solok Selatan di DPR RI Jakarta - Tiket a/n Armen Muchtar - Tiket a/n Syamsir Pane - Akomodasi + Transport 3 hari	900.000 900.000 1.500.000	
				Sub Total	3.300.000	-3.300.000
4			4	Tanggal 22 Nopember 2003 Rapat Pembentukan Panitia Syukuran di Muara Labuh - Foto copy undangan - Biaya menyampaikan undangan ke Solok Selatar - Konsumsi Rapat	60.000 200.000 1.200.000	
				Sub Total	1.460.000	-1.460.000
5			5	Tanggal 7 Desember 2003 Rapat terakhir Panitia Syukuran di Muara Labuh - Foto copy undangan - Biaya Penyampalan undangan - Konsumsi Rapat	60.000 200.000 1.000.000	
				Sub Total	1.260.000	-1.260.000

NO	KEGIATAN DAN DANA SUMBANGAN	JUMLAH	NO	BIAYA PENGELUARAN	JUMLAH	KET
6			6	Tanggal 27 Desember 2003, Rapat Koordinasi di Jakarta dengan Tokoh Masyarakat Solok Selatan - Tiket a/n Musril Kusai - Tiket a/n Syamsir Pane - Akomodasi + Transportasi 3 hari Sub Total	750.000 750.000 1.500.000 3.000.000	-3.000.000
7			7	Tanggal 6 Januari 2004 memenuhi undangan Depdagri dalam rangka peresmian Kab. Solok Selatan - Tiket a/n Musril Kusai - Tiket a/n Syamsir Pane - Tiket a/n Yunizal Bakri - Akomodasi + Transportasi 3 hari Sub Total	750.000 750.000 750.000 1.000.000 3.250.000	-3.250.000
8			8	Tanggal 18 Januari 2004 Forum Komunikasi Pembangunan Kabupaten Solok Selatan - Foto copy undangan - Biaya penyampaian undangan - Konsumsi dan tempat Sub Total	110.000 200.000 1.200.000 1.510.000	-1.510.000
9			9	Tanggal 25 Februari 2004 - Biaya Fotocopy + Penjilidan Proses Pembentukan Kab. Solok Selatan 50 buku Sub Total	1.000.000 1.000.000 1.000.000 117.394.314	-1.000.000 8.368.050
TOTAL		125.762.364				

Ketua Umum



(Prof. Dr. Armen Muchtar)

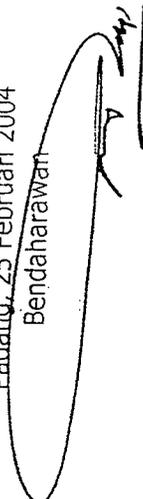
Sekretaris Umum



(Ir. Musril Kusai)

Padang, 25 Februari 2004

Bendaharawan



(Irwandi Yusuf)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 38 TAHUN 2003
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN,
DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DIPROPINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman perlu dimekarkan.
- B. Bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dibentuk Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
- c. Bahwa dengan pembentukan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi daerah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan kabupaten Pasaman Barat.
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1946);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 25);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

8. Undang-undang Nomor 12 Nomor 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);

9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK
SELATAN, DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT DI
PROPINSI SUMATERA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang.
3. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

- a. Kecamatan Sitiung;
- b. Kecamatan Koto Baru; c. Kecamatan Sungai Rumbai; dan
- d. Kecamatan Pulau Punjung.

Pasal 4

Kabupaten Solok Selatan berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Solok yang terdiri atas :

- a. Kecamatan Sangir Batang Hari;
- b. Kecamatan Sangir Jujan;
- c. Kecamatan Sangir;
- d. Kecamatan Sungai Pagu; dan
- e. Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh.

Pasal 5

Kabupaten Pasaman Barat berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pasaman Yang terdiri atas :

- a. Kecamatan Talamau;
- b. Kecamatan Kinali;
- c. Kecamatan Pasaman;
- d. Kecamatan Gunung Tuleh;
- e. Kecamatan Lembah Melintang;
- f. Kecamatan Sei Beremas; dan
- g. Kecamatan Ranah Batahan.

Pasal 6

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung dikurangi dengan wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
- (2) Dengan terbentuknya Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah Kabupaten Solok dikurangi dengan wilayah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- (3) Dengan terbentuknya Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, wilayah Kabupaten Pasaman dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN IBU KOTA

Pasal 2

Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Kabupaten Dharmasraya berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri atas :

Pasal 7

Kabupaten Dharmasraya mempunyai batas wilayah :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Gadang dan Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; dan
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan sangir, Kecamatan Sangir Jujan, Kecamatan Sangir Batang hari Kabupaten solok Selatan, dan Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok.

Pasal 8

Kabupaten Solok Selatan mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pantai Cermin, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok dan Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Punjunh dan Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kecamatan Ranah Pesisir, Kecamatan Lengayang, Kecamatan Sutera, dan Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 9

Kabupaten Pasaman Barat mempunyai batas wilayah ;

- a. sebelah utara berbatas dengan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Duo Koto, Kecamatan Panti, Kecamatan Lubuk Sikaping, dan Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman.
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Palembang dan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan samudera Indonesia

Pasal 10

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 7, pasal 8, dan Pasal 9, digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini.
- (2) Penentuan batas wilayah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat secara pasti di lapangan, sebagaimana dimaksud pada pasal 7, pasal 8, dan pasal 9, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri

Pasal 11

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat masing-masing menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota di sekitarnya.

Pasal 12

- (1) Ibukota Kabupaten Dharmasraya berkedudukan di Pulau Punjung.
- (2) Ibukota Kabupaten Solok Selatan berkedudukan di Padang Aro.
- (3) Ibukota Kabupaten Pasaman Barat berkedudukan di Simpang Empat.

BAB III
KEWENANGAN DAERAH

Pasal 13

Kewenangan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBINAAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus terhadap Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diresmikan untuk mengefektifkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.
- (2) Setelah 3 (tiga) tahun sejak diresmikan, Pemerintahan bersama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) direkomendasikan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 15

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat untuk pertama kali dibentuk melalui hasil Pemilihan Umum tahun 2003
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemerintah Daerah

Pasal 16

Bupati dan wakil Bupati Dharmasraya, Solok Selatan, Pasaman Barat dipilih dan disahkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

Pasal 17

- (1) Dengan terbentuknya Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat, Penjabat Bupati Dharmasraya, Penjabat Bupati Solok Selatan, dan Penjabat Bupati Pasaman Barat diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dari pegawai negeri sipil yang diusulkan Gubernur Sumatera Barat untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun
- (2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai negeri sipil yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan di bidang pemerintahan serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu.
- (3) Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dapat mengangkat kembali Penjabat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun atau diganti dengan Penjabat lain.
- (4) Peresmian Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat serta pelantikan Penjabat Bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden setelah Undang-undang ini diundangkan.
- (5) Menteri Dalam Negeri dapat menunjuk Gubernur Sumatera Barat untuk melantik Penjabat Bupati Dharmasraya, Penjabat Bupati Solok Selatan, dan Penjabat Bupati Pasaman Barat.
- (6) Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur Sumatera Barat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja Penjabat Bupati dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dengan diresmikannya Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat dan dilantikannya Penjabat Bupati Dharmasraya, Penjabat Bupati Solok Selatan, dan Penjabat Bupati Pasaman Barat dibentuk perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah, dan unsur perangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memfasilitasi pembentukan instansi vertikal.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Bupati Sawahlunto/Sijunjung menginvestarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Bupati Solok menginvestarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, dan Bupati pasaman menginvestarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat.
 - b. Barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintahan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang berada dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya, barang milik/kekayaan daerah yang berupa barang bergerak dan barang yang tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok yang berada dalam wilayah Kabupaten Solok Selatan, dan barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman yang berada dalam wilayah Kabupaten Pasaman Barat.
 - c. Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Dharmasraya, Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten

Solok yang kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada di Kabupaten Solok Selatan, dan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pasaman yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Pasaman Barat.

- d. Utang piutang Kabupaten sawahlunto/Sijunjung yang kegunaannya untuk Kabupaten Dharmasraya, utang piutang Kabupaten Solok yang kegunaannya untuk Kabupaten Solok Selatan, dan utang piutang Kabupaten Pasaman yang kegunaannya untuk Kabupaten Pasaman Barat ; serta
- e. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat

- (2) Pelaksanaan Penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Gubernur Sumatera Barat dan diselesaikan dalam waktu 1(satu) tahun terhitung sejak pelantikan Penjabat Bupati Dharmasraya, Penjabat Bupati Solok Selatan, dan penjabat Bupati Pasaman Barat.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) dan ayat 2 (dua), mengalami hambatan difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat memiliki kewenangan atas pemungutan pajak dan restribusi daerah sejak terbentuknya perangkat daerah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman wajib memberikan bantuan dana kepada Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, sekurang-kurangnya sebesar dana yang dialokasikan untuk kegiatan pemerintah di daerah pemekaran selama belum dimekarkan.
- (4) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menunjang kegiatan pemerintah, pembangunan, dan masyarakat sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dhatmasraya. Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat.

- (5) Sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penjabat Bupati Dharmasraya, Penjabat Bupati Solok Selatan, dan Penjabat Bupati Pasaman Barat menyusun Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagai dasar. pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Penjabat Bupati
- (6) Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Gubernur Sumatera Barat.
- (7) Penjabat Bupati Dharmasraya, Penjabat Bupati Solok Selatan, dan Penjabat Bupati Pasaman Barat penatausahaan keuangan daerah dan menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) setiap triwulan kepada Gubernur Sumatera Barat.
- (8) Penjabat Bupati Sharmasraya, Penjaba Bupati Solok Selatan, dan Penjabat Bupati Pasaman Barat menyusun dan menetapkan perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK) dengan keputusan Penjabat Bupati sebagai dasar pertanggung jawaban keuangan daerah kepada Gubernur Sumatera Barat

Pasal 21

- (1) Sebelum Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat dapat menetapkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung, Bupati Solok, Bupati Pasaman tetap berlaku dan dilaksanakan di Kabupaten Dharmasraya,
- (2) Semua Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Sawahlunto/Sijunjung, Bupati Solok, dan Bupati Pasaman yang berlaku di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Dharmasraya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sawahlunto, /Sijunjung, penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Solok, dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebelum terbentuknya Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Pasaman Barat dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
- (2) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan

Kabupaten Pasaman Barat, dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 dan paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat.

b) Pengajuan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya pada Pemilihan Umum tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, pengusulan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Solok, dan pengusulan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2004 dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Pasaman.

AB VII
TENTUAN PENUTUP

asal 23

pada saat berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

asal 24

ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Undang-undang ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

asal 25

undang - undang ini mulai berlaku pada tanggal undangnya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

di Jakarta
 pada tanggal

RESIDEN REPUBLIK INDONESIA

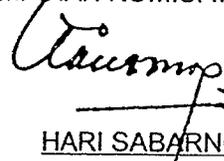
EGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
 pada tanggal
 SEKRETARIS NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

MENTERI DALAM NEGERI
 PIMPINAN KOMISI II DPR-RI



HARI SABARNO

NOMOR

PIMPINAN KOMISI II DPR-RI,



A. TERAS NARANG, SH
KETUA

FERRY MURSYIDAN BALDAN
WAKIL KETUA



A. RACHMAN GAFFAR, SH
WAKIL KETUA



HAMDAN ZOELVA, SH
WAKIL KETUA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2003
TENTANG**

**PEMBENTUKAN KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SOLOK SELATAN,
DAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
DIPROPINSI SUMATERA BARAT**

1. UMUM

Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas wilayah + 42.297 km² dengan penduduk pada tahun 2002 berjumlah 4.367.964 jiwa telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang mempunyai luas wilayah + 6.091,53 km² dengan penduduk pada tahun 2001 berjumlah 313.809 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Kabupaten Solok yang mempunyai luas wilayah + 7.084,2 km² dengan penduduk pada tahun 2001 berjumlah 506.944 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Kabupaten Pasaman yang mempunyai luas wilayah + 7.835,40 km² dengan penduduk pada tahun 2001 berjumlah 506.944 jiwa memiliki potensi daerah dan kemampuan ekonomi untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.

Dengan Luas wilayah seperti tersebut di atas dan tingginya laju pertumbuhan penduduk, maka sampai saat ini pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru. hal itu sejalan dengan kebijakan nasional dalam rangka percepatan pembangunan, khususnya di Provinsi Sumatera Barat, dengan membentuk Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman barat.

Kabupaten Dharmasraya terdiri 4 (empat) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru, Kecamatan Sungai Rumbai, dan Kecamatan Pulau Punjung memiliki luas wilayah keseluruhan + 2.961,13 km².

Kabupaten Solok Selatan terdiri atas 5 (lima) Kecamatan, yaitu kecamatan Sangir Batang hari, Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sungai Pagu dan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh memiliki luas wilayah keseluruhan + 3.346,2 km².

Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu Kecamatan Talamau, Kecamatan Kinali, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Sei Beremas, dan Kecamatan Ranah Batahan memiliki luas wilayah keseluruhan + 3.887,77 km².

Berdasarkan hal tersebut di atas dan memperhatikan aspirasi masyarakat yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15/SB/2002 tanggal 14 September 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemekaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi dua Kabupaten dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Nomor 21/kpts/dprd-2002 tanggal 5 September 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjadi Dua Kabupaten dipandang perlu membentuk Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Dharmasraya, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 12/SB/2002 tanggal 22 Agustus 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemekaran Daerah Kabupaten Solok menjadi Dua

Kabupaten dan Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah solok Nomor 08 tahun 2002 tanggal 29 Juli 2002 tentang Persetujuan Pemekaran Daerah Kabupaten Solok menjadi dua Kabupaten; dan keputusan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14/SB/2002 tanggal 5 september 2002 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pemekaran Daerah Kabupaten Pasaman menjadi dua Kabupaten dan Keputusan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 09/KPTS/ DPRD/PAS/2002 tanggal 9 Agustus 2002 tentang Persetujuan Dewan Pemekaran daerah Kabupaten Pasaman sebagai Daerah Otonom.

Dengan terbentuknya Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat sebagai Daerah Otonom, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, pemerintah Kabupaten Solok, dan Pemerintah kabupaten Pasaman berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuk kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan perangkat daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta penyelesaian pengalihan aset daerah yang dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok selatan, dan Kabupaten Pasaman barat.

Hubungan dan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Pemerintah Kabupaten Pasaman dan Pemerintah Kabupaten pasaman Barat antara lain tergambar dalam mekanisme pengusulan Penjabat Bupati Dharmasraya, Penjabat Bupati solok selatan, dan Penjabat Bupati Pasaman Barat. Meskipun Gubernur Sumatera Barat memiliki Kewenangan mengusulkan Penjabat Bupati Dharmasraya dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Sawahlunto/Sijunjung, Penjabat Bupati Solok Selatan, dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Solok, dan Penjabat Pasaman Barat dalam proses pengusulannya dapat meminta pertimbangan dari Bupati Bupati Pasaman.

Dalam melaksanakan otonomi daerahnya, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan kabupaten Pasaman Barat perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekoomi, penyiapan saran dan sarana pemerintah, pemberdayaan dan peningkatan sumber daya manusia, serta optimalisasi pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelās.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Peta sebagaimana dimaksud pada ayat ini adalah peta wilayah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat dalam bentuk lampiran Undang-undang.

Ayat (2)
Penentuan batas wilayah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat secara pasti di lapangan, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang dilampiri peta batas daerah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan hasil pengukuran dilapangan yang dilengkapi dengan titik Koordinat dan tanda batas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat sesuai dengan potensi,

PENJELASAN UU

khususnya guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada masa yang akan datang, diperlukan adanya kesatuan perencanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, Tata Ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten pasaman Barat harus benar-benar serasi dan terpadu penyusunannya dalam satu kesatuan sistem dengan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional, Rencana Tata ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota di sekitarnya.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud Pulau Punjunh sebagai ibu kota Kabupaten Dharmasraya berada di kecamatan Pulau Punjung.

Ayat (2)

Yang dimaksud Padang Aro sebagai ibu kota Kabupaten Solok selatan berada di kecamatan Sangir.

Ayat (3)

Yang dimaksud Simpang Empat sebagai ibukota Kabupaten Pasaman Barat berada di Kecamatan Pasaman.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan pembinaan dan memfasilitasi secara khusus adalah diberikan bantuan berupa pembangunan prasarana dasar pemerintahan, sumber daya manusia, bimbingan pelatihan, supervisi, petunjuk lain diperlukan sehingga daerah itu dapat melaksanakan fungsinya sebagai daerah otonom.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Peresmian Kabupaten dan pelantikan pejabat Bupati dapat dilakukan secara bersamaan dan tempat pelaksanaannya dapat di ibukota negara, atau ibukota propinsi, atau ibukota Kabupaten.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Penyerahan pegawai, barang/milik kekayaan daerah, Badan Usaha Milik Daerah, utang piutang, dokumen dan arsip adalah dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam hal badan usaha milik daerah yang pelayan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama.

mencakup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama.

Pengisian kebutuhan pegawai dapat berasal dari kabupaten induk, Provinsi, dan Pusat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Besar bantuan dana didasarkan pada kesepakatan antara kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok dengan Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman dengan Kabupaten Pasaman Barat.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah berupa:

- perhitungan Rencana Pembiayaan Kegiatan Kabupaten (RPKK)/ Laporan Akhir Tahun Anggaran;
- pertanggungjawaban Pejabat Bupati pada akhir masa jabatan.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

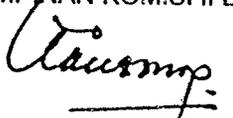
Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

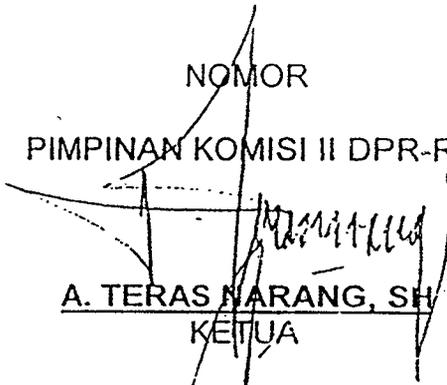
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR

MENTERI DALAM NEGERI
PIMPINAN KOMISI II DPR-RI

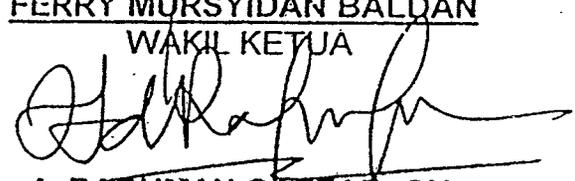

HARI SABARNO

NOMOR

PIMPINAN KOMISI II DPR-RI,


A. TERAS NARANG, SH
KETUA

FERRY MURSYIDAN BALDAN
WAKIL KETUA


A. RACHMAN GAFFAR, SH
WAKIL KETUA


HAMDAN ZOELVA, SH
WAKIL KETUA

**KLIPING MEDIA CETAK TENTANG
PEMEKARAN KABUPATEN SOLOK**

SUMATERA BARAT

Solok Selatan Ingin

''Merdeka''

Masrial Dt Indo
Mangkuto: Aspirasi
Ini Jangan Dipolitisir

Solok, PE

Wacana pembentukan Kabupaten Solok Selatan mulai bergerak lagi. Setelah sebelum ini sempat vakum dan terhenti, karena tak ada titik temu antara Pemda, DPRD Kabupaten Solok dan panitia pembentukan, Senin lalu (29/4), sejumlah tokoh Solok Selatan kembali menemui Bupati Solok Gamawan Fauzi SH.

Mereka terdiri atas Ketua Pembentukan DR Armen Mukhtar dan Sekretarisnya Ir Masril Kusai. Juga tampak anggota DPRD Kabupaten Solok dari Solok Selatan. Pertemuan antara Bupati Solok dan para tokoh itu, terjadi sekitar pukul 18.00 Wib senja, di ruang Komisi "D" DPRD Kabupaten Solok. Namun tak diperoleh keterangan substansi apa yang dibicarakan terkait Kabupaten Solok Selatan.

Di luar ruangan, anggota DPRD Kabupaten Solok asal Solok Selatan, Masrial Dt. Indo Mangkuto dan Khairunnas, menyatakan aspirasi tersebut sudah tak bisa dibendung lagi. Apapun yang terjadi, tandasnya, Kabupaten Solok Selatan harus terbentuk. Namun, ketika dikaitkan dengan ketua panitia sebelum ini, Syafri Durrahman BA, ia enggan berkomentar.

"Pembentukan kabupaten ini biasa-biasa saja, kok. Jambi bisa memekarkan kabupatennya begitu pun, Pariaman, ada Kota Otonomnya. Kita berfikir logis saja, daerah Kabupaten Solok begitu luas,"

hematnya saat itu. Sebelum pembicaraan, *Padang Ekspres* mendapat masukan bahwa upaya untuk mewujudkan Kabupaten Solok Selatan melibatkan pula petinggi masyarakatnya di pusat. Bahkan, disebut-sebut Mendagri Hari Sabarno telah memberikan sinyal.

Ketika diminta cakupan wilayah Solok Selatan, Masrial Dt. Indomangkuto agak hati-hati memberikan jawaban. Diperkirakannya, Lembah Gumanti yang nota bena kampungnya Bupati Solok Gamawan Fauzi SH akan menolak. Begitupun dengan Surian Kecamatan Pantai Cermin, masih diragukan. Sementara tentang sambutan Kecamatan Sangir sekitarnya, tak disinggung. Namun salah seorang tokohnya, Khairunnas, tampaknya telah menerima proposal pembentukan kabupaten itu.

► Tokoh masyarakat Solok Selatan yang juga anggota DPRD Kabupaten Solok dari FPG Masrial Dt. Indo Mangkuto, mengingatkan aspirasi pembentukan Kabupaten Solok Selatan jangan sampai dipolitisir. Aspirasi ini, akunya, tiada sedikitpun untuk menjatuhkan kredibilitas dan pamor Bupati Solok Gamawan Fauzi SH.

► Dikilas balik isu pembentukan kabupaten Solok Selatan sebelum ini, sempat dikait-kaitkan dengan Partai Golkar Kabupaten Solok, partai terbesar di Kabupaten Solok ini, disebut-sebut berada di balik lontaran aspirasi tersebut. Ternyata, isu diperlurus oleh anggota DPR RI asal Kabupaten Solok saat itu, Drs H Azwir Dainy Tara, yang juga dilansir sejumlah media massa, bahwa Golkar mendukung sepenuhnya wacana dan gagasan pembentukan Kabupaten Solok Selatan. (ero)

Wacana Kabupaten Solok Selatan,

Suara Pro-Kontra DPRD

Wacana pembentukan Kabupaten Solok Selatan, tak terlewatkan menyulut pro-kontra sesama anggota DPRD Kabupaten Solok. Bahkan, sempat terjadi perdebatan dengan luapan emosi antara mereka dari fraksi berbeda.

Terutama, berpihak pada pernyataan tokoh masyarakat Solok Selatan yang juga anggota FPG DPRD Kabupaten Solok Masrial Dt. Indo Mangkuto, sebagaimana dimuat harian ini, yang meragukan sikap Surian Pantai Cermin. Ketua Fraksi PPP Syofyan Sirin, keberatan dengan kata-kata 'meragukan' tersebut. Tokoh masyarakat Surian ini dihadapkan rekannya anggota FPAN, Irwandi yang juga tokoh Muara Labuah, meminta agar pernyataan diklarifikasi.

"Kenapa, kita dibilang masih diragukan, tolong tulis besar-besar,

kita menolak wacana dan rencana itu; sudah ada pernyataan sikap resmi dari KAN, BPN dan lainnya dalam, Nagari Surian," tukas Syofyan kebakaran jenggot.

Mendapat masukan demikian, Irwandi, mengingatkan bahwa sejak awal panitia pembentukan memang tidak memasukkan Surian. Sebab, nagari ini dinilai memang lebih dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Solok di Kayu Aro. Baginya, tanpa Surian adalah tak soal, Sungai Pagu dan Sangir saja, ulasnya, sudah begitu luas. Bahkan, luas Kecamatan

Sangir sama dengan Tanah Datar.

Ketua FPPP Syofyan Sirin kerap dipanggil "ayah" justru tidak bisa menerima bila disebut-sebut pula alasannya jarak. Menurutnya, urusan dari Solok Selatan ke Kayu Aro tidak acapkali. Dalam sebulannya, bisa dihitung frekuensinya.

Hal ini, hematnya, karena banyak urusan masyarakat yang bisa dituntaskan ke wali nagari dan kantor kecamatan. Apalagi, bila peluangnya memungkinkan bisa saja dioperasikan sistem internet.

"Selebihnya, itu kan urusan camat dan wali nagari ke Kayu Aro. Jadi, tak perlu masyarakat betul yang ke Kayu Aro, sinyalamen kita, isu demikian dari segelintir elit saja," jelasnya. Tampaknya, disebut-sebutnya segelintir elit tak bisa

PADANG EKSPRES - 4 Mei 2002

diterima anggota FPAN, Irwandi. Tak pelak, muka keduanya saling memucat menahan emosi.

Wakil Ketua FPG Drs Desra Ediwan menyatakan secara prinsip dengan wacana. Namun, diingatkannya, agar rencana ke arah itu dipertimbangkan dan dipersiapkan matang. Jangan sampai pengalaman tahun 1968, saat mana Mendagri telah setuju, ternyata mendudukkan ibu kabupaten saja tak tuntas, bahkan, menyulut konflik horizontal antar-kecamatan.

Disamping itu, Desra Ediwan secara rasional sulit menerima bila pijakan operasional pemerintahan Kabupaten Solok Selatan nantinya hanya bertumpu pada DAU. Sebab, jumlah DAU tak

stabil setiap tahunnya. Bahkan, bukan tak mungkin cenderung menurun. Terkait dengan ini, ia keberatan bila wacana didasarkan pada Mentawai, yang jelas-jelas kondisinya beda. "Tapi, yakinlah kita pasti turun ke lapangan nantinya, harus dapat masukan pasti, apakah aspirasi memang berasal dari semua lapisan masyarakat," ujarnya.

Menanggapi hal itu, tokoh masyarakat Solok Selatan yang juga anggota FPG DPRD Kabupaten Solok Masrial Dt. Indo Mangkuto, menyatakan tidak terpengaruh atas komentar yang melemahkan tersebut. Ditambahkannya, berbagai persiapan telah dilakukan saat ini dilapangan. Dengan modal ini diyakininya, tak akan bisa DPRD Kabupaten Solok menghalangi. (ero)

Pemprov Belum Bahas Pemekaran 3 Kabupaten

PADANG—Wacana pemekaran wilayah dengan membentuk kabupaten baru di Sumbar terus bergulir. Diantaranya pemekaran Kabupaten Pasaman dengan membentuk Kabupaten Pasaman Barat, pemekaran Kabupaten Solok dan Sawahlunto Sijunjung. Namun secara resmi keinginan pemekaran tersebut belum direspon Pemprov Sumbar.

Asisten I Pemprov Sumbar Drs Rusdi Lubis didampingi Kepala Biro Pemerintahan Drs Chairul Darwis kepada *Padang Ekspres* di ruang kerjanya, Senin (13/5), mengakui, secara resmi Pemprov belum membahas pemekaran wilayah tersebut. Karena memang pembentukan daerah otonom baru sesuai himbauan Depdagri harus betul-betul selektif.

Ia menjelaskan, riak-riak pembentukan kabupaten baru kembali marak di Sumbar. Namun keinginan tersebut baru sebatas wacana, sehingga Pemprov sendiri belum membentuk tim khusus.

Menurutnya, berdasarkan PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 129 tahun 2000 pengusulan pembentukan kabupaten baru, bisa dilakukan bila sudah ada Keputusan dari DPRD setempat dan rekomendasi dari bupati induk. "Di Sumbar belum ada DPRD yang meminta daerahnya dimekarkan, termasuk Pasaman," jelas Rusdi.

Meski demikian, lanjut Rusdi, masyarakat Pasaman pernah menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur untuk membentuk Kabupaten Pasaman Barat, dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Disamping itu juga pernah datang aspirasi dari masyarakat Pasaman tentang penolakan pemekaran Kabupaten Pasaman.

"Untuk menindak lanjuti aspirasi tersebut, Bapak Gubernur sudah mengirim surat ke Bupati Pasaman untuk membahas aspirasi tersebut. Dan khabarnya Pemkab Pasaman sudah membentuk tim untuk melakukan penelitian dan pengkajian," tambah Chairul Darwis.

Rusdi Lubis juga menjelaskan, berdasarkan hasil pertemuan asosiasi pemerintahan provinsi beberapa waktu lalu, para Gubernur se Indonesia sudah sepakat untuk lebih selektif dan tidak mudah melakukan pemekaran wilayah. Karena sejak digulirkannya otonomi daerah, sudah terbentuk puluhan daerah otonom (kabupaten/kota) baru. Dan diperkirakan masih banyak lagi calon daerah otonom baru.

Proses pembentukan kabupaten baru menurut Rusdi, butuh waktu dan mekanisme yang panjang. Dimulai dari penyampaian aspirasi dari masyarakat, kemudian pembahasan oleh kabupaten induk, serta harus ada keputusan DPRD setempat. Tidak itu saja, proposal pembentukan tersebut harus dibahas dulu oleh tim asistensi dari Pemprov sebelum diajukan ke Gubernur ke pusat.

Di pusat akan dibahas oleh tim khusus dan harus mendapat rekomendasi DPOD (dewan pertimbangan otonomi daerah). Baru diajukan ke DPR RI. (alt)

Solok Bakal Dimekarkan?

Solok, Singgalang

Bupati Solok Gamawan Fauzi, S.H., menyatakan bahwa pihaknya tidak ada niat untuk menghalang-halangi pembentukan Kabupaten Solok Selatan.

Kalau memang ada aspirasi masyarakat, bualah proposal yang jelas siapa panitia dan pernyataan dari masing-masing nagari yang akan menjadi wilayah kabupaten baru tersebut. "Terus terang saya tidak dapat menanggapi aspirasi itu karena disampaikan tidak resmi menurut prosedur yang diatur oleh PP Nomor 129 tahun 2000," kata Gamawan menanggapi perkembangan adanya keinginan masyarakat Solok Selatan untuk membentuk kabupaten baru.

Menurut Gamawan, secara resmi baru satu utusan masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepadanya. Ada tiga tokoh masyarakat yang membicarakan itu kepadanya, yakni Joni Roza, DR. Armen dan Musli Kusai. "Baru satu utusan dan yang pertama kali pula menyampaikan maksud pemekaran Kabupaten Solok Selatan. Sedangkan selama ini hanya bergema di media massa dan tidak pula menurut prosedur yang berlaku," ujarnya sambil menambahkan kini ada dua kelompok pembentukan kabupaten baru itu, yakni P3DSS dan Forum Pembentukan Kabupaten Solok Selatan.

Proses pemekaran kabupaten harus diikuti dengan pernyataan dari masing-masing nagari yang akan menjadi kabupaten baru, kemudian dimusyawarahkan dan dibuatkan proposalnya yang dilengkapi batas-batas wilayah dan calon ibukotanya.

Proposal dan kelengkapan itu diajukan secara resmi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang kemudian dewan akan membahasnya. Dalam pembahasan, DPRD akan mengundang bupati untuk meminta penjelasan dan tanggapan.

Kemudian baru dibentuk tim pengkajian pembentukan kabupaten baru tersebut. Tim akan bekerja dan mengumpulkan bahan-bahan yang mendukung terbentuknya sebuah kabupaten baru. Hasil pengkajian tim akan dimusyawarahkan dewan.

Jika dewan setuju, proposal itu akan diajukan ke Gubernur Sumatra Barat. Gubernur bersama DPRD akan membahas usulan tersebut yang juga akan dibentuk tim tingkat provinsi. Seterusnya, hasil pengkajian dan musyawarah dewan akan dilanjutkan ke Depdagri.

Depdagri juga akan membentuk tim pengkajian dan turun ke lapangan. Jika memenuhi persyaratan, maka akan diajukan rancangan undang-undang ke DPR. Selanjutnya DPR Pusat akan mengadakan penelitian dan hasilnya akan diputuskan dalam sidang. Setelah Keputusan DPR disetujui Presiden, baru menjadi kabupaten resmi. "Jadi prosesnya panjang dan juga harus memenuhi persyaratan yang dicantumkan dalam PP 129 tahun 2000 tersebut," kata Gamawan kepada pers belum lama ini. •209

“Wakil-wakil Rakyat” Menanggapi Positif !

- * Aspirasi Masyarakat dari Wilayah Solok Selatan
- * Hari Senin Ini Rakyat Menunggu Keputusan DPRD

Solok, Juli (Haluan).

KABUPATEN Solok Selatan semakin dekat perwujudannya dan menunggu pengetokan palu setelah melalui sidang DPRD Kab. Solok pemaparan proposal dari pihak Panitia BP2KS2 mendapat tanggapan positif dari 19 orang anggota Dewan yang menyampaikan tanggapannya.

Sidang paripurna DPRD Kab. Solok ini dipimpin oleh wakil Ketua Sahono didampingi pihak eksekutif Sekda Kab. So

lok Drs. H. Syafril Khatib dan Panitia Pemekaran Kab. Solok Selatan (BPKS2) langsung alot di ruang sidang DPRD Kab. Solok di Koto Baru Jumat (26/7). Sementara diluar gedung tidak kurang dari 300 orang anggota Masyarakat Solok Selatan sengaja datang mempergunakan 6 buah bus dan puluhan kendaraan pribadi secara tertib mendengarkan jalannya sidang. beberapa lembar spanduk tergantung di depan kantor Wakil

rakyat ini diantaranya bertuliskan “Masyarakat Solok Selatan Bertekad menjadi Kabupaten” Masyarakat yang datang ini dari 5 kecamatan masing-masing Sangir Jujuan, Sangir Batang Hari, Sangir, Sei, Pagu, dan Koto Parik Gadang Diateh, termasuk juga para perantau di beberapa kota dalam Sumbar termasuk para mahasiswa ikut bergabung dengan tertib di luar gedung ini.

Sidang paripurna DPRD Kab. Solok kali ini betul-betul menampakkan para wakil rakyat betul-betul telah menyikapi aspirasi masyarakat Solok Selatan yang sudah cukup lama berkeinginan menjadi sebuah Kabupaten dimulai sejak tahun 1956.

Beberapa anggota dewan yang menyampaikan tanggapannya setelah mendengar pemaparan proposal tentang pemekaran Solok Selatan menjadi sebuah kabupaten itu disampaikan Sekretaris BPKS2 Ir. Musril Kusai antara lain disampaikan Drs. Erizal Kasuma dari Fraksi PDI Perjuangan tegas-tegas sangat mendukung berdirinya Kabupaten Solok Selatan, apalagi perjuangan yang sudah cukup panjang dan lama dari para tokoh masyarakat Solok Selatan sudah sepantasnya disikapi secara positif sesuai dengan UU No.22 tahun 1999 bagi pemekaran suatu daerah.

Juga menyampaikan tanggapan dari Listo, BA dari FPG, Drs. Desra Ediwan (FPG), Nu syirwan (FPPP), Irwandi (FPAN), Nuzuar Said (FPAN), Abu Hanifah (FPBB), Ahmad Jati (FPPP), Nazar Dt. Rajo In tan (FPG), M.Sati Nurdin (FPK), Suhartoni SH dan Edji Salim Dt. Basa kesemuanya me ngarah kepada tujuan yang sa ma sangat menyikapi aspirasi rakyat Solok Selatan kemudian mendukung berdirinya Kabupaten Solok Selatan.

Setiap tanggapan para anggota Dewan ini selalu mendapat tepuk tangan gemuruh diberikan para tokoh masyarakat Solok Selatan yang mengikuti jalannya sidang paripurna ini.

Maka dari kesepakatan bersama baik dari pihak Eksekutif maupun pihak legislatif termasuk Panitia BP2S2 sidang paripurna DPRD Kab. Solok ditetapkan untuk dilanjutkan hari Senin (29/7) dan merupakan sidang terakhir pengetokan palu atas persetujuan berdirinya kab. Solok Selatan. (Yal).

Mimpi Masyarakat akan Menjadi Kenyataan

Masalah pemekaran Kabupaten Solok Selatan akan dibahas kesidang paripurna dewan pagi ini, Senin (29/7). Namun sebelumnya Bupati Solok, Gamawan, mengatakan tidak pernah menghambat aspirasi masyarakat

Solok, Singgalang
... panjang masyarakat
... bagian selatan untuk
... membentuk kabupaten definitif
... menjadi kenyataan, na-
... sul disetujuinya aspirasi
... but oleh DPRD Kabupaten
... . Kendati secara resmi,
... setujuan pembentukan itu
... akan tercapai pada sidang
... apurna DPRD setempat
... dijadwalkan, Senin (29/7)
... ini.

Sementara pengurus BP2
... melakukan dialog dengan
... legislatif yang diikuti
... ratusan warga Solok
... an yang memadam Gedung
... D Kab. Solok di Koto
... Jum'at (26/7).

Mereka membicarakan pem-
... ukan Kab. Solok Selatan,
... i juru bicara BP2KS2, Ir.
... Kusai yang memben-
... tan alasan pembentukan
... an baru di wilayah Solok
... an.

Dialog yang dipimpin oleh
... Ketua DPRD, Saliwo dan
... ini oleh Sekdakab Drs. H.
... il Chatib.

Menanggapi hal itu, sejumlah
... ala dewan merespon as-
... itu dengan positif. Tercatat
... ar 19 orang wakil rakyat
... yampaikan pandangannya
... ap aspirasi yang semakin
... bergerak dari selatan.

Seperti diungkapkan oleh
... Kusuma, usulan pem-
... ukan kabupaten baru ini
... ah tuntutan yang logis.
... eksekutif dan legislatif
... an mengulur-ngulur waktu
... untuk menyetujuinya.
... antara Arnusyirwan, ang-
... dewan dari PPP menyoc-

butkan, secara historis aspirasi
itu muncul sejak tahun 1954.
Bahkan dalam wacananya, pen-
dirian kabupaten definitif se-
mula dinamakan Kabupaten
Sahiliran Batang Hari. Lantas,
sekarang ada gerakan dari bawah
yang lebih kuat, hal ini tentu
sebuah harapan yang perlu
disikapi segera. Pandangan
serupa disampaikan oleh Drs.
Desra Edliwan dari Partai Golkar,
hendaknya secepatnya mengel-
uarkan persetujuan aspirasi
tersebut. Kendati secara prinsip
aspirasi warga telah disikapi,
namun namun baru sebatas
dialog.

Yoesri Djalius dari FPP
menanggapi keputusan tersebut
harus ada persetujuan dan
keputusan bersama dari DPRD.
Dan keputusan itu harus sidang
paripurna.

Tapi sebagian besar masya-
rakat yang datang ke DPRD
relatif masih kurang puas ter-
hadap kesimpulan demikian,
sehingga mereka mendesak agar
keputusan diambil saat itu juga.
Namun saat itu dapat kata
sepakat dari pimpinan DPRD,
sehingga sidang paripurna
persetujuan pemekaran dijad-
walkan pagi ini.

Ia menambahkan, pihaknya
sudah berhasil menyusun do-
kumen setebal seratus halaman
memuat argumen tentang pem-
ekaran Kab. Solok Selatan.
Baik secara akademis dan politis,
aspirasi ini juga sudah padu.
Bahkan tim khusus BP2KS2
telah melakukan penelitian di 19
kecamatan untuk mengkaji kele-
bihan dan kekurangannya.
Menurut dia, setelah proses

di Kabupaten Solok selesai,
maka tim akan meneruskan
pendekatan ke DPRD Sumbar
serta gubernur. "Kita harapkan
dalam tahun 2002 ini kabupaten
yang baru ini sudah disetujui
oleh DPR-RI," katanya.

Menjawab wartawan soal
nama kabupaten dan rencana
lokasi ibukotanya, Musri Kusai
memastikan bahwa BP2KS2
telah sepakat (dengan lima
kecamatan yang bakal bergabung
dengan kabupaten baru itu).
Sementara memakai nama Kab.
Solok Selatan. Sedangkan lokasi
pusat pemerintahan kabupaten
terkonsentrasi di Padang Aro,
Kecamatan Sangir.

Ia mengaku soal nama akan
dibicarakan lebih lanjut, karena
sangat sensitif jika dibicarakan
saat ini. Alasannya, menyangkut
nama yang dikhawatirkan justru
akan melunturkan rencana yang
telah bulat ini.

Pendapat Armen cukup
beralasan, karena secara historis
dua kecamatan besar di wilayah
Selatan (Sangir dan Sungai Pagu)
mempunyai sejarah adat yang
kuat. Sungai Pagu dengan wila-
yah adat Alam Surambi Sungai
Pagu dan Sangir yang dikenal
dengan Rantau 12 Koto, yang
keduanya sama-sama berpo-
tensi diabadikan namanya men-
jadi identitas kabupaten baru di
Solok Selatan. Sementara tiga
kecamatan lainnya, yakni Sangir
Jujuhan, Sangir Batanghari dan
Koto Parik Gadang Di Ateh,
diprediksi akan memunculkan
nama pula untuk kabupaten
yang mereka inginkan itu.

Dalam sejarahnya, aspirasi
pemekaran untuk Solok bagian
selatan ini pernah menemui
kegagalan lantaran tidak sepa-
katnya para pengagas tentang
ibukota, termasuk soal nama
kabupaten itu sendiri. "Sekarang
kita harapkan kegagalan itu tidak
terulang lagi hanya lantaran
nama Kabupaten. Kita sejak

awal sudah membuat kesepa-
katan tentang itu. Tetapi me-
nyangkut letak ibukota, kelima
kecamatan sudah sepakat mene-
tapkan Padang Aro di Keca-
matan Sangir sebagai pusat
kabupaten," ungkap Armen
Mukhtar.

Bupati Solok Gamawan
Fauzi, SH, yang dihubungi
secara terpisah mengungkapkan
kegembiraannya terhadap aspi-
rasi masyarakat Solok Selatan.
Secara jujur, pihaknya tidak
pernah menghambat aspirasi

masyarakat Solok bagian selatan
untuk berdiri sendiri. Ia bahkan
memfasilitaskan dengan mem-
berikan data-data kepada BP2
KS2 guna menyusun dokumen
usulan itu.

Terbukti, selama masa kepe-
mimpinannya sudah dua kali
mengapung ide pemekaran itu.
Pertama muncul tahun 2000 dan
sekarang bergulir lagi. "Saya
bahkan mengadakan seminar
persiapan pembentukan kabupa-
ten baru itu pada bulan Jar
2000," aku Gamawan. ● 403.

Prinsip, Pemekaran Solok tak Ditolak Eksekutif

Solok, Singgalang

Rencana pemekaran Kabupaten Solok Selatan secara prinsip tidak ditolak. Malah sebagai bukti komitmen pemerintah setempat dengan melalui bagian tata pemerintahan telah menyalurkannya ke DPRD untuk dibahas.

Demikian dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Dr. H. Elfi Sahlan Ben, Apt. kepada Singgalang Selasa (16/7). Penegasan itu disampaikan Wabup, berkaitan dengan adanya aliansi dalam proses pembentukan Kabupaten Solok Selatan ditandatangani.

Wabup yang didampingi Kabag Tata Pemerintahan Drs. Bustamar membantah bahwa pihaknya tidak pernah menyalurkan aspirasi masyarakat Solok Selatan dan surat yang

diberikan itu diterima langsung oleh Kabag TU Sekretaris DPRD Kab. Solok, Drs. Rusdi Ruis.

Dijelaskannya, masalah pemekaran ini pada dasarnya pihak eksekutif di daerah itu tidak menghalangi, bahkan meresponnya dengan menandatangani surat tersebut dan mengirimkannya ke DPRD setempat. Selanjutnya DPRD akan membahas kelayakan aspirasi itu. Jika rencana pemekaran Solok Selatan sesuai menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 tentang kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah baru hasilnya diteruskan ke pemerintah dan DPRD provinsi Sumbar, untuk dibahas sebelum diusulkan ke presiden. ■ 403

DPRD Bahas Pemekaran Kabupaten Solok

KOTA BARU, KOMPAS — Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Solok, Jumat (26/7), di Kota Baru, membahas pemekaran Kabupaten Solok. Sebagai daerah nomor dua terluas di Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok yang kini berhasil menggaet sejumlah investor dengan potensi sumber daya alamnya yang melimpah, dinilai wajar bila dimekarkan menjadi dua kabupaten.

Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok Saltono meminta tanggapan para anggota atas hasil penelitian Badan Penggerak Pembentukan Kabupaten Solok Selatan

(BP2KS2). Ada 19 orang anggota DPRD yang memberikan tanggapan positif, dan pada prinsipnya mereka setuju pemekaran Kabupaten Solok bagian selatan menjadi kabupaten sendiri, yang untuk sementara diberi nama Kabupaten Solok Selatan.

"Pemekaran Kabupaten Solok bagian selatan sudah logis dan wajar dalam rangka meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 membolehkan, apalagi secara ekonomi, potensi daerah, sosial budaya dan sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah sangat mendukung," kata Annursyirwan. DPRD Kabupaten Solok jauh-jauh hari sudah

membentuk Panitia Musyawarah DPRD yang diketuai Mukhlis Listo.

DPRD Kabupaten Solok, Senin lusa, mengagendakan untuk menggelar sidang paripurna guna mengambil keputusan atas usulan BP2KS2, persetujuan dibentuknya Kabupaten Solok Selatan.

Ketua BP2KS2 Dr Armen Muchtar di tempat terpisah mengatakan, aspirasi pemekaran Kabupaten Solok sudah berkembang sejak tahun 1950 dengan digelarnya Konferensi Tambulun di Kecamatan Sangir. Kemudian, tahun 1968 digelar lagi konferensi oleh tokoh-tokoh masyarakat Solok bagian selatan di Muarolabuah. (NAL)

BUPATI DAN DPRD SEPAKAT

Kabupaten Solok Dipecah Dua

SOLOK (Mimbar) — Generasi ketiga panitia pembentukan kabupaten baru bernama Badan Persiapan Pembentukan Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2) diterima oleh DPRD Kabupaten Solok untuk menyampaikan aspirasinya Jumat (26/7/2002) kemarin.

Selama 2,5 jam lebih BP2KS2 didampingi sekitar 100 orang melakukan dialog dengan anggota dewan terkait dengan hal-hal yang mendasari pembentukan kabupaten baru itu.

Sekretaris BP2KS2 Jr. Mursil Kusai membentangkan alasan-alasan dibentuknya kabupaten baru yang untuk sementara mereka namakan Kabupaten Solok Selatan.

Sementara sejumlah anggota dewan merespon aspirasi itu dengan positif. Tercatat 19 pertanyaan muncul dalam dialog yang dipimpin wakil ketua DPRD Saltono. Misalnya seperti dikatakan Annusyirwan, Sm.Hk. Anggota dewan dari PPP ini menyebutkan bahwa secara historis aspirasi itu telah muncul sejak tahun 1954. "Bahkan dalam wacana pendiriannya dinamakan Kabupaten Sahliran Batang Hari. Sekarang ada gerakan dari bawah yang lebih kuat, tentu amat kita respon. Sebab tampaknya aspirasi ini sudah berkembang dari bawah," katanya.

Hal ini diperkuat oleh Drs. Desra Ediwan dari Partai Golkar. Ia berharap dewan secepatnya mengeluarkan persetujuan aspirasi tersebut dan diharapkan bulan November 2002 usul itu sudah di bahas di DPR-RI.

Namun, kata Yoesri Djalius (FPP) hasil dialog itu tidak serta merta dapat dipu tuskan menjadi keputusan DPRD

Aspirasi masyarakat Solok bagian selatan untuk membentuk kabupaten sendiri tampaknya mulai menunjukkan tanda-tanda akan berhasil. Baik DPRD maupun Bupati Gamawan Fauzi sudah menyatakan persetujuannya Kabupaten Solok dipecah dua.

Kabupaten Solok. "Keputusan ini harus melalui sidang paripurna. Karena itu secara *de jure* keputusan belum bisa di-ambil sekarang," tegasnya.

Tapi sebagian besar masyarakat yang datang bersikukuh meminta agar keputusan tetap diambil saat itu juga. Akhirnya,

untuk menghindari keragu-raguan dari masyarakat itu, diadakanlah rapat terbatas BP2KS2 dengan kalangan pimpinan.

Ketua BP2KS2 Dr. Armen Mukhtar, Jr. Musril Kuasai, Dr. Syafrul Latief dan Drs. Bulasmi Aban dengan kalangan pimpinan dewan sepakat untuk menyetujui aspirasi tersebut secara *de jure* melalui rapat paripurna yang akan diadakan Senin (29/7/2002) lusa.

"Hari itu hanya tinggal ketok palu saja," ujar Armen Mukhtar kepada wartawan. Ia menegaskan bahwa secara *de facto* DPRD sudah setuju. "Berarti aspirasi ini sudah boleh dikatakan diterima oleh semua kalangan di kabupaten ini," katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berhasil menyusun dokumen setebal seratur halaman memuat argumen-argumen kenapa pemekaran kabupaten itu perlu. "Jadi secara akademis dan politis aspirasi ini juga sudah padu," ujarnya sambil menyebut bahwa tim khusus BP2KS2 telah melakukan penelitian di 19 Kecamatan untuk mengkaji plus minus pemekaran itu.

Dikatakan, setelah proses di Kabupaten Solok selesai, maka tim akan meneruskan lobi dan pendekatan ke DPRD

bersambung ke hal 8 kol 5-6

Kabupaten Solok Dipecah Dua

Sumbar serta gubernur. "Kita harapkan dalam tahun ini juga kabupaten baru ini bisa disetujui oleh DPRD," katanya.

Menyangkut nama kabupaten dan rencana ibukotanya, Musril Kusai mengatakan bahwa BP2KS2 telah sepakat dengan lima kecamatan yang bakal bergabung dengan kabupaten baru itu untuk memakai nama Kabupaten Solok Selatan dan Padang Aro, Kecamatan Sangir sebagai pusat kabupaten.

"Tapi tentang nama ini masih bersifat sementara. Menjelang usul diteruskan ke Jakarta kita masih akan memusyawarahkannya dengan lima kecamatan itu," lanjut Armen. Ia juga mengaku soal nama akan sangat sensitif dibicarakan saat ini. Sebab ada hal-hal prinsip menyangkut nama yang dikhawatirkan justru akan mementahkan kembali tekad itu.

Apalagi secara historis dua kecamatan besar (Sangir dan Sungai Pagu) mempunyai sejarah adat yang kuat. Sungai Pagu dengan wilayah Adat Alam Surambi Sungai Pagu dan Sangir yang terkenal dengan Rantau 12 Koto sama-sama berpotensi untuk diabadikan namanya menjadi nama kabupaten baru itu. Sedangkan tiga kecamatan lainnya, yakni Sangir Jujuhan, Sangir Batanghari dan Koto Parik Gadang Diateh diprediksi akan memunculkan nama pula untuk kabupaten yang mereka inginkan itu.

Sejarah aspirasi pemekaran kabupaten untuk Solok bagian selatan ini pernah mencatat kegagalan lantaran tidak sepakatnya para pengaspalan saat itu tentang ibukota, juga termasuk penamaan kabupaten itu sendiri. "Sekarang kita harapkan itu tidak akan terjadi karena sejak awal kita sudah membuat kesepakatan. Terutama menyangkut ibukota. Kelima kecamatan sudah sepakat menetapkan Padang Aro di Kecamatan Sangir sebagai pusat Kabupaten," ungkap Armen Mukhtar.

Hal ini ditegaskan pula oleh Musril Kusai. Katanya sejak awal dibentuknya BP2KS2 bulan Maret 2002 lalu, tokoh-tokoh masyarakat dari lima kecamatan selalu dibawa serta untuk

bermusyawarah. "Apapun yang kita putuskan adalah hasil musyawarah. Dan tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok dalam hal ini," sebutnya.

Tidak Takut

Semenara itu Bupati Solok Gamawan Fauzi, S.H. kepada *Mimbar Minang* mengatakan bahwa dirinya sejak lama tidak pernah menghambat aspirasi masyarakat Solok bagian selatan untuk berdiri sendiri. Ia bahkan memfasilitasinya dengan memberikan data-data kepada BP2KS2 guna menyusun dokumen usulan itu.

Selama masa kepemimpinannya telah dua kali mengapung ide pemekaran kabupaten itu. Yang pertama muncul tahun 2000. "Saya bahkan menghadiri seminar persiapan pembentukan kabupaten baru itu pada bulan Januari 20002," ucap Gamawan.

Ketika ditanya apakah dirinya tidak takut akan kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran berpisahnya Solok bagian selatan tersebut, Gamawan menegaskan. "Tidak, sama sekali tidak kan banyak potensi di utara yang juga bisa mendatangkan PAD," tegasnya sambil mencontohkan bahwa potensi wisata, agribisnis dan pertambangan juga cukup besar di utara.

Dikatakan, memang di selatan saat ini terdapat sembilan perkebunan besar yang amat potensial untuk menambah PAD. "Tapi kelak jika sudah berpisah kita tentu akan terpacu pula untuk menggali pemasukan dari sumber-sumber lainnya," imbuh Gamawan.

Disamping itu Gamawan juga mengatakan bahwa untuk skala regional (Sumatra Barat) justru bertambahnya kabupaten itu akan sangat baik. Soalnya lokasi anggaran pusat (DAU) akan bertambah pula. "Jadi dari sudut manapun dilihat pemekaran ini amat positif. Tinggal lagi bagaimana aspirasi itu ditindak lanjuti oleh pihak-pihak yang lebih tinggi," sebutnya. Ia juga berharap aspirasi itu dapat diakomodasi dan disetujui oleh provinsi dan pusat. > tel/znz

Wartawan "Haluan" Melaporkan :

"Wakil-wakil Rakyat" Menanggapi Positif !

- * Aspirasi Masyarakat dari Wilayah Solok Selatan
- * Hari Senin Ini Rakyat Menunggu Keputusan DPRD

Solok, Juli (Haluan).

KABUPATEN Solok Selatan semakin dekat perwujudannya dan menunggu pengetokan palu setelah melalui sidang DPRD Kab. Solok pe maparan proposal dari pihak Panitia BP2KS2 mendapat tanggapan positif dari 19 orang anggota Dewan yang menyampaikan tanggapannya.

Sidang paripurna DPRD Kab. Solok ini dipimpin oleh wakil Ketua Saltono didampingi oleh pihak eksekutif Sekda Kab. So

lok Drs. H. Syafril Khatib dan Panitia Pemekaran Kab. Solok Selatan (BPKS2) langsung alot di ruang sidang DPRD Kab. Solok di Koto Baru Jum'at (26/7). Sementara diluar gedung tidak kurang dari 300 orang anggota Masyarakat Solok Selatan sengaja datang mempergunakan 6 buah bus dan puluhan kendaraan pribadi secara tertib mendengarkan jalannya sidang, beberapa lembar spanduk tergantung di depan kantor Wakil

rakyat ini diantaranya bertuliskan "Masyarakat Solok Selatan Bertekad menjadi Kabupaten". Masyarakat yang datang ini dari 5 kecamatan masing-masing Sangir Jujan, Sangir Batang Hari, Sangir, Sei. Pagu, dan Koto Parik Gadang Diatch, termasuk juga para perantau di beberapa kota dalam Sumbar termasuk para mahasiswa ikut bergabung dengan tertib di luar gedung ini.

Sidang paripurna DPRD Kab. Solok kali ini betul-betul menampilkan para wakil rakyat betul-betul telah menyikapi aspirasi masyarakat Solok Selatan yang sudah cukup lama berkeinginan menjadi sebuah Kabupaten dimulai sejak tahun 1956.

Beberapa anggota dewan yang menyampaikan tanggapannya setelah mendengar pemaparan proposal tentang pemekaran Solok Selatan menjadi sebuah kabupaten itu disampaikan Sekretaris BPKS2 Jr. Musril Kusai antara lain disampaikan Drs. Erizal Kasuma dari Fraksi PDI Perjuangan tegas-tegas sangat mendukung berdirinya Kabupaten Solok Selatan, apalagi perjuangan yang sudah cukup panjang dan lama dari para tokoh masyarakat Solok Selatan sudah sepatutnya disikapi secara positif sesuai dengan UU No.22 tahun. 1999 bagi pemecaran suatu daerah.

Juga menyampaikan tanggapan dari Listo, BA dari FPG, Drs. Desra Ediwan (FPG), Nu. Syirwan (FPPP), Irwandi (FPAN), Nuzuar Said (FPAN), Abu Hanifah (FPBB), Ahmad Jati (FPPP), Nazar Dt. Rajo In tan (FPG), M.Sati Nurdin (FPK), Suhartoni SH dan Edi Salim Dt. Basa kesemuanya menegarah kepada tujuan yang sama sangat menyikapi aspirasi rakyat Solok Selatan kemudian mendukung berdirinya Kabupaten Solok Selatan.

Setiap tanggapan para anggota Dewan ini selafu mendapat tepuk tangan gemuruh diberikan para tokoh masyarakat Solok Selatan yang mengikuti jalannya sidang paripurna ini.

Maka dari kesepakatan bersama baik dari pihak Eksekutif maupun pihak legislatif termasuk Panitia BP2S2 sidang paripurna DPRD Kab. Solok ditetapkan untuk dilanjutkan hari Senin (29/7) dan merupakan sidang terakhir pengetokan palu atas persetujuan berdirinya kab. Solok Selatan. (Yal)

Wartawan "Haluan" Melaporkan :

"Wakil-wakil Rakyat" Menanggapi Positif !

- * Aspirasi Masyarakat dari Wilayah Solok Selatan
- * Hari Senin Ini Rakyat Menunggu Keputusan DPRD

Solok, Juli (Haluan).

KABUPATEN Solok Selatan semakin dekat perwujudannya dan menunggu pengetokan palu setelah melalui sidang DPRD Kab. Solok pemaparan proposal dari pihak Panitia BP2KS2 mendapat tanggapan positif dari 19 orang anggota Dewan yang menyampaikan tanggapannya.

Sidang paripurna DPRD Kab. Solok ini dipimpin oleh wakil Ketua Saltono didampingi pihak eksekutif Sekda Kab. So-

lok Drs. H. Syafril Khatib dan Panitia Pemekaran Kab. Solok Selatan (BPKS2) langsung alot di ruang sidang DPRD Kab. Solok di Koto Baru Jum'at (26/7). Sementara diluar gedung tidak kurang dari 300 orang anggota Masyarakat Solok Selatan sengaja datang mempergunakan 6 buah bus dan puluhan kendaraan pribadi secara tertib mendengarkan jalannya sidang, beberapa lembar spanduk tergantung di depan kantor Wakil

rakyat ini diantaranya bertuliskan "Masyarakat Solok Selatan Bertekad menjadi Kabupaten". Masyarakat yang datang ini dari 5 kecamatan masing-masing Sangir Jujan, Sangir Batang Hari, Sangir, Sei. Pagu, dan Koto Parik Gadang Diatah, termasuk juga para perantau di beberapa kota dalam Sumbang termasuk para mahasiswa ikut bergabung dengan tertib di luar gedung ini.

Sidang paripurna DPRD Kab. Solok kali ini betul-betul menampilkan para wakil rakyat betul-betul telah menyikapi aspirasi masyarakat Solok Selatan yang sudah cukup lama berkeinginan menjadi sebuah Kabupaten dimulai sejak tahun 1956.

Beberapa anggota dewan yang menyampaikan tanggapannya setelah mendengar pemaparan proposal tentang pemekaran Solok Selatan menjadi sebuah kabupaten itu disampaikan Sekretaris BPKS2 Ir. Musril Kusai antara lain disampaikan Drs. Erizal Kasuma dari Fraksi PDI Perjuangan tegas-tegas sangat mendukung berdirinya Kabupaten Solok Selatan, apalagi perjuangan yang sudah cukup panjang dan lama dari para tokoh masyarakat Solok Selatan sudah sepatutnya disikapi secara positif sesuai dengan UU No.22 tahun, 1999 bagi pemekaran suatu daerah.

Juga menyampaikan tanggapan dari Listo, BA dari FPG, Drs. Desra Ediwan (FPG), Nu Syirwan (FPPP), Irwandi (FPAN), Nuzuar Said (FPAN), Abu Hanifah (FPBB), Ahmad Jati (FPPP), Nazar Dt. Rajo In tari (FPG), M.Sati Nurdin (FPK), Suhartoni SH dan Edi Salim Dt. Basa kesemuanya menegarah kepada tujuan yang sama sangat menyikapi aspirasi rakyat Solok Selatan kemudian mendukung berdirinya Kabupaten Solok Selatan.

Setiap tanggapan para anggota Dewan ini selalu mendapat tepuk tangan gemuruh diberikan para tokoh masyarakat Solok Selatan yang mengikuti jalannya sidang paripurna ini.

Maka dari kesepakatan bersama baik dari pihak Eksekutif maupun pihak legislatif termasuk Panitia BP2S2 sidang paripurna DPRD Kab. Solok ditetapkan untuk dilanjutkan hari Senin (29/7) dan merupakan sidang terakhir pengetokan palu atas persetujuan berdirinya kab. Solok Selatan. (Yal).

Keputusan DPRD Tentang Kabupaten Solok Selatan Ditentukan Hari Ini

Muara Labuh, Juli (Haluan).

WAKIL Ketua DPRD Kab. Solok Saltano mengemukakan bahwa sidang paripurna pengesahan sekaligus penandatanganan untuk keputusan Kabupaten Solok Selatan akan ditetapkan hari ini (Senin 29/7) dan tidak akan ada lagi penundaan

karena sudah melalui dua kali sidang sebelumnya mendengar ekspose pihak Eksekutif maupun pemaparan proposal disampaikan Panitia BP2KS2.

Baik Ekspose Eksekutif maupun pementapan proposal dari Panitia BP2KS2 ini kesemuanya telah dibahas melalui tanggapan-tanggapan disampaikan para anggota Dewan dari masing-masing fraksi yang ada.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kab. Solok Saltano yang memimpin sidang pada kedua kali pembahasan pemekaran Solok Selatan menjadi sebuah kabupaten dalam pertemuan khusus dengan pihak Ketua Paninus Listo BA (FPG) bersama Panitia BP2KS2 Ketua DR. Armen Mukhtar, diruangan Wakil Ketua DPRD Kab. Solok di Koto Baru Solok sesuai sidang paripurna kedua (Jumat 26/7) lalu.

Menurut Saltano rapat paripurna kali ini setelah melalui rapat-rapat fraksi nanti sekaligus mengambil keputusan pengesahan persetujuan berdirinya Kab. Solok Selatan.

Pada sidang-sidang sebelumnya telah didengar dalam pembahasan-pembahasan secara demokratis masing-masing anggota fraksi telah menyampaikan pendapatnya, baik ekspose Eksekutif dan data-data penelitiannya termasuk juga tanggapan-tanggapan penyampaian proposal oleh pihak Panitia BP2KS2 (Badan Panitia Pemekaran Kab. Solok Selatan) sendiri. Pada prinsipnya pihak anggota menanggapi secara positif termasuk juga persetujuan serta dukungan pihak Pemda Kab. Solok juga disampaikan pada sidang dewan sebelumnya.

Mudah-mudahan hari ini (Senin 29/7) akan rampung diselesaikan dalam rapat paripurna dan adalah ketukan palu terakhir untuk berdirinya Kabupaten Solok Selatan. (Yal).

Kabupaten Solok Selatan Terwujud

Mayoritas Fraksi Mendukung

Solok, PE

Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang akhirnya keinginan masyarakat Solok Selatan untuk mewujudkan sebuah kabupaten bakal terealisasi. Pasalnya, lima Fraksi dan satu Non Fraksi di DPRD Kabupaten Solok, menyatakan setuju Solok Selatan dimekarkan menjadi kabupaten yang berdiri sendiri.

Kesepakatan ini tercapai setelah DPRD Solok yang dipimpin Ketua DPRD Solok Drs. Sa'aduddin Ch. Bgd, lewat rapat paripurna DPRD Kabupaten Solok, Senin sore (29/7). Sebanyak 19 penanggap dari anggota dewan menyatakan setuju. Hanya saja, suara dari FPPP yang tidak penuh mendukung terbentuknya Kabupaten Solok Selatan. Sebab, Ketua fraksinya, Syofyan Sirin menyatakan tidak setuju terhadap pembentukan kabupaten baru itu.

Sebelum diputuskan, rapat paripurna tersebut juga memberikan kesempatan kepada Ketua Badan Penggerak Pembentukan Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2), DR. Armen Mukhtar me-

nyampaikan eksposnya di hadapan anggota dewan tentang seputar perkembangan terakhir tentang persiapan pembentukan kabupaten.

Dari pantauan *Padang Ekspres*, saat rapat paripurna yang dihadiri Bupati Solok, Gamawan Fauzi SH, Wakil Bupati DR Elfi Sahlan Ben, Sekda Drs Sjafril Chatib, Kabag/Kadis/Kakan dan jajaran lingkup Pemda Kabupaten Solok, serta unsur Muspida Solok, diawali dengan perdebatan sengit antara Ketua FPG, Muchlis Listo BA dengan Ketua DPRD Kabupaten Solok, Drs. Sa'aduddin Ch. Bgd. Dalam hal ini, Sa'aduddin menghendaki pengambilan keputusan langsung setuju atau tidaknya. Tapi Listo merasa keberatan dengan tawaran Sa'aduddin. Listo yang justru menginginkan adanya musyawarah terlebih dahulu.

Melihat gelagat tarik ulur itu, anggota Non Fraksi dari PDIP, Erizal Kusuma langsung interupsi dan meraih mikropon, selanjutnya menyatakan setuju Solok Selatan dimekarkan menjadi kabupaten yang berdiri sendiri. Usai mengeluarkan pernyataan, dia serta merta melakukan *walk out*.

Karena situasinya mulai memanas, terpaksa langsung dimin-

ta pendapat masing-masing fraksi. Kesempatan pertama, diberikan pada Fraksi Partai Golkar. Melalui jubirnya, Buspadewar Dt. Kayo, fraksi terbesar di DPRD Kabupaten Solok ini beranjak dari pengalaman Kabupaten Solok sendiri sebelum ini yang pernah melepas beberapa daerahnya untuk berdiri sendiri dan bergabung dengan daerah lain, serta dari penjelasan Bupati Solok dalam Raker dengan DPRD tanggal 24 Juli 2002. Mereka juga menambahkan berdasarkan sikap BP2KS2, Fraksi Partai Golkar, menarik 5 kesimpulan, yakni demi perjuangan memekarkan diri sudah sejak tahun 50-an.

Selain itu fraksi tersebut juga menilai adanya kemampuan ekonomi, sosial budaya, potensi daerah mendukung pemekaran, ketiga, luas wilayah dan kemauan politik masyarakat serta anasir yang menyatakan berdirinya Solok Selatan tak akan menyusutkan atau mematikan kabupaten yang lama. "Berarti, kesemua item tersebut telah memenuhi wujud seperti yang diisyaratkan pasal 4 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 UU No. 29/99. Maka, FPG dapat menerima dan menyetujui Solok Selatan dimekarkan," tandasnya. (ero)

Pemekaran Kabupaten Solok Disetujui

Solok, Singgalang

Peta Kabupaten Solok dipastikan bakal berubah, menyusul disetujuinya pemekaran wilayah Solok bagian Selatan menjadi kabupaten defenitif. Persetujuan pembentukan Kabupaten Solok Selatan itu dipastikan setelah 5 fraksi di DPRD Kabupaten Solok melalui masing-masing juru bicaranya menyampaikan pandangan akhir dalam sidang paripurna DPRD, Senin (29/7).

Dihadiri langsung oleh Bupati Gamawan Fauzi, SH, Wakil Bupati DR. H. Elfi Sahlan Ben Apt serta Sekda Drs. H. Syafril Chatib, sidang DPRD Senin itu benar-benar

hanya untuk menantikan ketok palu tanda persetujuan pemekaran Kabupaten Solok Selatan. Ketua DPRD Drs. H. Sa'aduddin malah tidak perlu berpikir panjang untuk menandatangani persetujuan tersebut. Bahkan guna memfasilitasi aspirasi tokoh masyarakat Solok Selatan yang tergabung dalam BP2KS2 (Badan Penggerak Pemekaran Kabupaten Solok Selatan), sesuai janjinya, Bupati Gamawan Fauzi sekaligus melakukan penandatanganan surat permohonan pemekaran yang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumbar.

Namun sebelumnya, Erizal

Kusuma dan Edi Salim Dt. Basa dari PDI-P melakukan *walk-out*, karena pihaknya tidak diperkenankan menyampaikan pandangan politik mengingat kedua tokoh Parpol PDI-P tersebut tidak memiliki fraksi. "Tetapi sebelum keluar dari sidang ini, saya menyatakan mendukung sepenuhnya pemekaran Kabupaten Solok Selatan," tegas Erizal Kusuma sebelum melangkahkan kaki keluar ruangan.

Senada dengan Erizal, juru bicara Fraksi Kesatuan Suwartoni mengemukakan pemekaran Kabupaten Solok Selatan lebih sebagai ungkapan keberhasilan Gamawan Fauzi

yang paling fenomenal sepanjang kepemimpinannya. Keberhasilan ini akan dikenang sepanjang masa. Bahkan anggota dewan yang suka membuat sensasi ini menyebutkan pemekaran Solok Selatan tidak pernah dihalangi oleh pemerintah Kabupaten Solok. Terbukti, pada sidang persetujuan pemekaran ini, semua pejabat menghadiri dan merestuininya. "Kita saksikan Bupati Solok, Wakil Bupati, Sekda dan Ketua DPRD duduk bersama dalam sidang kali ini", kata Suwartoni.

Bupati Solok sendiri dalam pandangannya hanya memastikan komitmennya terhadap rencana pemekaran Solok

Selatan, menurut dia, kalau pengajuannya dilakukan sebagaimana prosedur berlaku, seperti janji ketika menghadiri seminar Pemekaran Solok Selatan di Muara Labuh beberapa waktu lalu, tak akan berlangsung lama. Bahkan hari itu juga akan ditandatangani. "Malah persetujuan ini besok pagi (hari ini-red) telah jalan ke propinsi", kata Gamawan.

Sementara itu, Ketua Panitia BP2KS2 Bulasmi Aban menyatakan keharusannya terhadap kemauan politik pemerintah Kabupaten Solok yang menyetujui pemekaran wilayah paling selatan daerah itu. •403/209/402

Sidang "Wakil-wakil Rakyat" Kabupaten Solok Kemarin :

Kabupaten Solok Selatan Terwujud

* Anggota DPRD Kabupaten Solok Setujui Pemekaran Secara Aklamasi

Solok, Juli (Haluan).

PERJALANAN panjang masyarakat Solok Selatan memakan waktu kl.52 tahun untuk dapat berdiri sendiri menjadi sebuah Kabupaten akhirnya terwujud sudah, setelah DPRD Kabupaten Solok secara aklamasi menyetujui pemekaran Kabupaten Solok menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan pada sidang pleno khusus, Senin (29/7).

Sidang yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Solok Drs.H.Saaduddin Khatib Bagindo dan dihadiri Bupati Solok H.Gamawan Fauzi,SH,

Wakil Bupati DR.Elfi Syahlan, Apt. Sekda Drs.H.Syafril Khatib. Muspida, Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru, para kepala dinas dan Badan, tokoh masya

rakat Solok Selatan, para wartawan dari berbagai media berjalan aman dan lancar yang terlebih dahulu mendengarkan kata akhir dari 5 fraksi yang ada di DPRD Kab.Solok.

Fraksi Partai Golkar (FPG) dengan juru bicaranya H.Buspa dewar Dt.Kayo sebelum sampai pada kesimpulan menyetujui dan dapat menerima pemekaran Solok Selatan menjadi sebuah Kabupaten dengan Wilayah meliputi 5 Kecamatan yakni Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Koto Sungai Pagu, Sungkai, Sangir Jujuar dan Kec.Sangir Batanghari telah menguraikan secara panjang

lebar tentang upaya dan perjuangan masyarakat Solok Selatan sekitar tahun 1950 lalu atau sudah memakan waktu 4 generasi.

Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan Bupati dan ekspose Badan Penggerak Pemekaran Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2) tanggal 24 dan 26 Juli 2002 tergambar bahwa kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya serta luas wilayah dan jumlah penduduk telah memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah kabupaten.

Selanjutnya secara berturut-turut Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) dengan juru bicara Annusirwan, Fraksi Amanat Nasional (FAN) dengan juru bicara Djasril Fahrudin, Fraksi Kesatuan dengan juru bicara Suwartoni,SH dan Fraksi TNI/Polri dengan juru bicara Odin Syamsuddin sama-sama menyatakan setuju dengan pemekaran Kabupaten Solok menjadi dua Kabupaten yakni Kabupaten Solok (Induk) meliputi 14 kecamatan yakni Kecamatan Kubung, X Koto Singkarak, X Koto Diatas, Junjung Sirih, IX Koto Sungai Lasi, Bukit Sundi, Gunung Talang, Payung Sekaki, Danau Kembar, Tigo Lurah, Lembang Jaya, Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti dan Kec. Pantai Cermin. Sedangkan untuk Kabupaten Solok Selatan meliputi 5 Kecamatan seperti disebutkan diatas.

Hal ini kata masing-masing Fraksi diharapkan akan dapat mempercepat pemberian pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan dan mempercepat laju pembangunan yang bermuara pada peningkatan perekonomian masyarakat serta dapat membawa kemajuan bagi masyarakat Kab.Solok dan Kab.Solok Selatan itu sendiri.

Bupati Solok H.Gamawan Fauzi,SH dalam sambutannya selesai pembacaan konsep persetujuan Dewan yang dibacakan Sekwan M.Saleh,SH menyatakan akan menyikapi segera apa yang sudah menjadi keputusan DPRD tersebut.

Kata Gamawan, hari ini juga (Senin-red) surat persetujuan Dewan itu akan segera dikelola dan besok pagi (Selasa ini-red) segera dibawa ke Provinsi untuk diserahkan kepada Gubernur dan selanjutnya ke Mendagri di Jakarta.

Selesai mengikuti sidang pleno khusus tersebut berbagai pihak tampak saling bersalaman sambil menyatakan rasa sukacita yang dalam, terutama kepada anggota DPRD Kabupaten Solok asal Solok Selatan dan juga pemuka masyarakat yang berkemampuan hadir pada sidang pleno khusus tersebut. (SH/Yal).

• Catatan Proses Pembentukan Kabupaten Solok Selatan (1)

Aspirasi Masyarakat Akhirnya Disetujui

PENGANTAR REDAKSI - Aspirasi masyarakat Solok Selatan akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat dalam sidang paripurna khusus, Senin (29/7), setelah melalui pembahasan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok dan BP2KS2. Bagaimana hasil diskusi tersebut, berikut catatan Syofyan Kudan, wartawan *Singgalang*. Selamat mengikuti.

Aspirasi masyarakat Solok Selatan untuk membentuk sebuah kabupaten telah ada sejak tahun 1950 silam. Namun, proses itu terkendala dengan berbagai hal. Kenedatipun demikian aspirasi ini terus bergulir dan sering diapungkan dalam setiap pertemuan. Tapi karena pembicaraannya belum resmi dan memakai proposal, maka aspirasi itu hanya sekedar berkibar saja dan belum dapat

dibahas secara resmi oleh Pemkab dan DPRD Kab. Solok. Barulah bulan Juni lalu, secara resmi Tim Badan Penggerak Pembentukan Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2) menyampaikan proposal kepada Bupati Solok dan ditindaklanjuti dengan penyerahan proposal tersebut kepada DPRD setempat:

Tim BP2KSS terdiri dari Ketua DR. Armen Mukthar, Ir.Husril Kusai, Drs.Busalmi

Aban dan DR.Syafrul Latif, serta Humas Syukrial Syukur dengan sejumlah anggota lainnya. Sebelumnya, Bupati Solok, Gamawan Fauzi, SH, melalui surat keputusan (SK) No. 112 Tahun 2002 membentuk tim penekiti proses pembentukan Kabupaten Solok Selatan yang terbagi tiga bidang. Masing-masing bidang pemerintahan, bidang ekonomi dan bidang sarana/prasarana.

DPRD Kab. Solok juga menyingkapi dengan mengadakan pertemuan dengan eksekutif dan tim BP2KSS. Dalam pertemuan dengan eksekutif, DPRD mendapat persetujuan Pemkab Solok yang disampaikan Sekretaris Kabupaten, Drs.Syafril Chatib dalam acara diskusi dengan anggota dewan, Rabu (24/7).

Kemudian, Jumat (26/7) dilanjutkan sidang paripurna khusus mendengar penjelasan tim BP2KSS. Sidang ini dipim-

pin wakil Ketua Saltono dan sejumlah kepala dinas/instansi, anggota dewan, serta tim BP2KS dan sekitar 200 masyarakat Solok Selatan yang memadati gedung dewan. Akhirnya, anggota dewan sepakat mengadakan sidang paripurna khusus, Senin (29/7).

Sidang penentuan keputusan itu (29/7), dipimpin Ketua DPRD Drs. H. Saaduddin AS, Chatib Bagindo yang dihadiri langsung oleh Bupati Solok Gunawan Fauzi, SH, Wakil Bupati DR.H.Elfi Sahlan Ben, Apt, Muspida dan undangan lainnya.

Lima fraksi menyampaikan pendapat akhirnya yang secara umum dapat menyetujui pembentukan Kabupaten Solok Selatan sesuai aspirasi masyarakat. Keputusan fraksi itu masing-masing disampaikan juru bicaranya, Fraksi Partai Golkar (FPG) H. Buspadewar Datuak Kayo, Fraksi Partai

Persatuan (FPP), Annusyirwan SMHK, Fraksi Amanat Nasional, (FAN) Jasril Fachruddin, Fraksi Keadilan (FK), Suwartoni, SH, dan Fraksi TNI/Polri Oding Syamsudin. Setelah meminta persetujuan anggota dewan yang lain, akhirnya pimpinan sidang mengetukan palu tanda persetujuan pemekaran Kabupaten Solok menjadi Kabupaten Solok (induk) dan Kabupaten Solok Selatan.

Kabupaten Solok terdiri dari 14 kecamatan, yakni kecamatan kubung, X Koto Diatas, Singkarak, Sungai Lasi, Bukit Sundi, Gunung Talang, Payung Sekaki, Lembang Jaya, Lembah Gumanti, Pantai Cermin, Junjug Sirih, Danau Kembar, Hiliran Gumanti dan Kecamatan Tigo Lurah. Sedangkan Kabupaten Solok Selatan terdiri dari lima kecamatan, yakni Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Sangir, Sangir Jujuan dan

Kecamatan Sungai Batang Hari.

Keputusan Dewan inipun telah ditanda tangani Pimpinan DPRD melalui suratnya Nomor : 08 Tahun 2002 tanggal 29 Juli. Kemudian ditindak lanjuti oleh Bupati Solok dengan surat Nomor : 100/354/TP-2002 tanggal 30 Juli untuk dikirimkan ke Gubernur Sumatera Barat.

Drs.Busalmi Aban (tim BP2KSS) bersama Humas Syukrial Syukur se usai sidang kepada wartawan menyampaikan kegembiraannya atas respon yang diberikan Bupati Solok bersama DPRD, sehingga rencana pemekaran Kabupaten Solok dapat disetujui. "Kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Solok dan anggota DPRD yang telah menyetujui pembentukan Kab. Solok Selatan,"ujarnya. •bersambung

Rencana Pemekaran Kabupaten Solok **Kedua Wilayah Punya Prospek Iimbang**

SOLOK, Serambi Pos

Sebagai tindak lanjut rencana pemekaran Kabupaten Solok menjadi Kab. Solok Utara dan Solok Selatan, maka Panitia yang dibentuk Pemda Kab. Solok telah bekerja. Untuk itu Bupati Solok yang diwakili Sekda Drs.H.Syafri Chatib dalam rapat kerjanya bersama DPRD pada Rabu (26/7) telah menyampaikan paparannya tentang perbandingan potensi wilayah Solok Utara dan Solok Selatan dari segala segi.

Paparan Bupati ini selain dihadiri para anggota DPRD Kab. Solok juga dihadiri para Kep.Dinas/Kantor di lingkungan Pemda serta anggota panitia BP2KS2 (Badan Pekerja Pembentukan Kabupaten Solok Selatan).

Dari paparan data Bupati dengan sumber dari Kantor BPS Kab. Solok dan

sumber resmi lainnya di lingkungan Pemda Kab. Solok dapat disimpulkan kedua wilayah apabila dimekarkan mempunyai prospek berimbang dengan kata lain lagi untuk dikembangkan, walaupun ruas jalan, pelayanan kesehatan, Lembaga pendidikan dan kepariwisataan Solok Selatan yang terdiri dari 5 kecamatan ini agak tertinggal dibanding Solok belahan Utara, termasuk sarana gedung pemerintahan.

Lima kecamatan bakal masuk Kab. Solok Selatan masing masing al. Kecamatan Sungai Pagu, Kec.Koto Parik Gadang Diateh, Kec. Sangir, Kec.Sangir Jujuan dan Sangir Batang Hari.

Menurut Bupati yang disampaikan Sekda bahwa dalam pembandingan antara kedua wilayah ini sangat penting agar diperoleh gambaran, agar pemekaran

wilayah ini jangan sampai daerah yang ditinggalkan tidak berfungsi lagi.

Angin segar DPRD:

10 anggota DPRD yang menyampaikan pendapatnya, sama-sama memberikan respon positif terbentuknya Kabupaten Solok Selatan ini. Bahkan ada yang mendesak agar persatuan eksekutif dan legislatif tidak akan membebani karena bukan PAD Solok Selatan sehubungan dengan Solok Utara, serta akan sama-sama memperoleh DAU Pusat.

Acara dilanjutkan Jum'at (26/7) dengan mendengarkan ekspose Panitia BP2KS2 bahkan mereka berharap DPRD telah dapat ketuk palu pertanda persetujuannya. Syuekria Syukur, koordinator Humas BP2KS2 menjelaskan hari Jum'at tersebut akan hadir lk-300 orang warga Solok Selatan sebagai harapan terhadap Pembentukan Kab.Solok Selatan ini, (RITO)

■ Hati Masyarakat berbunga-bunga

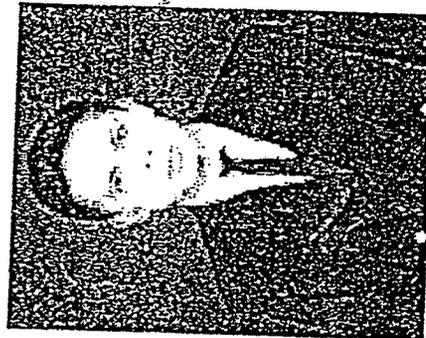
Kabupaten Solok Selatan Tinggal Menghitung Hari

Akhirnya perjuangan masyarakat Solok Selatan terwujud. Pemekaran Kabupaten yang mereka inginkan telah disetujui DPRD Kabupaten Solok dalam rapat paripurna Senin (29/7) lalu.

Pagi itu, semangat masyarakat Solok Selatan membara, di dalam hati mereka tetap terselip sebuah kece- masan, namun mereka tetap menunjukkan kekompakan kepada pemerintiah Kabu- paten Solok dan para wakil rakyatnya. Mereka, pagi itu dari seluruh penjuru mengibarkan bendera Kabupaten Solok Selatan, untuk menyaksikan rapat pari- purna DPRD Kabupaten Solok tentang pembahasan pemekaran wilayahnya. Tiga deraan pribadi pun tak terhitung jumlah menuju gedung DPRD Kabupaten Solok, Jumat (26/7) lalu.

Suasana pagi Jum'at itu di DPRD Kabupaten Solok memang terlihat agak lain, salah seorang anggota masyarakat ada yang sibuk memompelkan stiker ke mobil yang sedang parkir, bertuliskan "Kabupaten Solok Selatan Oke". Dan Sony dkk juga sibuk membenteng spanduk digerbang kantor wakil rakyat yang megah itu. Sementara aparat kepolisian tetap berjaga- jaga dan membaur dengan masyarakat. Masyarakat Solok Selatan tampaknya hanya sekedar menunjukkan dengan hati murni dukungan terhadap perjuangan yang dilakukan para tokoh masyarakatnya. Mereka tenang, aman, terkendali dan tidak mengeluarkan orasi.

Sedangkan di dalam gedung legislatif tengah berlangsung sidang paripurna dewan yang dipimpin wakil ketua DPRD,



Sony Patricia

malah mempercepat keputusannya, bahwa permasalahan ini tak perlu lagi diper- debatkan. Akhirnya masyarakat Solok Selatan yang berdiri dipintu masuk ruang sidang menyambut dengan gemuruh tepuk tangan. Sedangkan pimpinan Sidang Saltano masih meminta sebuah tanggapan dari Sekwan, itupun dibantah oleh ang- gotanya, karena sekwan bukan anggota

legislatif. Akhirnya pemimpin sidang Saltano mengetokkan palu bahwa pemekaran Solok Selatan di jadikan kabupaten baru di setuju. Dan penanda tangkapan naskah persetujuan ini dilaksanakan Senin (29/7) lalu.

Di luar, ratusan masyarakat Solok Selatan menyambut dengan riuh tepuk tangan. Mereka saling berjabat tangan dan berangkuhan, anggota dewan disalami. Itulah kegembiraan spontanitas murni yang digambarkannya.

Sony yang mengusung spanduk pemekaran menuturkan, supaya tidak ada kelompok tertentu yang sengaja mema- takkan perjuangan ini. Bayangkan per- juangan yang dilakukan tokoh masyarakat Solok Selatan ini adalah generasi yang keempat semenjak dunia *lakambang*. Tujuan utama yang harus dicapai adalah mewujudkan Solok Selatan jadi kabupaten baru. Masalah yang lainnya pasti sudah dipikirkan dengan matang oleh pengurus BP2KS2. Jadi semuanya telah terprogram dan terencana dengan baik.

Sedangkan masalah letak pusat kabu- paten Solok Selatan di desa Bukit Ma- lintang, Padang Aro Kecamatan Sangir cukup strategis, lokasinya berada dite- ngah-tengah. Jadi ibukota Kabupaten jangan dipersoalkan lagi. "Kita bisa meli- hat daerah lain, diantaranya Kabupaten Tanah Datar, yang kantor Bupatianya di pusat kota, kini pindah ke daerah Pagaru- yung, jauh dari keramaian daerah itu," tu- tur Sony mencontohkannya. ■ **TIM SOLID**

Saltano. Sekretaris BP2KS2, Ir. Mustil Kusai memaparkan usulan pemekaran wilayah kabupaten Solok secara terperinci. Kusai dengan suara penuh keyakinan menjelaskan selama satu jam, 45 menit.

Di dalam sidang, 19 orang anggota dewan yang menanggapi tentang usulan pemekaran Kabupaten Solok, pada prinsipnya menyetujui. Mucklis Listo malah mempercepat keputusannya, bahwa permasalahan ini tak perlu lagi diper- debatkan. Akhirnya masyarakat Solok Selatan yang berdiri dipintu masuk ruang sidang menyambut dengan gemuruh tepuk tangan. Sedangkan pimpinan Sidang Saltano masih meminta sebuah tanggapan dari Sekwan, itupun dibantah oleh ang- gotanya, karena sekwan bukan anggota



Badan Penggerak Pemekaran Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2) foto bersama sesuai pengurus memaparkan proposal di DPRD kab.Solok, Jumat (26/7). (Foto: Jamilus)

Enam Fraksi Setujui **Kabupaten Solok Jadi Solok Utara & Selatan**

SOLOK, *Serambi Pos*

Enam Fraksi yang ada di DPRD Kab.Solok menyatakan "Setuju" Pemekaran Wilayah Kab.Solok menjadi dua bagian yaitu Solok Utara dan Selatan. Keputusan bersejarah ini diambil pada Rapat Pleno Khusus yang berlangsung pada hari Senin (29/7).

Rapat Pleno Khusus ini dengan acara penyampaian pendapat akhir Fraksi, setelah sebelumnya mendengarkan Exspose pihak

Ke Halaman 2

KABUPATEN.....

Eksekutif, Jum'at (25/7) dengan Expose Panitia BP2KS2 (Badan Penggerak Pembentukan Kabupaten Solok Selatan), masing-masing disampaikan oleh Sekda Drs.H.Syafri Chatib dan Sekretaris BP2KS2 Ir.Masril Kusai.

Pada Pleno Khusus ini hadir Bupati Solok H.Gamawan Fauzi SH, Wabup DR.H.Efi Sahlan Ben Apt. dan sejumlah tokoh Solok Selatan seperti Khaidir Nuh BA, mantan Ketua DPRD Kota Solok, Drs.H.Bulasmis Aban, DR.Syahrul Latif, Drs.Tungkoh Rutlah mantan Kakandepso Kota Solok dan Muspida.

Penyampaian Pendapat Akhir ini diawali Erizal Kusuma dari PDI-P Non Fraksi sebab baru saja keluar dari F-Golkar, sebab selama ini PDI-P dan Golkar bergabung. Erizal Kusuma mengangkat tangan, meminta agar PDI-P yang Non Fraksi (karena belum resmi fraksi sendiri) minta izin menyampaikan pendapatnya.

Namun Ketua DPRD Drs.H.Sa'aduddin AS Ch Bagindo menjelaskan, masalah Non Fraksi akan dibicarakan pada akhir persidangan. Mendengar hal ini, Erizal Kusuma dengan lantang mengatakan "Kami PDI-P setuju dan dapat menerima keberadaan Kab.Solok Selatan.

Setelah menyampaikan pernyataannya, Erizal minta izin keluar persidangan yang diikuti rekannya Edi Salim Dt.Basa. Kemudian dilanjutkan pandangan akhir F-Golkar melalui jurubicarannya H.Buspádevar Dt.Kayo BA SmHk., F-PAN oleh Jasni, F-Kesatuan oleh Suwartoni SH, F-TNI/Polri disampaikan Oeding Syamsuddin.

Umumnya DPRD melalui fraksinya sama-sama memahami aspirasi masyarakat Solok Selatan yang ingin membentuk Kabupaten sendiri yang awalnya mereka menginginkan Kabupaten "Sehiliran Batang Hari" yang diperjuangkan sejak tahun 1950 lalu dengan tokoh pemrakarsanya a.l. Latif Dt.Nan Dilanguang.

Pembentukan Kab.Solok Selatan dinilai telah memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam PP 129 tahun 2000 baik penghitungan secara rasion, kedua wilayah

Solok Utara dan Selatan, memiliki skor yang tidak jauh berbeda.

Maka itu untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Solok Selatan dan retang kendali yang panjang, maka sudah layak keberadaan Kab.Solok Selatan, kepada pihak Eksekutif fraksi-fraksi diharapkan mempercepat proses administrasinya agar cepat sampai ke Propinsi.

Dengan disetujuinya Kab.Solok Selatan, maka kabupaten baru ini memiliki 5 kecamatan dengan luas lebih kurang 3.346,20 KM atau 47,23% dari Kab.Solok keseluruhan, penduduk 118.159 jiwa atau 26,25% dari Kab.Solok, disudut potensi daerah, Solok Selatan mempunyai potensi sektor perkebunan. Disini ada 14 Eks.Perkebunan besar Belanda, ribuan hektar perkebunan sawit baru, berikut 2 pabrik kelapa sawit, 2 goa sarang walet. Dikecamatan Sangir saja telah berkembang menjadi 3 kecamatan, yaitu Kec.Sangir Batang Hari, Sangir Jujuan dan Sangir yang luasnya lebih 3 kali luas Kab.Tanahdatar belum lagi Kec.Sungai Pagu, menjadi Kec.Sungai Pagu dan Kec.Koto Parik Gadang Diateh.

Dalam sambutan singkatnya, Bupati Solok Gamawan Fauzi SH mengatakan bahwa sesuai dengan era reformasi, maka Kab.Solok telah mengukir sejarah dengan menyetujui Pembentukan Kab.Solok Selatan. Mengenai permintaan legislatif agar proses administratifnya cepat dikirimkan ke Propinsi. Maka hari ini saya jawab, tegas Bupati bahwa warga Solok Selatan tak perlu menunggu hitungan hari, tetapi "Besok, Selasa 30 Juli 2002 kami akan mengirimkannya ke Propinsi.

Mendengar itu, tepuk tangan riuh terdengar sampai keluar persidangan. Usai rapat pleno khusus ini para tokoh Solok Selatan menyalami Bupati dengan wajah ceria, betapa tidak 50 Tahun sebuah perjuangan panjang dan melelahkan. Lagi-lagi Bupati Solok dan DPRD-nya mendapat acungan jempol, kami akan mencatatnya dalam tinta emas sejarah berdirinya Kab.Solok Selatan ini jelas Drs.Bulasmis Aban, mantan pejabat Kab.Pasaman dan Kantor Gubernur Sumbar ini. (RITO)

gagang telepon sebelum akhirnya utus-
kannya (hsh)

Pemekaran Solok di Tangan Gubernur

PADANG, PADEK—Pelaksanaan pemekaran Kabupaten Solok berlangsung dalam gerak yang sangat cepat, meskipun beberapa waktu lalu sempat meredup. Buktinya, respon Bupati Solok Gamawan Fauzi SH terhadap hal ini, ibarat bola yang meluncur kencang. Sehingga sehari DPRD Solok mengeluarkan surat kesepakatan No 08 Tahun 2002 tanggal 29 Juli 2002, Bupati Solok Gamawan Fauzi SH langsung mengirim surat kepada Gubernur Sumbar H Zainal Bakar SH.

Surat bernomor 100/359/TP.2002 tanggal 30 Juli 2002 yang langsung ditandatangani Bupati Solok Gamawan Fauzi SH ini dijelaskan, rencana pemekaran Solok telah melewati beberapa proses dan menjadi kesepakatan masyarakat Solok. Karena itu, Bupati menyetujui dan mengeluarkan surat pernyataan No 100/353/TP-2002 tanggal 25 Juli 2002 tentang pemekaran Kabupaten Solok.

Surat itu kemudian disusul dengan kesepakatan DPRD Kabupaten Solok yang kemudian menjadi latar belakang Bupati Solok untuk menyampaikan keinginan masyarakat kepada Gubernur Sumbar. Aspirasi ini disampaikan dengan merujuk kepada pasal 6 ayat 2 UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Kepala Biro (Kabiro) Pemerintahan Setdaprov Sumbar Drs Chairul Darwis membenarkannya ketika dikonfirmasi *Padang Ekspres* kemarin. "Akan dilakukan pengkajian untuk melihat dampak pemekaran dalam memperpendek rentang kendali kegiatan pemerintahan," ujarnya. (vya)

Kabupaten Solok Selatan tak hanya ada dalam impian masyarakat. Kini, ia telah menjelma menjadi sebuah kenyataan. Senin 29 Juli 2002, merupakan hari bersejarah, bagi Kabupaten Solok Selatan.

Goresan tinta pena Bupati Gamawan Fauzi dan Ketua DPRD Kabupaten Solok, menjadi bukti sejarah bagi perjalanan Solok Selatan ke depan. Sebab, dalam naskah persetujuan pemekaran Solok Selatan, goresan tanda tangan mereka terpampang di dalamnya.

Tentunya, apa yang telah dilakukan oleh kedua pejabat di Kabupaten Solok ini, memiliki arti tersendiri bagi masyarakat Solok Selatan. Sebuah kenyataan yang tak akan mudah hilang begitu saja.

Perjuangan mereka cukup panjang, keinginan itu sudah mengalir semenjak tahun 1950. Namun, kondisi politik yang sangat sentralistik pada saat itu, memaksa mereka menyimpan hasrat tersebut.

Kondisi tak lantas membuat mereka patah arang, perjuangan masih mereka lanjutkan. Gagal pada generasi yang satu, kemudian mereka lanjutkan pada generasi berikutnya. Hingga saat ini, sudah tercatat generasi yang keempat.

Agaknya perjuangan itu tak bakal sia-sia, Bupati Solok beserta Ketua DPRD

Solok Selatan Jadi Kabupaten

Dua Goresan Pena Mengukir Sejarah

Kabupaten Solok, cukup arif dalam menyikapi hal tersebut. Mereka menyadari, bahwa sebuah perjuangan harus diakhiri dengan sebuah kemenangan.

Saat ini, masyarakat Solok Selatan bernafas lega. Sebab dari hasil Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Solok, menyatakan Solok Selatan bakal menjadi Kabupaten baru. Kelegaan itu makin bertambah, sebab Sidang Paripurna ini tak hanya diramaikan oleh masyarakat yang mempunyai hejatan, akan tetapi sidang juga dihadiri oleh Bupati Solok Gamawan Fauzi, Wakil Bupati Solok Elfi Syahlan Ben, Sekda Kabupaten Solok Sjafri Chatib, Ketua DPRD Kabupaten Solok Sa'aduddin, dan seluruh DPRD Kabupaten Solok.

Dengan respon positif tersebut, masyarakat boleh bernafas panjang, serta menghirup udara segar. Tak salah bila wajah ceria muncul secara spontanitas dari masyarakat Solok Selatan.

Dengan ber kibarnya "bendera" Solok Selatan, artinya masyarakat meraih sebuah kepastian. Kedatangan mereka ke gedung DPRD Kabupaten Solok, di Koto Baru, Solok, tak menjadi percuma. Mereka boleh berbangga dan bertierak sepuasnya sebagai ungkapan kemenangan dalam



Tokoh masyarakat Solok Selatan Ir Musril Kusai dan Dr Armen Mochtar

perjuangan, karena niatan dalam hati telah kesampaian.

Senin 29 Juli 2002, merupakan hari bersejarah bagi perjuangan masyarakat Solok Selatan. Sebab, perjuangan yang begitu lama, sekarang telah membuahkan hasil. Mereka pulang ke Solok Selatan, tak hanya dengan tangan kosong belaka, namun membawa sebuah kepastian.

Namun hasil yang dicapai itu, tak terlepas dari perjuangan Badan Pengerak Pemekaran Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2). Di sisi lain, perjuangan yang dilakukan BP2KS2, yang dimotori oleh Sekretarisnya, Ir Musril Kusai, tak kunjung kesampaian bila tak mendapat dukungan dari masyarakat Solok Selatan. Kepaduan dan kecintaan terhadap tanah kelahiran mereka, telah menyatupadukan mereka dalam sebuah perjuangan yang tak kenal lelah.

Ternyata tekad yang membara dari masyarakat Solok Selatan, telah membuat Bupati beserta DPRD Kabupaten Solok, merealisasikan proposal pemekaran Solok Selatan tersebut.

Bertempat di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Solok, proposal itu pun ditanda tangani, telah ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten Solok, Sa'aduddin dan Bupati Haji Gamawan

Fauzi, SH pada sidang panipurna dewan Senin (29/7) lalu.

Berbagai respon positif pun muncul dari berbagai pihak. Mantan Ketua Bapeda Kabupaten Solok, Drs H Achmad Yunis, kepada SOLID mengatakan bahwa perjuangan masyarakat Solok Selatan harus didukung sepenuhnya. Alasannya, Undang Undang No 22 tahun 1999 mendukung hal tersebut.

Lebih jauh, Yunis memaparkan keuntungan atas pemekaran Solok Selatan tersebut. Menurutnya, pemekaran itu akan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat-khususnya masyarakat Solok Selatan. Begitu juga terhadap aspek pembangunan. Pemekaran itu jelas akan mempercepat perubahan laju perekonomian dan pembangunan di Solok Selatan.

Kendati demikian, Yunis tak lupa mengingatkan masyarakat Solok Selatan dan BP2KS2, jangan larut dalam suka yang dalam, dan jangan tenggelam dalam kemenangan. Selanjutnya, hasil yang telah diraih itu, harus direalisasikan secara cepat. Jangan sampai membuang-buang waktu. Naskah yang sudah ditandatangani oleh kedua pejabat di Kabupaten Solok tersebut, harus segera disampaikan pada Pemerintah Provinsi Sumbar.

Agar Pemerintah Provinsi memiliki waktu yang relatif singkat untuk menyampaikannya pada DPRD Provinsi Sumbar. "Dengan kerja cepat itu, niat masyarakat Solok Selatan, akan cepat sampai pada Pemerintah Pusat," ujar Achmad Yunis yang saat ini menjabat Kepala Biro Pemberdayaan Sosial Pemuda dan Olah Raga Provinsi Sumbar.

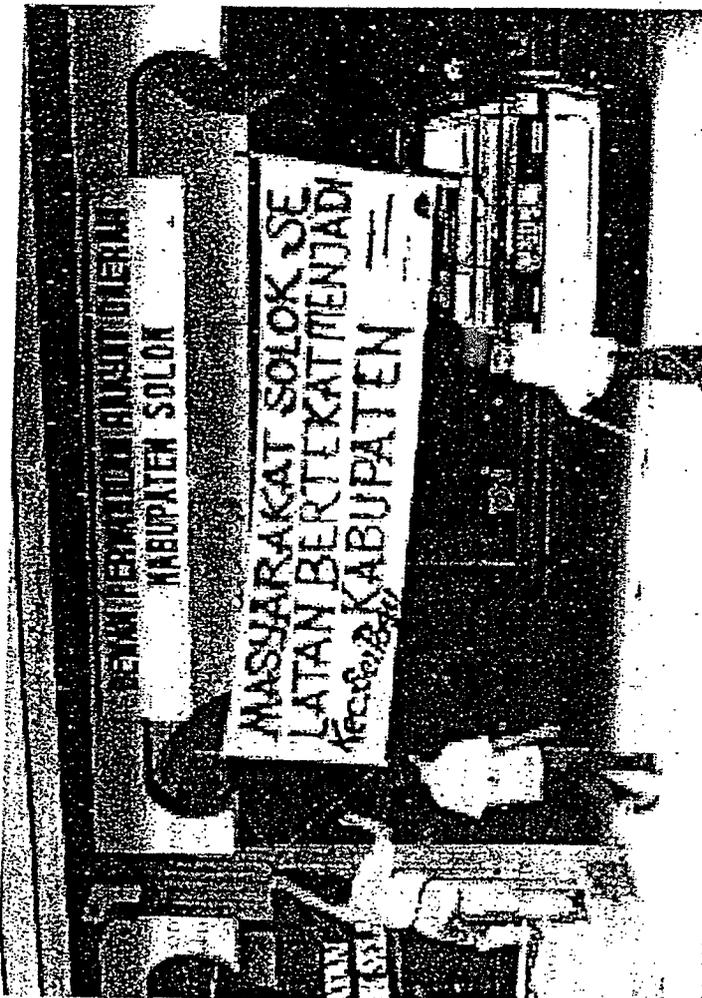
Hal hampir senada juga terlontar dari mulut Anggota Komisi B DPRD Sumbar, Ir Hendra Irwan Rahim. Menurutnya, bila surat persetujuan dari Bupati dan DPRD Kabupaten Solok, secepatnya di kirim ke DPRD Sumbar, tentu surat tersebut akan dibahas lebih lanjut.

Lebih jauh diungkapkan oleh pria mantan Ketua KNPI Sumbar ini, bila surat tersebut masuk dalam waktu cepat, bukan tak mungkin DPRD Sumbar akan membentuk Pansus (Panitia Khusus) atau Panmus (Panitia Musyawarah), untuk membicarakan hal tersebut.

Namun, secara pasti, Hendra tak bisa memaparkan seberapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membahas hal tersebut. "Hal tersebut tergantung dari kondisi dan realitanya nanti. Sebab, ini bukan perkara mudah. Jadi harus dibahas secara hati-hati," katanya.

Gema Solok Selatan telah membahana, tentunya masyarakat tak ingin gema itu hanya tinggal sekedar gaung belaka. Setidaknya gema itu, akan berwujud sebuah kepastian. Agar mereka tenang dalam mengakhiri sebuah perjuangan.

Febriansyah &
Irwandi Rais (Solok)



Pernyataan sikap masyarakat Solok Selatan

JuhardSOLID

SOLID 07-08-2002

Tim Evaluasi Pemekaran Solok ke Lapangan

Dilakukan untuk
Dapatkan Perhatian
Gubernur

PADANG, PADEK—Kamis (14/8) besok, Tim Evaluasi Pemekaran Kabupaten Solok dari Pemrov Sumbar akan turun ke lapangan. Hal ini dilakukan untuk menyikapi aspirasi masyarakat yang berniat mengelola secara mandiri pembangunan di kawasan Solok Selatan.

Hal ini dibenarkan Kepala Biro (Kabiro) Pemerintahan Setdaprov Sumbar Drs Chairul Darwis ketika *Padang Ekspres* mengkonfirmasi masalah ini kemarin. "Tim evaluasi langsung dipimpin Asisten I Setdaprov Sumbar, akan turun ke Solok untuk mengevaluasi hasil kajian Pemkab Solok," tuturnya.

Dari *Padang Ekspres* di Kantor Gubernur Sumbar diperoleh keterangan bahwa, langkah tersebut diambil akibat derasnya desakan masyarakat Solok Selatan yang terdiri Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Sangir, Sangir Jujuan dan Sangir Batang Hari untuk memisahkan dari Kabupaten Solok.

Hal ini juga dilakukan sebagai langkah proaktif dalam rangka mendapatkan perhatian Gubernur Sumbar. Salah satunya berwujud audiensi antara Pemrov Sumbar yang diwakili Sekdaprov Drs Rusdi Lubis dengan Badan Pelopor Pemekaran Kabupaten Solok yang dikoordinir Dr Armen Mukhtar di Ruang Asisten I Setdaprov Sumbar, Senin (12/8).

Sebelumnya, pemekaran Kabupaten Solok yang sempat meredup akhirnya direspon Bupati Solok

Gamawan Fauzi SH sehari setelah keputusan pemekaran Solok oleh DPRD Solok No 08 Tahun 2002 tanggal 29 Juli 2002. Gubernur Sumbar H Zainal Bakar SH juga telah diberitahu melalui surat Bupati Solok Gamawan Fauzi SH No 100/359/TP.2002 tanggal 30 Juli 2002.

Dalam surat tersebut, Gamawan menjelaskan, rencana pemekaran Solok telah melewati beberapa proses dan menjadi kesepakatan masyarakat Solok. Karena itu, pemekaran sudah disetujui dengan dikeluarkannya pernyataan Bupati Solok No 100/353/TP-2002 tanggal 25 Juli 2002 tentang Pemekaran Kabupaten Solok.

Kemudian diperkuat dengan kesepakatan DPRD Kabupaten Solok yang dijadikan latar belakang bagi Bupati Solok untuk menyampaikan aspirasi pemekaran Solok kepada Gubernur Sumbar. (vya)

SABTU, 21 SEPTEMBER 2002

HARIAN HALUAN



WAKIL Ketua DPR RI Sutardjo Suryoguritno, Rabu (18/9) menerima pengurus Badan Penggerak Pembentukan Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2) di ruangan kerjanya, Jakarta. Pertemuan yang membahas rencana dan upaya pemekaran kabupaten itu, dari Kabupaten Solok diikuti dua orang, yaitu Ir. Musril Kusai dengan Drs. Buslami Aban. Dalam gambar dari kiri ke kanan adalah, Ir. Musril Kusai, Zulkifli M. Noer, Drs. Bustami Aban, St. Mahisal Malay, Drs. H. Erman Hafni, Sutardjo Suryoguritno (Wakil Ketua DPR), Darmilus Adam, Letkol (CPL) H. Soehaymi Thaib, SE, Drs. Zul Kasim, Adril Soelaeman, SE, MPA, MA, Asril Maas, dan Drs. H. Mudjadid, D, SH, MH, MBL. (Foto: Kiriman).

Setuju, Solok Selatan Dijadikan Kabupaten

Solok, Singgalang - Kelengkapan daerah Solok Selatan untuk membentuk sebuah daerah tingkat II (Kabupaten) sebenarnya telah ada sejak tahun 1988. Aspirasi masyarakat di telah pernah disampaikan ke DPRD dan DPR Pusat. Masalah ini juga telah sering mendapat tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Revisi untuk pemekaran Kabupaten Solok memang ada pengalihan sesuai Undang-Undang Nomor 22 dan 25 tahun 1999. Namun, semuanya ditangguhkan karena keinginan masyarakat dan sambutan anggota dewan yang terhambat.

Salah seorang tokoh masyarakat Muara Labuh, Drs. Syamsir Pane Selasa (2/12/99) menjawab Singgalang tentang pemekaran Kabupaten Solok, mengaku setuju saja jika itu benar-benar keinginan dan masyarakat.

Alasan yang dia berikan, Syamsir Pane adalah adanya kondisi jalan tersebut yang salah satu pasalnya membenturkan kemungkinan pemekaran wilayah itu. Untuk bagi daerah yang mendapat dukungan dari masyarakatnya.

Menurut Syamsir, dengan ditetapkannya daerah Solok Selatan sebagai daerah tingkat II yang mempunyai pusat pemerintahan akan mempercepat proses pembangunan masyarakat. Sekaligus mempermudah pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. Sebab selama ini pelayanan pemerintah masih terpusat ke Kota Baru, daerah yang ditempuh masyarakat Sangir ke pusat pemerintahan Kabupaten Solok sekitar 60 kilometer. 4 jam perjalanan Solok Selatan adanya anggapan bahwa dengan terpecahnya daerah Kabupaten



Diri Syamsir Pane Solok akan mengahiri Pendekatan Asili Daerah (PAD) Syamsir Pane kurang setuju. Sebab terpecahnya suatu daerah berarti terbagi pula tanggung jawab pembangunan daerah tersebut. Ia mencolokkan jika panjang jalan ada 1.500 kilometer yang diurus Kabupaten Solok dengan terbagi pula pembangunan jalan tersebut. Begitu juga dalam tanggung jawab sektor lainnya seperti pendidikan dan sarana lainnya.

Syamsir menyatakannya dengan dibantu pusat pemerintahan (bentuk Kabupaten baru) maka pelayanan kepada masyarakat akan semakin cepat dan mudah dilangkau. Masalah-masalah yang membutuhkan penanganan pemerintah bor sama-aparatnya tentu akan lebih mudah karena tidak harus ke Kolo Baru. Iapun mencontohkan jika seandainya terjadi kebakaran di Sangir atau dinantikan mobil untuk kebakaran dari Kolo Baru. Solok yang memem-

lukan waktu ke Sangir sekitar 3 jam lebih, tentu amukan akan lebih cepat. Belum sampai mobil unit di Sangir, bangunan itu sudah habis terbakar, kata Syamsir, mencontohkan.

Begitu juga tentang pengawasan aparat terhadap oknum yang berbuat akan lebih efektif dan efisien. Syamsir mencontohkan kasus pencurian kayu yang diangkat senaknya oleh truk truk bermuatan puluhan ton melewati jalan negara dan jalan kabupaten. Mereka membawa kayu tidak merasa takut karena terlindung dari pengawasan aparat penegak hukum. Sehingga akibatnya badan jalan akan cepat hancur. Syamsir khawatir jika ini dibiarkan terus, maka kerusakan jalan negara akan semakin parah. Kalau badan jalan telah rusak parah maka hujung Muara Labuh ke Padang akan seperti puluhan tahun lalu. Dulu kalau kita ke Padang memerlukan waktu tiga hari, dua malam. Akibat kondisi jalan yang rusak akan mempersulitnya dulu.

Syamsir Pane yang berpengalaman menjadi Camat menilai bahwa Sangir akan menjadi segitiga emas jika jalan Sangir ke Sawahlunto diujung terbuka. Jalan Sangir ke Kerinci dan Sangir ke Padang Selama ini masyarakat Kerinci berbelanja ke Kota Padang dan Bukittinggi. Dengan terbentuknya pasar yang terdesentralisasi, tentu masyarakat Kerinci tidak lagi berbelanja ke Padang atau Bukittinggi. Ditinjau dari segi potensi daerah Solok Selatan, menurut Syamsir Pane cukup potensial dengan du-

kungan letak segitiga emas tadi, serta potensi sekebunan besar seperti TKA, Sumatera Jaya, TSS, Mitra Kerinci, Golden Arm dan hasil tambang lainnya. Hasil survei ada ditemukannya sumber gas bumi di sekitar Pekanina yang dapat dijadikan sumber energi listrik. Kapasitasnya cukup besar dan mampu melayani Sumber Jambi.

Alasan lain yang mendukung berdirinya sebuah kabupaten di Solok Selatan, menurut Syamsir Pane adalah beberapa daerah tingkat II di luar Sumatera Barat telah melakukan pemekaran seperti Riau dan Sumatera Utara (Sumut). Sedangkan dalam Provinsi Sumatera Barat sendiri telah dimekarkan kabupaten Padang Pariaman menjadi Kabupaten Mentawai. Sementara luas daerah dimekarkan Kabupaten Padang Pariaman menjadi Kabupaten Mentawai. Sementara luas daerah Kabupaten Solok termasuk nomor dua terluas dari 14 dari 11 Kecamatan Sangir saja luasnya melebihi Kabupaten Tanah Datar.

Tentang pembentukan dan batasan kabupaten baru itu, menurut Syamsir Pane sesuai namanya. Sehingga dan batas kabupaten baru itu, menurut Syamsir Pane sesuai namanya sehiliran batang Hari (SBH) yang meliputi Kecamatan Lembah Gumari, Pantai Cermin, Sungai Pagu dan Sangir. Ini juga sesuai dengan wilayah Pembantu Bupati Solok Selatan yang menjadi cikal bakal SBH. Namun, bagaimana keinginan masyarakat itu diserahkan sepenuhnya kepadanya. Jika keinginan betul-betul dari rakyat, hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendukung aspirasi tersebut dan melanjutkan ke tingkat atas.

Syofyan Kudan

Bola Reformasi Itu Bergulir ke Selatan

Solo, 22/9 - DPRD Kab. Solok akhirnya mengakomodasi aspirasi masyarakat Muaro Labuah Kecil Sungai Pagu untuk membentuk kabupaten tersendiri lepas dari induknya Kab. Solok. Senin (22/9) Bupati Solok Ganawan Fauzi SH diminta mengupayakan dan penyelesaiannya di Gedung Wakil Rakyat tersebut. Setelah berdiskusi beberapa waktu yang berkembang di tengah masyarakat belakangan ini termasuk aspirasi dimak-

sud rencana pemindahan ibu kota kabupaten Solok dari Kota Baru ke Sukarami, kasus sarang burung Walet di Selatan dan kesiapan kab. Solok menyambut pelaksanaan UU No. 22/99. Menggarisbawahi persoalan Solok Selatan, sebetulnya "sign" agar berbagai pihak maupun kalangan masyarakat maupun kalangan media, yikapi dan menanggapi aspirasi secara rasional telah dicuatkan awalnya oleh Pembantu Gubernur Wil III Sumbar Drs. Alimin Sinapa. Kepada Harian ini saat itu, diingatkannya, agar

aspirasi jangan ditanggapi secara kontradiktif. Karena, aspirasi demikian memiliki legalitas formal, tidak hanya dari eranya adalah era reformasi, namun juga secara akomodatif terkait dengan bakal dilaksanakannya UU No. 22/99. Walaupun itu disinyalir bermuatan politis, justru Alimin mengilainya tepat. Sebab, keputusan otonomisasi itu jelas merupakan keputusan politis. Bahkan, ditandaskannya, tidak ada segmen atau

hidupan yang tidak berakses atau berinteraksi sesamanya. Terlebih, suhu politik Sumbar memang kian memanas akhir-akhir ini. Pendapat senada masih melalui Harian ini, juga dikemukakan anggota Komisi B DPRD Tk I Sumbar Kol (Mar) Tasnimi Raza SE. Dia malah lebih tegas menganggap aspirasi bukanlah sesuatu yang luar biasa. Secara konkrit, dicontohkannya dengan kondisi di Jawa, dimari antara satu

daerah otonom dengan yang lainnya tidak begitu berjarak. Kondisi yang sama terjadi di Metro Lampung sebagaimana diungkapkan mantan anggota DPRD Kab. Solok Syaikhil Bahri BA bahwa dari satu

dati II terpecah menjadi tiga. Berpijak pada rasionalisasi tersebut, kalau dikilas, balik pada historisnya, maka memang sulit mengedepankan isu politis dibalik aspirasi itu.

Sebab, aspirasi telah pernah mencuat jauh waktu sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan beberapa Tokoh Solok Selatan beberapa tahun silam, masyarakat ada keinginan membentuk kabupaten Sillran Batang Hari (SBH). Hanya saja, "iklim" saat itu tidak mendukung. Karenanya, aspirasi terbelenggu sekian lama bahkan bisa dibuang hilangnya kesempatan masyarakat untuk bersiap diri.

Dalam kurun waktu itu, Pemda Kab. Solok diakui telah berupaya untuk mengkompensasi aspirasi awal dengan berbagai kegiatan pembangunan. Terutama, pembangunan jalan dan mendatangkan investor perkebunan. Pembangunan tampaknya tidak hanya berdampak positif namun aksesnya juga ke negara itu ketimpangan dan ketidakadilan mulai merebak. Berbagai persoalan menyangkut perkebunan, terutama terkait dengan lahan perkebunan yang selayaknya dengan dukungan keterlibatan oknum aparat. Tidak hanya itu, merupakan merasa dianak tirikan di kampungnya sendiri. Penganak tirian, refleksiikan adanya tuntutan kepemilikan plasma perkebunan. Sementara itu, Pemda Kab. Solok sendiri khabarnya hanya memperoleh imbalan dalam bentuk PBB. Akibatnya, tidak jarang penanganan harus di "takling". Kantor Bupati Solok dengan menghadirka masyarakat bersampekutan yang juga tambak kasa mata hasil hutan mereka diarah dengan meracuni di antara rekan-rekannya sendiri untuk terlibat secara perlahan. Ironisnya, tindakan ini hampir tidak terungkap oleh Pemda meskipun sudah berada di pelupuk mata. Sarana jalan pun menjadi hancur (oro)

Sangir Mengancam akan Bergabung dengan Jambi

Jika Lokasi Sarang Walet Diserahkan ke Sungai Pagu

Sangir, PE
Masyarakat Kecamatan Sangir, Solok Selatan mengancam akan keluar dari Propinsi Sumatera Barat dan bergabung ke propinsi tetangganya (Jambi), seandainya tempat keberadaan sarang burung walet yang berlokasi di dalam areal HPH PT AMT (Andalas Merapi Timbor) diputuskan oleh Pemda Kabupaten Solok masuk wilayah Kecamatan Sungai Pagu.

Demikian, disampaikan oleh Syarifuddin Dipertuan Maha Rajo Bungsu didampingi oleh Wakil Ketua BNN, Nani Lubuk Gadang kepada Padang Ekspres Minggu (21/11). Dikatakannya, lokasi keberadaan sarang burung walet yang terlokasi di areal 270 dalam HPH PT AMT tersebut adalah tanah ulayat ninik mamak Nara Lubuk Gadang yang ditempati dari seluhur secara turun temurun. Selama ini, sebelum ditemukannya sarang burung walet di daerah ini, tidak ada orang-orang Muaralabuh yang mengaku bahwa daerah tersebut tanah ulayatnya. Kenapa baru sekarang diperebutkan?

BN dan dinas kehutanan Propinsi Sumbar. Ucapnya, "Kalau caranya begini survey dibawah komando Bustamar sebagai Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Solok perlu diperjelaskan apalagi ucapannya secara pribadi di media masa wilayah itu masuk kecamatan Sungai Pagu. Karenakaibal, boernyataannya tersebut dapat memicu perpecahan diantara dua kecamatan ini. Sebagai orang pemerintahan yang menjadi panutan dari masyarakat dibawah, seharusnya jangan banyak bicara yang belum dipastikan kebenarannya, tandasnya ia.

Untuk mencegah pencurian sarang burung yang berada ditengah ulayat kanagarian Lubuk Gadang, ujar Syarif, pihaknya sudah melaporkan ke pihak berwajib dan tembusan ke Gubernur TK II Sumbar. Karena sampai sekarang, pencurian tersebut masih berlangsung baik secara pribadi maupun kelompok. Kalau hal ini tidak dihindari lanjut oleh pihak Pemda dan aparat kea-

manan, maka kami akan mencari jalan penyelesaian sendiri tandasnya.

Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, upaya penyelesaian batas wilayah perbatasan tempat sarang burung walet beberapa waktu lalu belum menampilkan hasil atau keputusan, apakah wilayah itu masuk Kecamatan Sungai Pagu atau Kecamatan Sangir.

Sebelumnya, Kabag Tata Pemerintahan Kantor Bupati Solok Drs. Bustamar bersama unsur Muspika sudah melakukan peninjauan ke lokasi bersengketa itu.

Namun yang jadi permasalahan dan menyusul kemarahan warga Sangir seperti yang dituturkan Syarif yang Dipertuan Maha Rajo Bungsu adalah menyangkut pernyataan pribadi Drs. Bustamar di harian ini Senin lalu.

Menurut Bustamar, dengan menganalisa letak geografisnya daerah Batang Sungai Pagu melalui peta wilayah itu termasuk Kecamatan Sungai Pagu. (u)

Gamawan: Disusupi Sikap yang Emosional

Soal Aspirasi Muaralabuh Lepas dari Kabupaten Solok

Solo, PE
Bupati Solok Gamawan Fauzi SH terkesan menundir terhadap wacawanya. Seakan kurang yakin, seharusnya dia memberikan prioritas bagi para wawawaw (di luar humas) dan Mantan Kabag Humasnya Wizardman SH. Sekalipun dicoba Wizardman akan kompromi itu dibicarakan, namun tetap tidak bisa. Alhasil, Padang Ekspres hanya menerima masukan dari Rusmel Di Sati. Dari Press Rea-

son menilai aspirasi itu disusupi sikap yang emosional. Terbukti, tandasnya materi yang diungkit ternyata tidak sesuai dengan sebenarnya. Dalam hal ini, dia menggaris bawahi komentar atau tanggapan dari seorang pemerha masalah tersebut. Menurut hematnya, sebaiknya Solok Selatan memikirkan dulu masalah otonomi daerah baru setelah itu, pembentukan kabupaten tersendiri. (ero)

son menilai aspirasi itu disusupi sikap yang emosional. Terbukti, tandasnya materi yang diungkit ternyata tidak sesuai dengan sebenarnya. Dalam hal ini, dia menggaris bawahi komentar atau tanggapan dari seorang pemerha masalah tersebut. Menurut hematnya, sebaiknya Solok Selatan memikirkan dulu masalah otonomi daerah baru setelah itu, pembentukan kabupaten tersendiri. (ero)

MM 9-12-94

Proposal Pemekaran Kabupaten Swl.Sijunjung Diajukan ke DPRD

Gagasan pemekaran Kabupaten Sawahlunto Sijunjung menjadi dua yang dimotori tokoh-tokoh masyarakat wilayah selatan tampaknya tidak main-main. Panitia pemekaran kabupaten ini telah menyerahkan proposalnya kepada pimpinan DPRD, lengkap dengan nama kabupaten baru.

BUDIWALUYO

SIJUNJUNG (Mimbar). — Panitia pemekaran Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang diketuai Drs.H.Arlies Ade D. Panghulu Sati, Senin (6/12/99) menyerahkan proposal pemekaran kabupaten tersebut kepada pimpinan DPRD setempat.

Wakil Ketua DPRD Rasyudin Asur dan Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan, Zulkarnain Mondo, usai menerima proposal itu, menyatakan menyambut baik aspirasi pemekaran kabupaten. Kedua pimpinan DPRD itu juga berjanji akan dalam sidang-sidang anggota dewan.

Menurut Arlies, ide pemekaran kabupaten ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan isu politik regional, apalagi ikur-ikutan dengan trend tuntutan otonomi daerah. Akan tetapi hal itu didasarkan pada kebumuhan akan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif dan bisa menjangkau kepada amanat penderitaan rakyat.

Warga Sawahlunto Sijunjung, menyadari sepenuhnya bahwa dengan kondisi geografis wilayahnya yang demikian luas, dan kemampuan pemerintah yang sangat terbatas, telah menyebabkan kesempatan hasil pembangunan. Di satu sisi wilayah selatan yang sudah terbuka dan terkelola potensi sumberdaya yang dimiliki mampu tumbuh dengan pesat, sementara wilayah utara dengan potensi yang belum terkelola menyebabkan perkembangan wilayah itu relatif tertinggal.

Arlies yang didampingi sekretaris panitia

Amsyaril Darwin, dan beberapa tokoh masyarakat seperti Anas D. Labuan, Abdul Haris Tengku Sati, Wali Maas, Khadir Nyaman, Drs. H. Syamsuir Sulaiman, Jr. Arpen Zubir dan Syamsul Bahri, begitu yakin dengan berdirinya kabupaten baru di wilayah selatan, maka Sawahlunto Sijunjung bagian utara akan terpacu untuk mengelola potensi daerahnya untuk mengajjar keterampilan dengan wilayah selatan.

Kendati demikian, baik Rasyudin Asur maupun Zulkarnain Mondo mengingatkan untuk membangun kabupaten baru tidaklah mudah. Selain membutuhkan dana besar, juga memerlukan dukungan kelembagaan dan personel yang berkualitas. "Ini harus kita pikirkan juga," kata Zulkarnain Mondo. Apalagi untuk modal awal, membutuhkan uang yang tidak sedikit. "Apa kira-kira kita mampu untuk medanani," imbuh Rasyudin Asur.

Didukung Tokoh Masyarakat

Rencana pemekaran Sawahlunto Sijunjung menjadi dua kabupaten, mendapat dukungan segenap tokoh masyarakat bagian selatan wilayah ini. Mulai dari penghulu adat, ketua KAN dan LKAZAM kecamatan, para perantau, membubuhkan tanda tangan tanda persetujuan mereka. Tak kurang dari 244 tokoh masyarakat dari lima kecamatan, sudah menyatakan mendukung pemekaran kabupaten.

Kabupaten baru di wilayah selatan Kelak, wilayah meliputi Kecamatan Kamang Baru, Pulau Pinjung, Situung, Koto Baru dan Sungai Rumbai. Dari lima kecamatan itu total luas wilayahnya mencapai 3.798,93 km². Pen-

uduknya berjumlah 176.733 jiwa dan akan bernaung dalam 105 desa.

Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, antara lain sarang burung walet yang bisa berproduksi 3,410 ton setiap tiga bulan, dan berbagai jenis hasil hutan. Di kawasan itu juga terdapat hampir 75 ribu hektar kebun sawit, baik milik perusahaan maupun milik masyarakat. Potensi pertaniannya juga sangat menonjol dengan produksi padi mencapai 82.033 ton setahun. Potensi subsektor perternakan juga sangat besar dengan jumlah populasi sapi 196.256 ekor atau lebih besar ketimbang jumlah penduduk.

Di sektor industri, wilayah itu memiliki sejumlah industri berskala besar. Ada tiga pabrik minyak sawit (CPO).

Puluhan industri pengolahan kayu, satu pabrik tapioka dan berbagai industri kerajinan (rumah tangga) yang mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 5 ribu orang dengan upah Rp10-ribu hingga Rp15-ribu. Kelembagaan ekonomi seperti koperasi di wilayah itu juga cukup kuat. Ini terlihat dari angka jumlah koperasi sebanyak 73 buah dengan total anggota 29.174 orang dan beromzet Rp2,2 miliar sehari.

Untuk mengelola administrasi pemerintahan, kabupaten yang baru nantinya akan membutuhkan 2.015 personel yang akan menduduki fungsional. Mereka akan bekerja di 13 lembaga dinas daerah, 11 lembaga teknis daerah, lima kecamatan, 105 desa, 4 BUMD, plus sekretariat daerah dan sekretariat DPRD.

Untuk memproses proposal yang diajukan itu, Panitia pemekaran Kabupaten Sawahlunto Sijunjung memberi tenggat waktu bagi DPRD hingga akhir pertengahan 2000 mendatang. Kabupaten yang rencananya diberi nama Ranah Batang Hari Selir ini akan selesai semua.

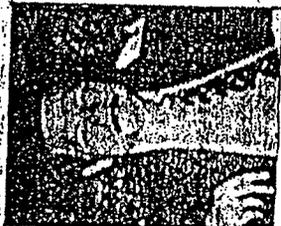
DUGAAN KALANGAN DPRD KAB. SOLOK

Ada Persekongkolan Jatuh

Akhir-akhir ini, berbagai isu melanda Kabupaten Solok. Mulai dari pengunduran pemindahan ibukota kabupaten, sampai kepada keinginan sebagian warga Solok Selatan membentuk kabupaten sendiri. Beberapa kalangan DPRD menduga, ada persekongkolan politik yang ingin menjatuhkan Gamawan Fauzi. Betulkah?

TAUFIK EFFENDI

SOLOK (Mimbar) — Beberapa kalangan DPRD Kabupaten Solok menduga ada konspirasi politik yang didalangi sekelompok orang untuk mengurangi kredibilitas Bupati Gamawan Fauzi di mata masyarakat. Ini terutama berkenaan akan habisnya masa jabatan Gamawan Agustus tahun depan.



Menurut Wakil Ketua DPRD setempat Drs. Afrizal Thaib kepada *Mimbar Mawang*, Kamis (25/11/99), kelompok itu sengaja menghem-buskan berbagai isu. Misalnya soal permasalahan pengunduran pemindahan ibukota kabupaten, keinginan membentuk kabupaten sendiri di Solok Selatan dan berbagai isu yang menyebarkan Pemda daerah ini pecah menjadi dua kloter.

Hal serupa juga dibarengkan oleh Wakil Ketua Maritus. Dia bahkan mengaku telah mengetahui dalang di balik semua itu. Namun baik Afrizal maupun Maritus menolak menyebutkan. "Saya kira sebagian anggota dewan sudah sudah maklum akan hal ini," kata Afrizal.

Kedua wakil ketua dewan ini sepakat bahwa isu yang berkembang tidak akan mempengaruhi mereka untuk meratibkan Gamawan secara objektif. Sebelumnya dewan menerima surat dari

kelompok yang menamakan dirinya Panitia Persiapan Pemekaran Daerah Solok Selatan (P3DSS) yang meminta supaya aspirasi warga 'selatan' untuk berpisah dengan induknya dibicarakan di DPRD. Kelompok yang diketuai dengan tegas menyebutkan bahwa keinginan warga "selatan" untuk membentuk kabupaten baru sudah sejak lama.

Disebutkan beberapa kecamatan sudah menyatakan diri untuk bergabung ke Solok Selatan. Dalam surat tertanggal 5 Oktober 1999 dengan nomor 05/P3DSS/1999 itu juga dikemukakan berbagai alasan pemekaran kabupaten itu. Antara lain untuk memperpendek jarak pelayanan pada masyarakat, melihat jumlah penduduk dan potensi alamnya, dan supaya terjadi pemerataan pembangunan.

Menyilapi hal ini Ketua DPRD Drs. H. Sa'aduddin yang dihubungi sebelumnya mengatakan, pihaknya akan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Namun dia mempertanyakan apakah hal itu benar-benar sudah menjadi aspirasi seluruh masyarakat.

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Maritus bahwa aspirasi ini hanya keinginan beberapa orang yang tidak puas. Sementara Afrizal mengatakan, dewan telah mengagendakan hal itu dalam sidang-sidang mendatang. Bahkan dia menantang supaya kebenaran aspirasi itu ditinjau lewat jejak pendapat.

Sementara Maritus yang sempat berkunjung ke Sangir (Rabu, 24/11/99) mengatakan bahwa tokoh-tokoh daerah paling ujung itu tidak terpengaruh oleh provokasi kelompok P3DSS itu. Mereka bahkan memilih bergabung ke

Provinsi Jambi ketimbang harus menjadi kabupaten baru bersama Muara Labuh.

"Sedangkan Kansospol Drs. Syamsir Pane, birokrat yang berasal dari Muara Labuh itu menyatakan, dia secara pribadi setuju dengan pemekaran kabupaten itu. Tapi sebagai birokrat saya melihat hal ini harus dibicarakan lebih intensif oleh berbagai pihak," katanya.

Menurut Syamsir, Solok Selatan siap menjadi kabupaten baru. Sebab, SDM-nya mendukung. Tetapi Syamsir sendiri menolak jika dipilih memimpin daerah tersebut.

Sementara I.M. Yunus D. Murnak, Kadis PU Kabupaten Solok yang berasal dari Muara Labuh ini melihat lebih realistis. Menurutnya, keinginan untuk memekarkan kabupaten menjadi dua saat ini belum relevan. "Kita masih harus membenahi berbagai penyakit. Obat penyakit-penyakit itu dulu, baru bicarakan rencana selanjutnya. Bukankah saat ini rakyat sedang dilanda krisis ekonomi, yang entah kapan surutnya. Jadi kenapa pula kita harus ngotot minta lepas dari kabupaten ini," kata Yunus.

Sedangkan Bupati Solok Gamawan Fauzi cukup arif dengan adanya keinginan 'lepas' itu. Tapi dengan hati-hati dia berkecenderungan dipikirkan masak-masak sebelum dipuruskan. Selain itu dia mempertanyakan apakah betul hal itu keinginan seluruh warga di sana.

P3DSS mengklaim dapat dukungan dari lima kecamatan di bagian selatan ini, yakni Lembah Gumanti, Pantai Cermin, Sungai Pagu, Koto Parik Gadang di Atch dan Sangi. Mereka bahkan telah membentuk kerangka lembaga organisasinya. Namun yang duduk di dalam kepemimpinan hanya segelintir orang dari beberapa negarawan di Muara Labuh saja.

Menurut Afrizal, Senin (29/11/99) mendang dewan akan beraudiensi dengan Bupati Gamawan guna mendengarkan tanggapannya atas berbagai isu dan usul itu. Diperkirakan masalah pemindahan ibukota kabupaten dan keinginan segelintir orang untuk membentuk kabupaten baru di 'selatan' akan menjadi topik hangat. ***

Kan Gamawan

Bupati Agar Sikapi Aspirasi Warga Solok Selatan Dengan Pendekatan

Bupati Solok dan DPRD Dengar Pendapat

Solok, PE.

Anggota DPRD Kabupaten Solok Buspadewar Dt. Kayo mendesak Bupati Gamawan agar aspirasi masyarakat Solok Selatan disikapi dengan pendekatan. Dari pantauannya, Gamawan belum ada melakukan pendekatan. Padahal, tandasnya, yang paling pokok di era reformasi ini adalah mendengar dan menyikapi serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Bukan sebaliknya, justru melarikannya ke Muspida. Seakan, merangkul penguatan dari Muspida.

Hal itu ditegaskan Buspadewar dalam acara dengar pendapat Bupati Solok Gamawan Fauzi SH dengan DPRD Kab. Solok seputar berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, Senin pagi (29/11). Diantara persoalan yang diapungkani adalah mengenai aspirasi masyarakat Muaralabuh Kec. Sungai Pagu untuk membentuk kabupaten sendiri dan rencana pemindahan ibu kota Kabupaten Solok dari Koto baru ke Sukarumi. Acara dengar pendapat itu dipimpin Ketua DPRD Sa'aduddin. Buspadewar mengingatkan Bupati Gamawan agar jangan dulu menyinggung tentang perluasan Kodya Solok. Sebab, bila Solok Selatan nantinya menjadi Kabupaten, maka Kabupaten Solok bakal mengecil. Atas perkembangan ini, tidak tertutup kemungkinan Kodya Solok menjadi bagian dari kabu-

paten.

Buspadewar menepis imej negatif, dengan mengatakan pemekaran Kab. Solok (Solok Selatan-red) tidak sama dengan terjadi di Aceh. Bupati Gamawan, karenanya, jangan ragu bertindak. Apapun bisa ditinjau pada era sekarang ini. Kecuali, Al Qur'an dan Hadist Nabi. Namun kalau pemekaran ini tidak jadi, menurutnya, adalah tepat bila ibu kota Kabupaten berada di kampungnya Bupati Gamawan Fauzi SH, Kec. Lb. Gumanti (Desa Sungai Nanam-red).

Dari penjelasan Gamawan sendiri, usul Sungai Nanam menjadi ibu Kabupaten Solok pernah mencuat saat membahas tentang itu beberapa pada waktu lalu, yang juga dihadiri oleh perantau. Bahkan, ungunya, telah disediakan tanah 30 hektar. Hanya saja, banyak yang tidak sepa-

Anggota dewan lainnya Masrial Dt. Indo Mangkuto, menggaris bawahi alasan aspirasi karena jarak yang begitu jauh ke ibukota kabupaten Koto Baru dan masalah pelayanan oleh aparat. Dikemukakannya, ada perkelahian di Abai Sangir, Kadés Sungai Pagu yang diburu warga, atau persoalan ini Pasir Talang baru-baru ini ternyata sulit usia sekolah yang tidak sekolah. Bagaimana disaksikannya di layar TV, anak-anak malah heran melihat kendaraan.

Sebaliknya, Masrial membandingkan dengan Bungo Tebo Jambi yang hanya 40 KM namun memiliki 2 Kabupaten. Bahkan dari segi PAD menonjolkan Kab. Tanah Datar yang luas wilayahnya lebih kecil dari Kab. Solok, namun PAD nya lebih tinggi. Padahal, tandasnya asset Kab. Solok cukup banyak.

Sulitnya pelayanan, juga digambarkan anggota berikutnya saat terjadi musibah kebakaran. Termasuk, kasus tebangan kyu liar. Mengacu pada salah seorang pakar pembangunan (ekonomi), dia menyatakan seharusnya Sumbang pun menjadi Kabupaten. Sehingga penanganannya lebih efisien, efektif dibalik tingginya tingkat produktifitas.

Anggota DPRD Kab. Solok asal PAN dari Solok Selatan

Irwandi, berkesimpulan otoda merupakan angin segar. Mengingat keputusan terakhir pemekaran wilayah berada di tangan DPRD, dia mendesak rekan-rekannya agar segera mewujudkannya. Sebaliknya, jangan pernah ada rasa takut.

Sementara itu Bupati Solok Gamawan Fauzi SH dalam tanggapannya hanya memulangkan semua masukan tersebut ke DPRD Kab. Solok. Namun kembali diingatkannya, dia bekerja dalam sistem. Karena itu, proses peninjauannya pun harus melalui sistem pula. "Tidak ada hak bagi Bupati untuk membantah. Saya hanya memberikan pertimbangan", ujarnya menanggapi.

Mengenai perluasan Kodya Solok, menurutnya, dia tidak berhak dan berwenang untuk menanggapi. Sebab, Kodya Solok bisa tersinggung bila masalah tangganya dibahas oleh Kabupaten. Hal ini merupakan kewenangan Gubernur, dimana menyangkut lintas wilayah.

Diungkapkan Gamawan, proses pemekaran wilayah itu melalui Tingkat I juga. Apa yang diterimanya dari Gubernur Sumbar Dandja D, mencari dana untuk Mentawai saja sulit. Karena itu, diingatkannya: bila sudah mandiri maka segala sesuatunya harus ditanggung sendiri termasuk, bila terjadi bencana alam. (ero/ru)

GAGASAN KABUPATEN SBH

Bertengkar Soal Ibukota

SOLOK (Mimbar) - Gagasan membentuk Kabupaten Sairidin Batang Hari (SBH) di Solok Selatan terus bergulir. Tapi sebagian tokoh-tokohnya agaknya belum kompak untuk menentukan di mana ibu kabupaten mau ditempatkan.

Masyarakat Kecamatan Sa-ngir menginginkan agar ibu kabupaten itu berada di Lubuk Gudang atau di Padang Aro. Sementara masyarakat Kecamatan Sungai Pagu meminta ibukota kabupaten SBH itu berada di Muaro Labuh.

Bagi masyarakat Sungir, alasannya adalah karena kecamatan itulah yang terluas — bahkan nyaris dua kali Kabupaten Tanah Datar — serta

potensi alamnya paling kaya.

"Jadi wajar kalau ibu kabupaten itu ditaruh di Lubuk Gadang atau di Padang Aro," kata tokoh masyarakat setempat, M.Zen Dt.Bandaro.

Sementara masyarakat Sungai Pagu memiliki alasan yang lebih realistis, "Muara Labuh sudah mempunyai sarana dan prasarana perkotaan yang dapat mendukung sebagai ibu kabupaten," kata seorang tokoh masyarakat di situ.

Kabupaten SBH yang digagaskan sejumlah tokoh dari Selatan itu akan meliputi Kecamatan Sungir, Sungai Pagu, Pantai Cermin dan Lembah Gumanti.

bersambung ke hal 7 kol 1-3

BERTENGGAR

Tapi perkara ibu kabupaten itu di mata Syafril Durulamin — salah seorang yang mengggagas SBH — bukan masalah utama. "Kenapa itu yang mesti kita perkarakan sekarang, kabupatennya dulu, baru ibu kotanya," ujar salah seorang tokoh partai Golkar Kabupaten Solok itu. Ia sendiri tampaknya memang tidak berminat membicarakan soal ibu kabupaten untuk SBH. Padahal kalau hanya sekedar beralasan, ia sebagai putra Kecamatan Pantai Cermin bisa juga meminta agar ibu kabupaten SBH itu kelak ada di Pantai Cermin.

Di mata Desra Ediwan, anggota dewan dari Alahan Panjang, sebaiknya memang bukan soal di mana ibu kabupaten hendak ditempatkan yang jadi prioritas, melainkan bagaima-

mana upaya merencanakan kabupaten SBH.

"Jangan-jangan karena bertengkar soal ibu kabupaten, justru semakin menjauhkan SBH dari kenyataannya. Jadi diwujudkan dulu kabupatennya baru soal ibukota menyusul," katanya. Ia, menurut dia, agar gagasan Kabupaten Selatan itu dapat direalisasikan secepatnya.

Soalnya, menurut Desra, menentukan ibu kabupaten itu bisa menimbulkan berbagai gejolak. "Jadi, itu mesti dibicarakan dalam suasana yang tenang, denga melibatkan semua bakal kecamatan yang akan masuk SBH," kata Desra kepada *Mimbar Minang*. Sebab, katanya, kini yang gencar membicarakan ibu kabupaten itu kan baru dari Selatan; bagaimana dengan Lembah Gumanti? "Belum tentu Lem-

bah Gumanti sepakat dengan penentuan ibu kabupaten di Muaralabuh atau di Lubuk Gadang maupun Padang Aro. Apa Anda pikir, Alahan Panjang tidak layak jadi ibu kabupaten?" katanya balik bertanya kepada *Mimbar Minang*.

Lain lagi tanggapan ketua DPD II KNPI Kabupaten Solok, Edisar Dt. Manti Basa, katanya usul dibentuknya SBH itu terlalu dini. Seharusnya, kata Edisar, ditunggu dulu bagaimana bentuk Otonomi Daerah yang bakal diberlakukan itu. "Jika sekarang kita mendesak supaya kabupaten dimekarkan, itu tidak rasional. Apalagi, perlu dipertanyakan, apakah hal itu sudah dipikirkan dengan matang," katanya. Edisar juga menghimbau supaya tidak menonjolkan Utara-Selatan dalam melihat Kabupaten Solok.

Mimbar Minang 7-12-99

Pertemuan BP2 KS2 Dengan Muspika dan Masyarakat Solok Selatan

Padang Aro, Panji Demokrasi

Pertemuan Badan Penggerak Pembentukan Kabupaten Solok Selatan (BP2 KS2) dengan Muspika Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kecamatan Sungai Pagu, Kecamatan Sangir, Kecamatan Sangir Jujuhan, Kecamatan Sangir Batang Hari, dihadiri 12 Wali Nagari di 5 Kecamatan di atas, juga Ketua Badan Perwakilan Nagari (BPN), ninik mamak, Ketua Kan, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung, Tokoh Masyarakat, Mahasiswa/i, anggota DPRD asal Solok Selatan, LSM, Bupati Kabupaten Solok diwakili oleh Drs Bustamar Kabag Pemerintahan, Ketua DPRD Kabupaten Solok diwakili oleh Edi Salim dan Panji Demokrasi serta ± 250 orang pemuda, bertempat di gedung pertemuan guru SD Padang Aro Kecamatan Sangir, Selasa (21/1) yang dipimpin Ketua Umum BP2 KS2 DR Armen Muchtar dan didampingi Sekretaris Umum IR Musril Kusai serta pengurus lainnya.

Tujuan pertemuan ini adalah membentuk Panitia Penyambutan rencana kunjungan Tim Teknis Dewan Perwakilan Otonomi Daerah (DPOD) ke Solok Selatan, yang direncanakan datang tanggal 18 Pebruari 2003 s/d tanggal 21 Pebruari 2003, untuk meneliti proposal dan akan melihat potensi daerah serta persatuan dan kesatuan kita.

Kata sambutan disampaikan oleh Ketua Umum BP2 KS2 DR Armen Muchtar, Sekretaris Umum BP2 KS2 IR Musril Kusai, Ketua DPRD Kabupaten Solok diwakili oleh Edi Salim, Bupati Kabupaten Solok diwakili oleh Drs Bustamar Kabag Pemerintahan, 5



Drs. Syamsir Pane (memegang mikrofon) sedang memimpin dialog interaktif dalam pembentukan panitia penyambutan Tim Teknis DPOD dan disebelah kanan Ir Musril Kusai, Dr Armen Muchtar, Edi Salim, Drs Bustamar, Selasa (21/1) di Padang Aro. [Foto : PD/Mahyuddin]

Kecamatan Solok Selatan diwakili oleh Camat Sangir Drs Rerizaidi, 12 Wali Nagari di 5 Kecamatan Solok Selatan diwakili oleh Wali Nagari Pasir Talang Jon Rizal.

Kemudian dibuka dialog interaktif dipimpin Tokoh Masyarakat Solok Selatan Drs Syamsir Pane yang saat ini juga Kepala Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Solok, untuk menampung aspirasi masyarakat dan membentuk panitia penyambutan tim teknis DPOD.

Semua kata sambutan yang disampaikan di atas tadi, tujuannya sama semua mendukung pembentukan Kabupaten Solok Selatan, karena sejak tahun 1950 sudah menjadi keinginan masyarakat Solok Selatan, mudah-mudahan sekarang menjadi kenyataan.

Kita sangat kasihan terha-

dap masyarakat yang berurusan ke kantor Bupati Kabupaten Solok di Kayu Aro jaraknya ± 200 km dari Kecamatan Sangir Batang Hari Abai dengan sewa mobil bus Rp. 25 ribu per orang, sangat jauh untuk mendapatkan pelayanan. Kecamatan Sangir saja lebih luas daripada Kabupaten Tanah Datar di Batu Sangkar.

Menyinggung dialog interaktif dan pembentukan panitia penyambutan tim teknis DPOD Pusat Jakarta yang dipimpin tokoh masyarakat Drs Syamsir Pane. Dalam Dialog interaktif sudah mendapat sambutan yang hangat serta mendukung dan satu persepsi dari semua lapisan masyarakat yang hadir.

Dengan musyawarah dan mufakat sudah terbentuk panitia penyambutan tim teknis DPOD Pusat Jakarta, di ma-

sing-masing Nagari yang dikunjungi, adalah tanggung jawab Wali Nagari dan Muspika juga dibantu oleh Wali Nagari dan Muspika lain, yang berada di Solok Selatan serta masyarakat, sedangkan BP2 KS2 hanya mengkoordinir pejalaksanaannya.

Wali Nagari Pakan Rabaa Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Syafrudin Malik BA, Rabu (22/1) di ruang kerjanya kantor Pakan Rabaa, mengatakan kepada Panji Demokrasi, penyambutan Tim Teknis DPOD Pusat Jakarta di Ulu perbatasan Surian, Selasa (18/2) direncanakan secara adat dan tari gelombang, karena kunjungan itu adalah suatu kehormatan kepada kita, untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat Solok Selatan menjadi Kabupaten, semoga menjadi kenyataan. [Mahyuddin]

SUASANA RAPAT KOORDINASI
ANTARA TOKOH – TOKOH MASYARAKAT
KAB. SOLOK BAGIAN SELATAN
TANGGAL 15 MARET 2002



SUASANA RAPAT KOORDINASI
ANTARA TOKOH – TOKOH MASYARAKAT
KAB. SOLOK BAGIAN SELATAN
TANGGAL 15 MARET 2002



SUASANA RAPAT KOORDINASI
ANTARA TOKOH – TOKOH MASYARAKAT
KAB. SOLOK BAGIAN SELATAN
TANGGAL 15 MARET 2002



SUASANA RAPAT KOORDINASI
ANTARA TOKOH – TOKOH MASYARAKAT
KAB. SOLOK BAGIAN SELATAN
TANGGAL 15 MARET 2002



Bakal Jadi 2 Kabupaten dan Solok wahlunto Sijunjung Belum Tergugah

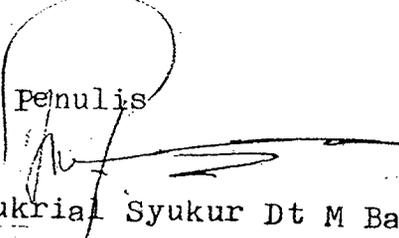
Haluan
dibaca
langsung
pemerintah

Pasaman ke Jakarta, melalui surat No. 136/1064/Tapum-99 tanggal 10 Agustus kemarin ditujukan kepada Mendagri Sunardi Hamid.

Hanya kab. Pasaman yang baru saja menanggapi tantangan Gubernur Sumbar agar kabupaten yang terlalu luas dimekarkan wilayahnya. Sedangkan Sawahlunto dan Sijunjung dan Kab. Solok yang sangat potensial memekarkan diri masih terlihat adem-adem saja. kata Asisten I Sekwilda Sumbar Drs. H. Rusdi Lubis ketika menjawab pertanyaan Haluan tentang kerjanya kemarin di Pasaman, katanya lagi akan memekarkan diri menjadi dua kabupaten yaitu Kab. Pasaman Barat dan Pasaman Timur. Perimbangannya dan Rusdi lagi terlihatnya kecerderungan yang sama terhadap pemekaran diri. Pemekaran diri dengan berakhlak sebagai tugas pemerintahan dan kemasayarakatan. Semuanya itu memerlukan tenaga yang banyak dan penyelesaian yang cepat terbuka dan menjawab keinginan masyarakat.

Menurutnya, angusulan ini sudah menghimpun aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pembuatan produk hukum baik dari pemda maupun dari DPRD setempat.

rentang sumber pendapatan, kedua kabupaten di Pasaman itu, akan mampu membiayai gerak pembangunannya itu berdasarkan perhitungan potensi alam dan ekonominya, sekaligus pemekaran ini akan memperpendek rentang pelayanan terhadap masyarakat. Kini rentang pelayanan ini sangat jauh, seperti jarak Lubuk Sikaping dengan empat kecamatan di wilayah Pasaman Barat mencapai 112 km dan 200 km, katanya lagi.

Penulis

Syukria Syukur Dt M Basa

Belum tergugah
Pemda Sumbar menilai, selain Pasaman, dua kabupaten lainnya memiliki potensi besar untuk dimekarkan, agar lebih lincah lagi membangun dirinya, yaitu Kab. Solok dan Sawahlunto Sijunjung. Kecamatan Sangir yang wilayahnya lebih luas dibanding Tanah Datar, sebetulnya sudah bisa dijadikan kabupaten sendiri, apa lagi didukung sumber daya alam dan antusiasme masyarakatnya, kata Rusdi yang juga mantan Sekwilda Solok itu.

Tapi baik kab. Solok maupun Kab. Sawahlunto Sijunjung belum lagi mengajukan permohonan pemekaran wilayahnya. Maunya Pemda Sumbar, ya diajukan ber sama-sama, agar Degdagri melakukan sekali proses, tapi sampai kemarin belum terlihat adanya tanda-tanda pengajuan dari kedua kabupaten itu, sehingga gubernur langsung menindak lanjut permohonan Pasaman ini, kata Kabiro Tata Pemerintahan Umumi, Zamzami kemarin.

Dari sumber lainnya, Kab. Solok kini diambang "kebimbangan" antara pemekaran wilayah, atau tetap bertahan satu kabupaten, menyusul adanya rencana Kodya Solok untuk memekarkan diri dengan mengambil sebagian wilayah Kabupaten Solok sendiri.

Kebimbangan itu juga disebabkan adanya rencana pemda Solok untuk memindahkan ibukota kabupaten dari Koto Baru ke Sukarami yang kini proses pemindahan sedang berlangsung. Jika dimekarkan, posisi Sukarami yang dulunya dinilai paling "di tengah", wilayah itu, akan menjadi buyar dan dinilai tidak tepat lagi. [M2S].

Jumlah total penduduk:
4 kec. Wil. Solok Selatan
200.761 jiwa

Muara Labuh, Des. (Haluan). -

PENASEHAT BP2KS2 Drs. H. Mudjadid Dulwathan SH. Mh. MBL mengatakan pengesahan 3 kabupaten baru yang dimekarkan untuk daerah Sumbar selain kabupaten Solok Selatan juga Pasaman Barat dan Damas Raya sampai saat ini masih menunggu dari presiden RI Megawati untuk di sanangkan sekaligus penanda tanganan surat keputusan bagi kabupaten baru 21 lainnya diseluruh Indonesia .

Keterangan tersebut didapat Mudjadid dari hasil pertemuannya dengan Dirjen Depdagri Otonomi Daerah Untarto dikantornya di Jakarta baru-baru ini sehubungan dengan realisasi pemekaran 3 kabupaten baru didaerah Sumbar khususnya bagi kabupaten Solok Selatan .

Mudjadid menyampaikan kepada "Haluan" via telepon dari Jakarta Kamis (18/12) dimana masyarakat Solok Selatan juga dengan penuh harapan menunggu hasil keputusan dari Presiden RI Megawati tentang pemekaran kabupaten baru itu .

Kepada seluruh lapisan masyarakat Mudjadid menghimbau agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan, tanpa ada hal-hal yang negatif dapat menimbulkan perpecahan . Kita bersyukur bahwa pemerintah bersama DPR-RI melalui sidang paripurnanya 20 November 2003 lalu telah mengesahkan Undang-Undang tentang pemekaran kabupaten baru tersebut.

Kita tidak akan menyebut nagari atau kecamatan satu persatunya akan tetapi adalah Solok Selatan dari perjuangan semua komponen baik yang dirantau maupun dikampung halaman . Perjuangan kita secara bersama-sama tanpa mengurangi semua dukungan dari kabupaten induk dibawah pimpinan H. Gamawan Fauzi SH. MM bersama seluruh jajarannya termasuk DPRD Kab. Solok maupun DPRD Tk. I Sumbar serta Gubernur Sumbar memfasilitasi sampai kepusat .

Sedangkan untuk siapa yang akan menjabat Kepala Pemerintahan dikabupaten baru Solok Selatan ini kita akan serahkan kepada Gubernur dan Mendagri nantinya, kalau ada pihak tertentu yang mengiming-ngiming pejabat baru itu dapat kita sikapi dari kewenangan kita .

Sebaiknya kita serahkan saja kewenangan ini kepada Gubernur dan Mendagri siapa yang pantas menjadi pejabat baru di kabupaten baru ini, tokoh perantau diantaranya Muzani Syukur selaku Ketua Umum BP2KS2 di Jakarta tetap memberi dukungannya kata Mudjadid Penasehat BP2KS2 .

Sedangkan tokoh perantau Sabri Zakaria demi pembangunan Solok Selatan nantinya bersedia menearikan konsultan asing guna perencanaan tata kota ibu kabupaten Solok Selatan radius 60 Km, berapa biayanya siap membantunya diperkirakan 200 juta rupiah . (Yal)

DATA PEMEKARAN WILAYAH KAB.SOLOK KE -
WILAYAH SOLOK SELATAN .-

=====

Dasar Keputusan Mendagri Nomor : 132/78 tanggal 11 Agustus 1978 ; telah dikukuhkan Wilayah "Pembantu Bupati Solok Selatan " terdiri dari 4 daerah Kecamatan yaitu Lembah Gumanti, Pantai Cermin, Sungai Pagu, dan Sangir . Dalam wilayah ini termasuk 5 kecamatan Perwakilan diantaranya Perwakilan Pk.Rabaa (menjadi definitif diresmikan tanggal 31 Juli 1999), Perwakilan Pk.Selasa, Perwakilan Lb.Malako, Perwakilan Abai, dan Perwakilan Talang Babungo Lembah Gumanti .

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diperkirakan Pembantu Bupati tidak akan ada lagi termasuk dengan istilah Kota Administrasi.

Dari data keempat Kecamatan yang ada sekarang diantaranya untuk Kec.Lembah Gumanti dengan 1 KPK terdiri dari 7 buah Nagari dengan 26 buah Desa dengan 56.560 jiwa penduduk dengan luas daerah 723 Hektar, Kecamatan Sei.Pagu dengan 2 KPK terdiri dari 2 Nagari terdiri Pasir Talang dan Kota Baru dengan 38 buah Desa dengan penduduk 62.736 jiwa dengan luas 146.820 Hektar, sedangkan Kecamatan Pantai Cermin terdiri 2 Nagari dengan 12 buah Desa serta 22.246 jiwa penduduk dengan luas 36 Hektar .

Untuk Kecamatan Sangir : 2 KPK dengan 7 Nagari dan 29 buah Desa memiliki penduduk sebanyak 59.519 jiwa dengan wilayah seluas 187.800 Hektar didukung 6 perkebunan Swasta Nasional masing-masing kebun teh PT. Mitra Kerinci, kebun kelapa sawit PT.TKA, kebun sawit PT.Bina Pratama termasuk kebun-karet PTP. 12, kebun teh PT.Golden Arm dan kebun teh PT.Pekonina Baru (Huberta-Liki).-

Potensial lain dari data wilayah Solok Selatan dimana penduduk juga memiliki lahan pertanian sawah dan ladang, sementara lahan-lahan per tambangan masih banyak yang dapat diolah sehingga potensi sebagai income daerah baik yang terdapat di kec.Lembah Gumanti maupun didaerah kecamatan Sangir sendiri .

Masing-masing kecamatan juga didukung dengan beberapa buah pasar tempat pemasaran maupun perseediaan kebutuhan bagi penduduk setempat dengan sarana perhubungan cukup lancar jalan aspal beton untuk antar kecamatan sementara jalan poros desa telah dimiliki .

Sarana lain sebagai pendukung penerangan listrik PT.PLN memasuki pedesaan, air bersih PAM, Telepon termasuk sarana perbankan Bank Nagari (BPD) dan BRI .

Dibidang pendidikan masing-masing daerah kecamatan terdapat SMU untuk tingkat SLTA, SLTP berikut beberapa buah Mdrasah baik MAN maupun MTSN .Sedangkan di Kecamatan Sei.Pagu memiliki Unitas diantara Tamsis dan STAIN Syekh Maulana Syoufi .

Daerah Kabupaten Solok sekarang terdiri dari 13 Kecamatan dengan 11 buah KPK serta 256 Desa dan 78 Nagari dengan jumlah penduduk sebanyak 479.357 jiwa di Wilayah seluas 7.084.200 Hektar .

Dari hasil pembicaraan dengan Bupati Solok Gamawan Fauzi.SH dirumah kediamannya pada hari Jum'at malam tanggal 16 Juli 1999 menyampaikan kepada Wartawan Haluan Syukrial Syukur antara lain bahwa Gubernur Sumbang "Duniya" pernah menanyakan " Bagaimana tentang Kab.Solok, apakah ada rencana untuk pemekaran" . Sementara Bupati belum dapat memberikan jawaban, terkecuali tergantung dari aspirasi masyarakat dari bawah nantinya , kata Bupati . *(Syukrial Syukur)*



*Ketua P2KS2 Prof. Armen Mukhtar menyampaikan paparannya tentang pemekaran Kab. Solok Selatan di Kantor Gubernur Sumbar Th. 2001
Foto : Syukrial Syukur*



Pejabat Gubernur Sumbar Dumija bersalaman dengan Ketua Humas P2KS2 Syukrial Syukur se usai pertemuan dengan Pengurus P2KS2 di Kantor Gubernur Sumbar di Padang. Foto : Syukrial Syukur / Dokumentasi P2KS2



Anggota Masyarakat dari Kec. Sungai Pagu menyampaikan aspirasinya di depan gedung DPRD Kab. Solok di Kota Baru Solok, disaat sidang DPRD berlangsung pembahasan Pemekaran Kab. Solok Selatan. Foto Syukrial Syukur



Beberapa Tokoh Masyarakat Kec. Sungai Pagu hadir dan serius mengikuti sidang DPRD Kab. Solok Tentang Pembahasan Pemekaran Kab. Solok Selatan. Foto Syukrial Syukur



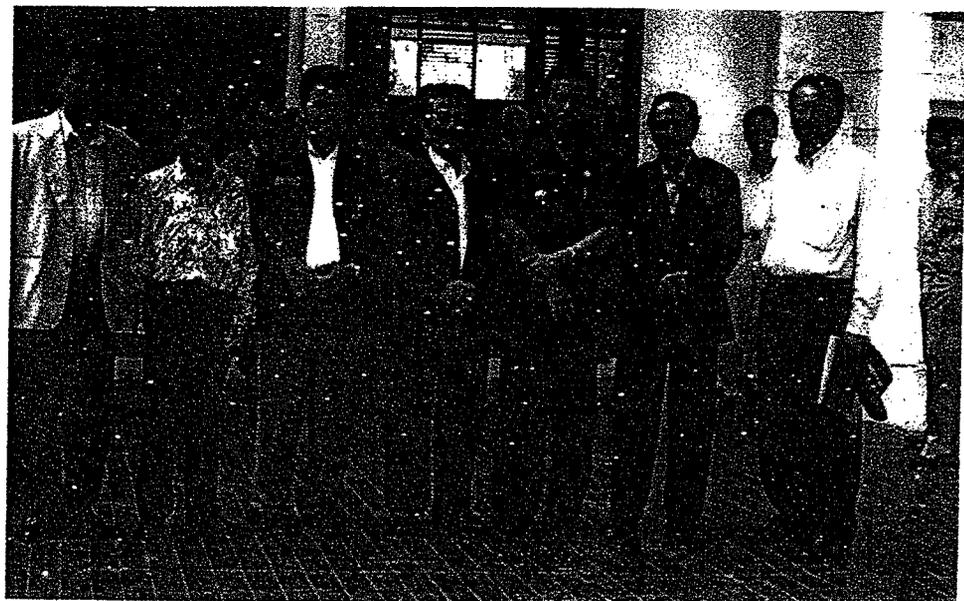
Tokoh Masyarakat Pengurus P2KS2 yang antara lain hadir pada acara pertemuan dengan Otda Depdagri turun kelapangan pemekaran Kab. Solok Selatan Th. 2001. Foto Syukrial Syukur



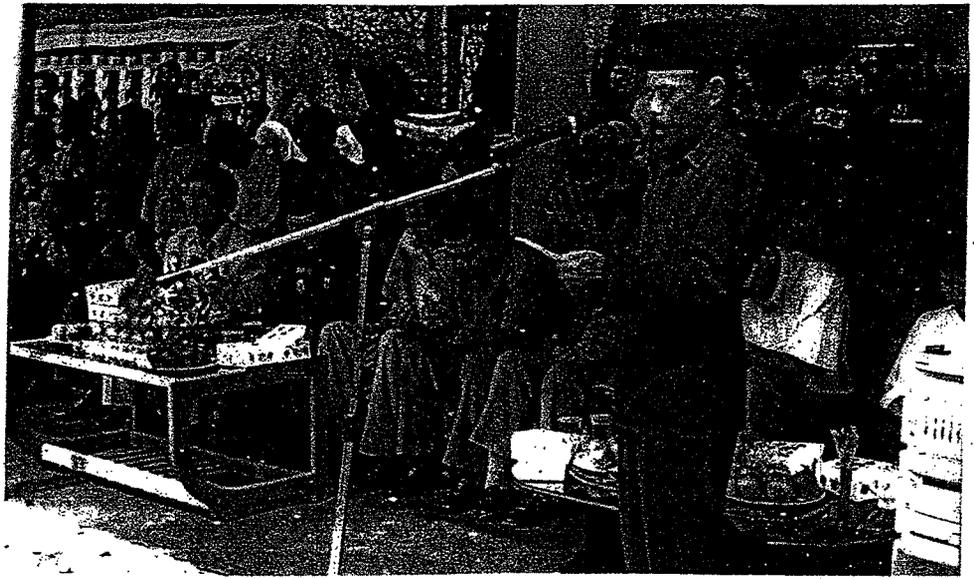
Pertemuan di Aula Kantor Bupati Solok dan Drs. Bustamar Menyampaikan sambutannya mewakili Pemda Kab. Solok dalam menyikapi aspirasi masyarakat tentang Pemekaran Kab. Solok Selatan. Foto Syukrial Syukur



Pertemuan di Aula Kantor Bupati Solok, dimana Prof. Armen Mukhtar Ketua P2KS2 memberikan paparannya tentang pemekaran Kab. Solok Selatan. Foto Syukrial Syukur



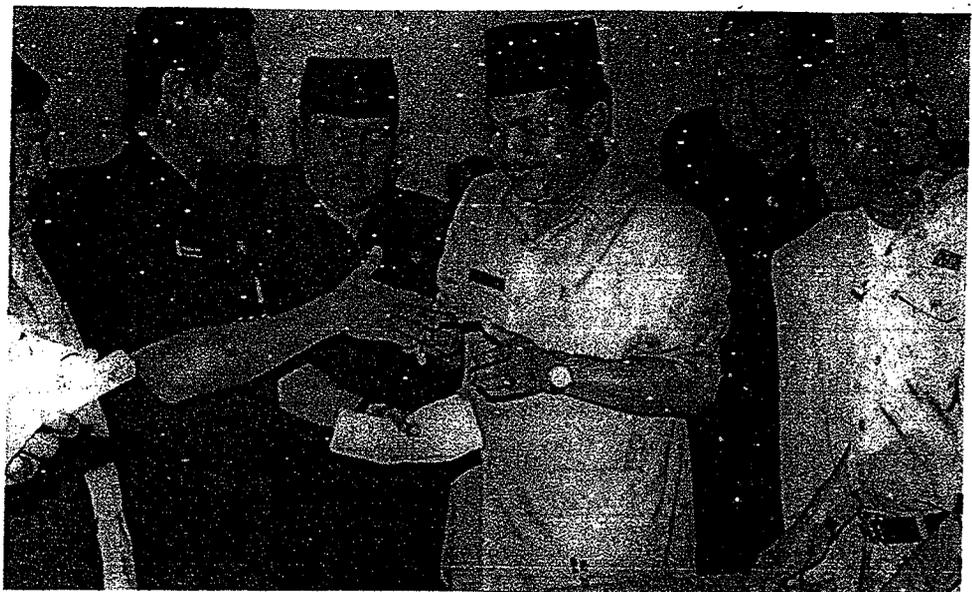
Bupati Solok Gamawan Fauzi berfoto bersama dengan Wartawan Anggota PWI Kab. Solok, selesai acara Ketok Palu Persetujuan Pemekaran Kab. Solok Selatan di Gedung DPRD Kab. Solok di Kota Baru Solok. Foto Dokumen P2KS2



Pembacaan Do'a se usai pertemuan dengan Kepala Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri R.I di depan Kantor Camat Sangir di Lubuk Gadang. Foto Syukrial Syukur



Sidang DPRD Kab. Solok dalam hearing dengan pengurus P2KS2 di Kantor DPRD Kab. Solok di Kota Baru Solok. Foto Syukrial Syukur



Selesai Sidang DPRD Kab. Solok Persetujuan tentang Pemekaran Kab. Solok Selatan, Bupati Solok Gamawan Fauzi, SH bersalaman dengan Ketua DPRD H. Saaduddin di saksikan beberapa orang anggota Dewan di Kantor DPRD di Kota Baru Solok. Foto Syukrial Syukur



FOTO BERTITIK: Azmir Dajay, Paksi foto bertitik dengan tempur tekda di dalam foto di Solok Selatan. Dari kiri ke kanan: Paksi, Syahid, dan Azmir Dajay. Foto: Syahid, Syahid dan Azmir Dajay.

**BADAN PENGGERAK PEMBENTUKAN KABUPATEN
SOLOK SELATAN (BP2KS2)**

Padang, 24 September 2002

Kepada Yth.
Bapak/Ibu

Spesial Sekur D. Hris Basri

~~Anggota DPR-D~~/Fungsionaris Partai Politik

Kabupaten Solok Bagian Selatan
di

Tempat

Perihal : *Undangan Rapat*

Dengan hormat,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Pengurus IKASUPA Riau No. 03/IKASUPA/2002 tanggal 28 Agustus 2002, tentang Pembentukan dan Pemekaran Kabupaten Solok Selatan, bersama ini kami mengundang Bapak untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : *MINGGU, 29 September 2002*
Jam : *12.00 s/d. selesai*
Tempat : *Restoran MIRAMA - PADANG*
Acara : Pembahasan Surat IKASUPA Riau No. 03/IKASUPA/2002 bersama BP2KS2 dan DPR-D utusan Solok Selatan

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

**BADAN PENGGERAK PEMBENTUKAN KABUPATEN
SOLOK SELATAN**

DR. ARMEN MUCHTAR

DR. ARMEN MUCHTAR
Ketua Umum



IR. MUSRIL KUSAI

IR. MUSRIL KUSAI
Sekretaris Umum

Sekretariat

Jalan Ikhlis IV No. 1
Andalas Barat Padang
Telp. (0751) 29720

AGENDA RAPAT KOORDINASI BPZKS2 DI PADANG, 29 SEPTEMBER 2002

- I. Laporan Panitia BPZKS2 Tentang Status Pemekaran Kab. Solok Sampai Saat ini
- II. Pembahasan Surat (SK) IKASUPA RIAU No. 03 / IKASUPA / 2002
- III. Persiapan Pendampingan TIM INDEPENDEN / Observasi Lapangan dari Jakarta Ke. Kab. Solok
- IV. Hal-hal yang perlu dibicarakan / dibahas

Humas Dokumentasi
Syukurati Syukur

Pimpinan Rapat BPZKS2
Ir. MUSRIL KUSAI

I. Laporan Kondisi Terakhir Status Pemekaran Kab. Solok

1. 23 Agustus 2002 => Usulan Pemekaran Kab. Solok ke Depdagri oleh Gubernur Sumbar

2. 30 Agustus 2002 => Loby BP2KS2 ke Direktur Penataan Kabupaten / Kota

3. 5 September 2002 => Audensi BP2KS2 dgn Menteri Dalam Negeri bersama tokoh masyarakat Solsel di Jakarta
*lata keendagan
Udara perkyatan sudah
cukup akan dipneses*

4. 12 September 2002 => Pengelompokan Pengusulan yang Perlu Justifikasi Mendagri - Komisi II DPR-RI

4.1. Kabupaten Buton

2. Kab. Sumbawa

3. Kab. Lingga

4. Kab. Taja Uma-Uma

5. Kab. Minahasa

6. Kab. Kalaka

7. Kab. Melvin / Kalbar

8. Kab. Solok

5. 18 September 2002 => BP2KS2 dgn Tokoh masyarakat Solsel melakukan Pertemuan dgn wakil ketua DPR-RI (Bp. Sutardjo Suryoburno)

6. 20 September 2002 => Surat wakil ketua DPR-RI ke Komisi II DPR-RI tentang Pembahasan Pemekaran Kab. Solok

II. Pembahasan Surat SK. IKASUPA RIAU NO. 03/IKASUPA/2002

III. Persiapan Pendampingan TIM INDEPENDEN / observasi lapangan dari Jakarta

→ TIM INDEPENDEN :

1. Depdagri
2. Dep. Keuangan
3. Dep. Hankam
4. Meneg. PAM
5. Menesneg
6. Bappenas
7. Pengkajian (VI + Cruise)
8. Sekjen DDM
9. Ditjen Otoda
10. Ditjen PUM
11. Ditjen Kesbang
12. Ditjen Bangda
13. KPU
14. Bakorsultanas

IV. Hal-hal yang perlu dibicarakan / dibahas

Humas / Dokumentasi

Syukriat Syukur

Pimpinan Rapat BP2KS2,

Ir. MUSRIL KUSAI

BADAN PENGGERAK PEMBENTUKAN KABUPATEN SOLOK SELATAN (BP2 KS2)

++++

SURAT MANDAT No. 013/BP2KS2-PDG/IX/2002

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Badan Penggerak Pembentukan Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2), Memberikan Mandat/Kuasa kepada Nama-nama yang tercantum dibawah ini :

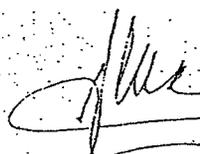
No	Nama	Jabatan dalam BP2KS2	Keterangan
1	Ir. Musril Kusai	Sekretaris Umum	
2	<i>Syaiful Anwar</i> Syarifuddin	Ketua Perencanaan dan Kebudayaan	

Sebagai Pemimpin Team dan Wakil Pimpinan Team dalam rangka menghadiri Acara dengar pendapat antara tokoh masyarakat Solok Selatan dengan Komisi II DPR-RI di Jakarta pada tanggal 18 September 2002, tentang pemekaran Kabupaten solok.

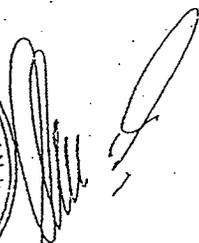
Demikianlah surat mandat ini kami buat untuk dapat digunakan seperlunya.

Badan Penggerak Pembentukan Kabupaten

Solok Selatan


DR. ARMEN MUCHTAR
Ketua Umum




Ir. MUSRIL KUSAI
Sekretaris Umum

Secretariat :
Muara Labuh : Jalan Rawang 18
Telp. (0755) 70072

Padang : Jalan Ikhlas IV No. 1
Andalas Barat Padang
Telp. (0751) 29720

Jakarta : Pembina Graha 2 th, Floor
27 D Jalan DI. Panjaitan 45,
Jakarta 13350
Telp. (021) 8560521
Fax. (021) 8560521

Rapat Pembentukan Kabuposen & Indonesia

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
SANDI DAN TELEKOMUNIKASI

FORMULIR BERITA

Registrasi Nomor :

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT
DARI	MENDAGRI		
UNTUK	YTH. 1. SDR. GUB. NAD DI BANDA ACEH 2. SDR. GUB. SUMUT DI MEDAN 3. SDR. GUB. SUMBAR DI PADANG 4. SDR. GUB. SUMSEL DI PALEMBANG 5. SDR. GUB. RIAU DI PEKANBARU 6. SDR. GUB. BENGKULU DI BENGKULU 7. SDR. GUB. NTB DI MATARAM 8. SDR. GUB. SULTENG DI PALU 9. SDR. GUB. SULTRA DI KENDARI 10. SDR. GUB. SULUT DI MANADO 11. SDR. GUB. KALBAR DI PONTIANAK 12. SDR. GUB. MALUKU DI AMBON 13. SDR. GUB. PAPUA DI JAYAPURA U.P. SEKDA		
TEMBUSAN	1. YTH. IBU SEKJEN DEPDAGRI 2. YTH. BPK DIRJEN OTDA (Sbg LAPORAN) 3. YTH. SDR. BUP. ACEH TENGAH, TOBASA, DELI SERDANG, SAWAHLUNTO, SIJUNJUNG, SOLOK, PASAMAN, OKU, OKI, KEP. RIAU, REJANG I BONG, SUMBAWA, POSO, BUTON, KOLAKA, MINAHASA, SINTANG, SANGGAU, MALUKU TENGGARA, DAN BIAK NUMFOR		

Tanggal/Waktu :
Jumlah Perkataan :

*29 kabuposen
dan utuk
di mlokoran -
ini 13 propinsi.*

KLASIFIKASI : SEGERA T. 094/1305/OTDA

SHB DGN PROSES PEMBENTUKAN 22 CALON KAB Sbg DAERAH OTONOM BARU KMA DH DIBERITAHUKAN KPD SDR HAL SBB TTK DUA

SATU TTK DUA DALAM RANGKA PERSIAPAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN DRAFT RUU BAIK YG AKAN DILAKSANAKAN DGN LINTAS DEPT MAUPUN DGN KOMISI II DPR-RI KMA DIMOHON KEHADIRAN SDR. BUPATI DAN KETUA DPRD PADA MASINGS DRH PEMEKARAN UTK HADIR DLM RAPAT YG AKAN DILAKSANAKAN PD HARI JUMAT TGL 19 SEPTEMBER 2003 PUKUL 19,00 WIB KMA TEMPAT DI HOTEL MERCURE JLN HAYAM WURUK NO 123 JAKARTA TTK KMA

DUA TTK DUA GUNA MEMUDAHKAN KOMUNIKASI GARING KOORDINASI ANTARA PUSAT DAN DRH DLM PROSES PEMEKARAN/PEMBENTUKAN CALON KAB KMA DIHARAPKAN SDR BUPATI DARI MASINGS DRH PEMEKARAN MENUNJUK SALAH SATU PJBT YG BERTUGAS MENGURUSI PROSES PEMBENTUKAN KAB DRH OTONOM BARU BAIK PENGURUSAN KELENGKAPAN ADM MAUPUN TEKNIS SAMPAI DGN PEMBAHASAN DRAFT RUU MENJADI BERTUGAS Sbg LEISON OFFICER TTK KMA

TIGA TTK DUA BIAYA PERJALANAN DAN AKOMODASI SELAMA DI JKT DIBEBANKAN KPD MASINGS DAERAH TTK KMA

EMPAT TTK DUA UTK KONFIRMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI DEPDAGRI CQ DJEN OTDA TELP 021 3440306 DAN 021 3453492 TTK KMA

LIMA TTK DUA DUM DAN MENDAPATKAN PERHATIAN DLM PELAKSANAAN TTK HBS

MENDAGRI

Tanggal waktu pembikinan 15 - 9 - 2003

PENGIRIM : DEPDAGRI
NAMA : H. TRIYUNI SOEMARTONO, MM
Jabatan : DIRJEN OTDA
T. Tangan :



No. Code	Waktu		Lalu Lintas	Parat Operator
	Terima	Kirim		

6. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4036);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Nomor 04/DPRD/X-1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Solok;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok tanggal 29 Juli 2002;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Menyetujui Pemekaran Daerah Kabupaten Solok menjadi Dua Daerah Kabupaten yang terdiri dari :

1. Kabupaten Solok (Daerah Kabupaten Induk) dengan wilayah daerah meliputi 14 (empat belas) kecamatan yang terdiri dari :

- 1) Kecamatan Kubung.
- 2) Kecamatan X Koto Diatas.
- 3) Kecamatan X Singkarak
- 4) Kecamatan IX Koto Sungai Lasi
- 5) Kecamatan Bukit Sundi.
- 6) Kecamatan Gunung Talang.
- 7) Kecamatan Payung Sekaki.
- 8) Kecamatan Lembang Jaya.
- 9) Kecamatan Lembah Gumanti.
- 10) Kecamatan Pantai Cernin.
- 11) Kecamatan Junjuang Siriah.
- 12) Kecamatan Danau Kembar.
- 13) Kecamatan Hiliran Gumanti.
- 14) Kecamatan Tigo Lurah.

2. Kabupaten Solok Selatan (Daerah Kabupaten Baru) dengan wilayah daerah meliputi 5 (lima) kecamatan yang terdiri dari :

- 1) Kecamatan Koto Parik-Gadang Diateh.
- 2) Kecamatan Sungai Pagu
- 3) Kecamatan Sangir
- 4) Kecamatan Sangir Jujan
- 5) Kecamatan Sangir Batang Hari;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Solok
Pada tanggal 29 Juli 2002


KETUA

=Drs. H. SA'ADUDDIN AS, CH, BGD=

Tembusandisampaikan kepada Yth:

1. Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Bupati Solok di Kayu Aro – Sukarami.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

Nomor : PW.006/5222/DPR-RI/2002
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian aspirasi

Jakarta, 20 September 2002

KEPADA YTH.

SDR. PIMPINAN KOMISI II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI

JAKARTA

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Pimpinan DPR-RI pada tanggal 18 September 2002 telah menerima satu delegasi dari DPP Lembaga Perlindungan HAM Independen dan Badan Pengurus Pembentukan Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2) guna menyampaikan usulan pemekaran wilayah Kabupaten Solok Selatan.

Dalam pertemuan tersebut delegasi antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka menanggapi aspirasi, tuntutan dan harapan masyarakat, maka Badan Penggerak Pembentukan Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2) menyampaikan permohonan pembentukan wilayah Kabupaten Solok Selatan.
2. Terhadap usul pembentukan Kabupaten Solok Selatan telah dilakukan kajian yang mendalam dan mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, pemerintah daerah dan badan legislatif, sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - a. DPRD Kabupaten Solok telah memberikan persetujuan Pemekaran Daerah Kabupaten Solok menjadi dua kabupaten dalam rapat paripurnanya tanggal 29 Juli 2002 dengan No. 08 tahun 2002 dan keputusan tersebut telah diteruskan Bupati Solok kepada Gubernur Sumatera Barat tanggal 30 Juli 2002 dengan surat No. 100/359/TP-2002.
 - b. Keputusan DPRD Propinsi Sumatera Barat No. 12 SB/2002 tentang persetujuan DPRD Propinsi Sumatera Barat terhadap daerah Kabupaten Solok menjadi 2 Kabupaten tanggal 22 Agustus 2002.
 - c. Surat Gubernur Sumatera Barat No. 12/696/Pem-2002 tanggal 22 Agustus 2002 kepada Menteri Dalam Negeri RI dengan tembusan Presiden RI, Ketua DPR-RI, DPRD Propinsi Sumatera Barat, Bupati Solok dan Ketua DPRD Kabupaten Solok.

Sehubungan dengan itu dan mengingat aspirasi ini telah mendapat dukungan dari tokoh masyarakat dan telah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Pemerintah Daerah maupun DPRD, dengan ini Pimpinan DPR-RI meneruskan aspirasi delegasi kepada Komisi II DPR-RI untuk memproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme Dewan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian harap maklum, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



WAKIL KETUA DPR-RI/KORPOL,

H. SOETARDO SOERJOGOERITNO, B.Sc.

Tembusan:

1. Yth. Sdr. Pimpinan DPR-RI;
2. Yth. Sdr. Sekjen DPR-RI;
3. Yth. Sdr. Ketua DPP LP HAM Independen;
4. Yth. Sdr. Ketua BP2KS2.

Pasaman Barat, Damas Raya dan Solok Selatan Penuhi Persyaratan

Jntuk Dimekarkan Menjadi Kabupaten Baru di Sumbar

Padang, Sept (Haluan). TIGA daerah yang akan dimekarkan menjadi kabupaten di Sumbar, masing-masing Pasaman Barat, Damas Raya dan Solok Selatan tetap dinyatakan telah memenuhi persyaratan, selanjut dipersiapkan dalam pembahasan draft RUU guna dibahas oleh Komisi II DPR-RI yang bersamaan dengan 19 daerah lain yang ikut dimekarkan. Pernyataan ini telah disampaikan pada Rapat Persiapan Penyusunan/Pembahasan Draft RUU Pembentukan 22 Daerah Otonom Baru di Hotel Mercure Jl. Hayam Wuruk No 123 Jakarta

Jumat (19/9) yang dihadiri Bupati, Ketua DPRD serta Lesson Officer (LO) mewakili 22 Kabupaten yang akan dimekarkan. Rapat yang dibuka Sekretaris Dirjen Otda Depdagri Ny. Nutri sedangkan pimpinan rapat Kasubdin Pemekaran Otda Depdagri Eri Yunci. Dari Solok hadir Wabup Drs. Elfi Shalan, AMPT dan Ketua DPRD Drs. H. Saaduddin diidam pingi Drs. H. Syafrizal Kepala Perwakilan Sumbar di Jakarta serta Syukrial Syukur Dt. Majo Basa dari Solok Selatan.

Rapat yang dibuka dengan dialog masing-masing calon

Kabupaten dapat menyampaikan usul diantaranya sebagai mana disampaikan Wabup Solok Dr. Elfi Shalan meminta melalui Depdagri bahwa akhir September 2003 sudah dapat ditetapkan Draft RUU Pembentukan 22 Daerah Otonom Baru ini sedangkan berbagai data lain dapat diberikan kepada masing-masing daerah Kabupaten yang akan dimekarkan menjadi pedoman selanjutnya.

Sementara beberapa calon Kabupaten lainnya juga mengusulkan hal yang sama termasuk mengharapkan kepada

pihak pemerintah melalui Depdagri nantinya agar biaya biaya pemekaran ini ditetapkan melalui APBN. Dari rencana Pembahasan Draft RUU di Komisi II DPR-RI semula direncanakan tanggal 24/9 namun masih tetap menunggu kepastian berikutnya sebagai ditetapkan nantinya oleh DPR-RI sendiri kata Kasubdin Pemekaran Otda Depdagri Eri Yunci pada akhir rapat ini (Yal)

Kabupaten Baru di Pasaman Barat Disahkan Oktober

Padang, Okt. (Haluan). DITENTUKAN tiga kabupaten baru di Sumbar, yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Damas Raya akan dibahas oleh Komisi II DPR-RI, Depdagri pemerintah daerah tanggal 28 Oktober nanti. Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menunggu hasil pemekaran wilayah tersebut memberi waktu lambat (dead line) sampai tanggal 28 Oktober. Anggota Komisi II DPR-RI Patrialis Akbar, SH menjawab pertanyaan "Haluan", Selasa (10), menjelaskan, pada prinsipnya pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru tersebut tidak ada masalah. "Insya Allah, sudah pasti terwujud dan bisa dimasukkan ke dalam Pemilu 2004", kata anggota DPRD dari daerah pemilihan Sumbar itu. Dijelaskan Patrialis, Komisi

II DPR-RI bersama Departemen Dalam Negeri serta dari pemerintah daerah akan membahas soal pemekaran tersebut tanggal 28 bulan ini.

"Jadi tidak perlu khawatir tidak dimasukkan dalam perhitungan sebagai daerah pemilihan pada Pemilu 2004 karena sudah kesepakatan," jelas Patrialis.

Sementara itu Media Adviser KPU Djohermansyah Djohan mengatakan bahwa KPU memberi batas waktu untuk menuntaskan pemekaran wilayah tersebut sampai tanggal 28 Oktober.

"Kalau belum tuntas maka tidak bisa dimasukkan dalam perhitungan daerah pemilihan," jelas Djohermansyah.

Sementara itu laporan data terbaru P4B yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS) ke KPU, membuktikan jumlah penduduk Sumbar karena sebelumnya terjadi kesalahan dalam penyalinan. Jumlah penduduk Sumbar seharusnya 4.446.697 yang sebelumnya tersalin 4.466.897. (Yal)

Tiga Kabupaten Baru Sumbar November Ini akan Diresmikan

Padang, Nop. (Haluan). TIGA kabupaten baru di Sumbar akan diresmikan akhir November 2003, setelah panitia kerja (Panja) legislatif (DPR-RI) dan eksekutif awal November menetapkan jadwal persiapan rapat paripurna pembahasan RUU Pemekaran Kabupaten Baru itu oleh Komisi II DPR-RI.

Asisten I Sekda Prov Sumbar, Drs Yulrizal Baharin MSI, kepada ANTARA di Padang, Jumat, mengatakan rapat tersebut segera dilakukan mengingat amanat presiden (Ampres) mengenai RUU pembentukan kabupaten baru di Indonesia itu sudah ditandatangani Presiden Megawati Soekarno Putri pada 27 Oktober 2003.

"Dengan lahirnya UU Pembentukan Kab Baru tersebut maka diharapkan pada akhir November tahun ini tiga kabupaten baru di Sumbar seperti Pasaman Barat, Solok Selatan, dan Sawahlunto. Sijunjung segera diresmikan," ujarnya.

Menurut dia, pembentukan kabupaten itu penting dimaksudkan untuk memberdayakan potensi yang ada sekaligus mampu memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Dengan terbentuknya tiga kabupaten baru itu, kata Yulrizal maka pelayanan kepada masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan baik dan cepat karena ibu kota kabupaten terletak makin dekat hingga ke daerah yang terletak paling jauh dari pusat ibu kota kabupaten lama.

Menurut dia, rencana pembentukan tiga kabupaten di Sumbar —bersamaan dengan 19 kabupaten lainnya di tanah air— itu sudah disetujui Presiden RI Megawati Soekarno Putri, antara lain karena telah memenuhi persyaratan sebagai kabupaten dengan indikator bidang ekonomi, luas daerah potensi SDA dan SDM

nya serta jumlah penduduk.

Sementara itu, 19 calon kabupaten baru yang juga telah disetujui presiden itu adalah calon Kabupaten Serdang Bata-gai dan Samosir (Sumut), Kab Lingga (Riau), Kab Minahasa Utara (Sulut) dan Kalimantan Inderagiri Hilir dan Maluku.

Ia mengatakan, kabupaten baru itu nantinya akan dipimpin oleh pejabat bupati berdasarkan SK mendagri. Khusus untuk pengisian anggota DPRD tiga daerah itu akan ditentukan setelah Pemilu 2004 dengan sistem penetapan berdasarkan daerah asal.

Yulrizal memastikan pembentukan kabupaten tersebut mendesak juga karena didorong oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingat alokasi anggaran untuk KPU di seluruh Indonesia termasuk rencana 22 kabupaten yang akan dimekarkan itu sudah dialokasikan.

Calon kabupaten Pasaman Barat dengan ibukota Simpang Empat, dengan luas daerah 3.887, 77 km2 terdiri atas tujuh kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 311.306 jiwa.

Calon Kabupaten Solok Selatan dengan ibukota Muaro Labuh dengan luas daerah 3.346,2 km2 yang terdiri atas lima kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 123.542 jiwa.

Sedangkan calon kabupaten Damasraya dengan ibukota Pulau Punjung, dengan luas daerah mencapai 2.961, 13 km2 terdiri atas empat kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 158.666 jiwa.

"Selain memiliki kesamaan potensi SDA hutan kayu dan perkebunan sawit yang terdapat di Damasraya dan Solok Selatan, Pasaman juga memiliki potensi kelautan yang cukup besar, hingga kini belum dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya. (Yal)

Bupati Gamawan Fauzi Gembira, Kabupaten Solok Selatan Disahkan :

3 Kabupaten Baru di Sumbar Disahkan DPR

*** Pemerintah Diminta Undangkan 24 Daerah Otonom Baru**

Jakarta, November (Haluan).

UNDANG-undang pembentukan tiga daerah otonom baru di Sumbar, yaitu Kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat dan Damas Raya telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI, Kamis (20/11).

Dengan disahkannya pembentukan ketiga daerah otonom baru tersebut, dengan demikian maka di Sumatera Barat sekarang terdapat 19 kabupaten/kota.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno dan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno, seluruh fraksi-fraksi dalam pemandangan umumnya me-

nyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan daerah otonom baru itu menjadi undang-undang.

Pembentukan daerah otonom baru itu sebanyak 23 kabupaten yang tersebar di 13 provinsi. Tiga diantaranya adalah kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat dan Damas Raya.

Suasana sidangpun bergemuruh yang selalu diwarnai tepuk tangan pengunjung si-

ang. Ruang sidang penuh sesaknya dan sebagian terpaksa menyaksikan jalannya sidang melalui pesawat televisi yang disediakan sekretariat jenderal DPR.

Bahan banyak anggota DPR yang mengalah, karena tempat

diduk mereka sudah diisi oleh para pengunjung. Pasalnya, wakil dari setiap daerah pemekaran menghadiri sidang yang cukup bersejarah bagi daerah mereka masing-masing.

Kewenangan Gubernur Ketua Komisi II Teras Nabersambung ke hal XI Kol. 5

Sambungan halaman 1 3 KABUPATEN.....

rang dalam sambutannya dalam sidang paripurna tersebut mendesak pemerintah untuk segera mengundangkan UU Pembentukan 24 daerah otonom baru tersebut karena berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2004.

"Kami meminta pemerintah untuk bisa mengundang pembentukan 24 daerah otonom baru ini awal Desember nanti dan minggu pertama Desember seluruh daerah otonom baru itu sudah bisa diresmikan," kata Teras Narang.

Sebab, kata Teras Narang, dalam pembahasan pembentukan daerah otonom baru itu antara Panja Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), peresmian 24 daerah otonom baru itu harus paling lambat minggu pertama Desember sehingga tidak mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu 2004.

Sesuai kesepakatan Panja Komisi II dengan KPU, jelas Teras Narang, di daerah hasil pemekaran tersebut tidak dibentuk KPUD, hanya dibentuk semacam sekretariat. Sedangkan tugas pelaksanaan Pemilu di kabupaten baru itu dilaksanakan oleh KPUD kabupaten induk.

Sedangkan Mendagri Hari Sabarno dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah akan secepatnya mengundangkan UU pembentukan 24 daerah otonom tersebut.

"Jika semua penjabat bupati dari daerah otonom baru ini sudah ditetapkan maka akan difesmikan secepatnya secara bersama-sama di Jakarta," jelas Hari Sabarno.

Tentang Penjabat bupati yang akan diangkat, Hari menegaskan bahwa yang mengusulkan itu masih kewenangan pemerintah bukan partai politik.

"Yang berwenang mengusulkan Penjabat Bupati daerah otonom baru ini adalah gubernur yang dikoordinasikan dengan bupati kabupaten induk," jelas Mendagri.

Bupati Solok

Bupati Solok H. Gamawan Fauzi, SH, MM sangat bergembira dengan telah disahkannya pembentukan kabupaten Solok Selatan bersama 23 kabupaten/kota lainnya di Indonesia dalam sidang Paripurna DPR RI, Kamis kemaren.

Bupati Gamawan Fauzi mengatakan kabupaten Solok sebagai kabupaten Induk akan membantu kabupaten Solok Selatan, agar kabupaten itu cepat tumbuh dan berkembang mengikuti kabupaten-kabupaten lainnya.

Kita akan membimbing Solok Selatan kata Gamawan Fauzi, dan akan membantu dalam bidang materil dan moril. Bidang materil terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan rutin kabupaten Solok Selatan, sesuai dengan kemampuan kabupaten Solok. (SA/SY)

Tiga Kabupaten Baru di Sumbar Secara Syah Diresmikan Hari Ini

Muara Labuh, Nop. (Haluan).

TIGA Kabupaten baru di Sumbar secara syah akan diresmikan hari Kamis (20/11) setelah Panitia Kerja (Panja) Legislatif (DPR-RI) dan eksekutif sejak dua hari belakangan ini melaksanakan rapat Paripurna pembahasan Draft RUU Pemekaran Kabupaten Baru itu oleh Komisi II DPR-RI.

Asisten I Kantor Bupati Solok Drs. Syamsir Pane MM kepada "Haluan" melalui pembicaraan via telepon dari Jakarta Selasa malam (18/11) mengatakan pihaknya yang ikut menghadiri rapat tersebut bahwa ketiga Kabupaten Baru dimekarkan di Sumbar sekarang tidak ada lagi permasalahan dan semua sudah memenuhi persyaratan. Semua data daerah sudah dilengkapi termasuk dengan batas-batas wilayah termasuk semua persyaratan lain

sudah dilengkapi seperti untuk Kab. Pasaman Barat, Damas Raya di Kab. Sawahlunto Sijunjung dari Solok Selatan di kab. Solok maka hari ini Kamis (20/11) direncanakan pengukuhan palu terakhir peresmian nya bersamaan dengan 21 kabupaten Baru dimekarkan di Indonesia.

Menurut Syamsir Pane dari Rapat yang diadakan beberapa hari ini juga telah dihadiri dari perwakilan 3 kabupaten baru di Sumbar ini terutama dalam penggiring kalau sekiranya masih ada persyaratan yang akan dipenuhi dan Insya Allah semua sudah dilengkapi.

Sebelum ini juga sudah disetujui Presiden RI Megawati Soekarno Putri, antara lain karena sudah memenuhi persyaratan sebagai kabupaten dengan indikator bidang ekonomi, luar daerah, potensi SDA dan SDM

nya serta jumlah penduduk.

Bupati Solok ke Jakarta

Bupati Solok H. Gamawan Fauzi, SH.MM Rabu (19/11) berangkat ke Jakarta guna menghadiri peresmian Kabupaten Baru Solok Selatan ini sebagaimana yang disampaikan Bupati kepada "Haluan" sesuai berbuka bersama di rumahnya di Arosuka Sabtu lalu.

Menurut Bupati kita merasa bersyukur terwujudnya cita-cita perjuangan masyarakat selama ini terutama para tokoh masyarakat baik di kampung maupun di perantauan asal Solok Selatan. Pembentukan kabupaten itu penting dimaksudkan untuk memperdayakan potensi yang ada sekaligus mampu memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). (Yal)

SABTU, 22 NOVEMBER 2003

Jadi Tonggak Sejarah Perjuangan Masyarakat Solok Bagian Selatan

Muara Labuh, Nop. (Haluan).

TERWUJUDNYA Kabupaten Baru Solok Selatan setelah pengesahan RUU melalui Rapat Paripurna DPR-RI Komisi II dipimpin Sutarjo Wk.Ketua DPR-RI pada Kamis lalu (20/11) adalah merupakan tonggak sejarah perjuangan masyarakat Solok Selatan, kata Bupati Solok H.Gamawan Fauzi SH.MM

kepada "Haluan" via telepon dari Jakarta Kamis malam (20/11) sesuai menghadiri pengukuhan palu terakhir pengesahan Kabupaten Baru dibagian wilayah yang dipimpinnya itu.

"Karena itu saya telah menyampaikan kepada para tokoh perantau Solok Selatan di Jakarta waktu itu agar dapat *Bersambung ke hal IX Kol. 8*

Sambungan halaman 1

JADI.....

mengarang sebuah buku tentang perjalanan perjuangan Kabupaten Baru ini". Sebab ini suatu sejarah yang nantinya dapat diketahui para generasi muda bagaimana liku-liku perjuangan maka lahir Kabupaten Baru Solok Selatan ini kata Bupati dibalik gagang telepon.

Dikatakan, sejarah akan mencatat perjalanan yang cukup panjang dimana para pejuang tokoh masyarakat menyampaikan aspirasi mereka untuk dapat berdirinya sebuah Kabupaten baru di daerah ini.

Kita tidak akan menepuk dada sebagai pejuang akan

tetapi keberhasilan ini adalah berkat dukungan semua pihak mulai dari aspirasi masyarakat sampai kepada pihak pemerintah dari bawah sampai ke tingkat pusat termasuk para wakil-wakil rakyat di Kabupaten sampai ke pusat sekarang ini. Tinggal sekarang bagaimana kita mewujudkan pembangunan bagi sejahteranya masyarakat, tanpa mengabaikan persatuan dan kesatuan yang kokoh antara masyarakat di kampung halaman dan diperantauan.

Kita juga tidak lupa mengucapkan syukur kepada Allah kata Bupati menambahkan karena selain kita selama berusaha tidak lepas dari tuntunan Maha Pencipta Allah Subhanahu wata'ala. Dengan rasa syukur itu pulalah secara bersama nantinya kita akan berbuat terbaik bagi kemajuan Kabupaten baru ini dan tidak terlepas dari bimbingan serta dukungan kabupaten induk ucap Bupati mengakhiri. (Yal)

Wartawan "Haluan" Melaporkan :

"Wakil-wakil Rakyat" Menanggapi Positif !

Aspirasi Masyarakat dari Wilayah Solok Selatan
Hari Senin Ini Rakyat Menunggu Keputusan DPRD

(Haluan).

SIDANG PARIPURNA DPRD Solok Selatan semakin dekat waktunya dan menunggu penyetoran melalui sidang DPRD Kab. Solok proposal dari pihak Panitia BP2KS2 tanggapan positif dari 19 orang anggotanya yang menyampaikan tanggapan-

paripurna DPRD wakil Ketua Saltono didampingi ini dipimpin oleh pihak eksekutif Sekda Kab. So-

lok Drs. H. Syafril Khatib dan Panitia Pemekaran Kab. Solok Selatan (BPKS2) langsung alot di ruang sidang DPRD Kab. Solok di Koto Baru Jum'at (26/7). Sementara diluar gedung tidak kurang dari 300 orang anggota Masyarakat Solok Selatan sengaja datang mempergunakan 6 buah bus dan puluhan kendaraan pribadi secara tertib mendengarkan jalannya sidang, beberapa lembar spanduk tergantung di depan kantor Wakil

rakyat ini diantaranya bertuliskan "Masyarakat Solok Selatan Bertekad menjadi Kabupaten". Masyarakat yang datang ini dari 5 kecamatan masing-masing Sangir, Jujan, Sangir Batang Hari, Sangir, Sei. Pagu, dan Koto Parik Gadang Diatch, termasuk juga para perantau di beberapa kota dalam Sumbang termasuk para mahasiswa ikut bergabung dengan tertib di luar gedung ini.

Sidang paripurna DPRD Kab. Solok kali ini betul-betul menampilkan para wakil rakyat betul-betul telah menyikapi aspirasi masyarakat Solok Selatan yang sudah cukup lama berkeinginan menjadi sebuah Kabupaten dimulai sejak tahun 1956.

Beberapa anggota dewan yang menyampaikan tanggapannya setelah mendengar pemaparan proposal tentang pemekaran Solok Selatan menjadi sebuah kabupaten itu disampaikan Sekretaris BPKS2 Ir. Musril Kusai antara lain disampaikan Drs. Erizal Kasuma dari Fraksi PDI Perjuangan tegas-tegas sangat mendukung berdirinya Kabupaten Solok Selatan, apalagi perjuangan yang sudah cukup panjang dan lama dari para tokoh masyarakat Solok Selatan sudah sepantasnya disikapi secara positif sesuai dengan UU No.22 tahun 1999 bagi pemekaran suatu daerah.

Juga menyampaikan tanggapan dari Listo, BA dari FPG, Drs. Desra Ediwan (FPG), Nu syirwan (FPPP), Irwandi (FPAN), Nuzuar Said (FPAN), Abu Hanifah (FPBB), Ahmad Jati (FPPP), Nazar Dt. Rajo In tan (FPG), M.Sati Nurdin (FPK), Suhartoni SH dan Edi Salim Dt. Basa kesemuanya mengarah kepada tujuan yang sangat menyikapi aspirasi rakyat Solok Selatan kemudian mendukung berdirinya Kabupaten Solok Selatan.

Setiap tanggapan para anggota Dewan ini selalu mendapat tepuk tangan gemuruh diberikan para tokoh masyarakat Solok Selatan yang mengikuti jalannya sidang paripurna ini.

Maka dari kesepakatan bersama baik dari pihak Eksekutif maupun pihak legislatif termasuk Panitia BP2KS2 sidang paripurna DPRD Kab. Solok ditetapkan untuk dilanjutkan hari Senin (29/7) dan merupakan sidang terakhir penyetoran palu atas persetujuan berdirinya kab. Solok Selatan. (Yal).

Pengesahan Kabupaten Solok Selatan Disambut dengan Sukacita Semua Komponen Masyarakat

Muara Labuh, Nop (Haluan)

PENGESAHAN Kabupaten Solok Selatan disambut sukacita oleh semua komponen masyarakat baik di daerah induk maupun di bagian yang dimekarkan itu. Berarti babak baru sebuah Pemerintahan permanen untuk kawasan kabupaten Solok bagian selatan, setelah pengesahannya melalui Rapat Paripurna Komisi II DPR-RI tepatnya hari Kamis tanggal 20 Nopember 2003 di Jakarta.

Pengetapan Palu terakhir ini menjadikan tonggak sejarah perjuangan masyarakat sejak 50 tahun lalu, disaat umat Islam khususnya masyarakat Solok Selatan seminggu menjalankan Hari Raya Ied 1424 sibuk-sibuk menyambutnya berita "Kab. Solok Selatan datang pula pengesahannya.

Betul-betul suatu nikmat dan rasa syukur keluar dari mulut masyarakat baik dari unsur ninik mamak, pemuka adat dan agama, kaum masyarakat dan pemuda spontan berkumpul penuh wajah yang ceria dari hasil

pantauan. "Haluan" dilapangan di Muara Labuh dan Sangir sekitarnya.

Senada mereka telah menyampaikan rasa syukurnya atas peristiwa bersejarah bagi Kabupaten Solok itu, dari semua perjuangan mulai dari bawah masyarakat kampung dan perantau, Pemda kab. Solok dan Tingkat Provinsi Sumbar lebih lagi dukungan wakil-wakil rakyat dimulai dari DPRD Kab. Solok sampai DPRD Tk. Propinsi Sumbar lebih lagi penting dari pemerintah Pusat termasuk DPR-RI yang telah mengetuk palunya akan tercatat dalam sejarah lahirnya Kab. Solok Selatan sekarang.

Terwujudnya ini merupakan beban dan tanggungjawab berat bagi semua komponen yang ada dalam masyarakat, bagaimana daerah ini bisa maju menuju kesejahteraan masyarakat. Kalau hanya rasa syukur tanpa diikuti rasa kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan apa yang menjadi wujud nyata sekarang belum berarti kata tokoh

masyarakat muara Labuh Syukrial Sy. Dt, Majo Basa juga disampaikan dihadapan jemaah sholat Ied di Masjid Raya Psr Muara Labuh hari Selasa (25/11).

Dari suara-suara yang berkembang, agar orang yang akan ditunjuk untuk Pejabat Pemerintahan di Kab. Solok Selatan. Se karang betul-betul orang yang mau bekerja keras dan berkarya nyata dekat dengan masyarakat.

Segera Berbenah.

Bupati Solok H. Gamawan Fauzi SH.MM yang dimintai komentarnya sesuai sidang Paripurna pemekaran wilayah itu melalui telepon ke Jakarta menyebutkan bahwa dengan dibentuknya daerah Solok Selatan sebagai kab. baru harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah ini di masa mendatang. Sebagai kabupaten induk tidak terlepas tangan dan sesuai pesan Mendagri, Kab. Solok tentu akan tetap membantu perkembangan Solok Selatan. (Yal)

Tiga Kabupaten Baru di Sumbar Secara Syah Diresmikan Hari Ini

Muara Labuh, Nop. (Haluan).
TIGA Kabupaten baru di Sumbar secara syah akan diresmikan hari Kamis (20/11 hari ini) setelah Panitia Kerja (Panja) Legislatif (DPR-RI) dan eksekutif sejak dua hari belakangan ini melaksanakan rapat Paripurna pembahasan Draft RUU Pemekaran Kabupaten Baru itu oleh Komisi II DPR-RI.

Asisten I Kantor Bupati Solok Drs. Syamsir Pane MM kepada "Haluan" melalui pembicaraan via telepon dari Jakarta Selasa malam (18/11) mengatakan pihaknya yang ikut menghadiri rapat tersebut bahwa ketiga Kabupaten Baru dimekarkan di Sumbar sekarang tidak ada lagi permasalahan dan semua sudah memenuhi persyaratan. Semua data daerah sudah dilengkapi termasuk dengan batas-batas wilayah termasuk semua persyaratan lain

sudah dilengkapi seperti untuk Kab. Pasaman Barat, Damas Raya di Kab. Sawahlunto Sijunjung dan Solok Selatan di kab. Solok maka hari ini Kamis (20/11) direncanakan pengukuhan palu terakhir peresmian nya bersamaan dengan 21 kabupaten Baru dimekarkan di Indonesia.

Menurut Syamsir Pane dari Rapat yang diadakan beberapa hari ini juga telah dihadiri dari perwakilan 3 kabupaten baru di Sumbar ini terutama dalam penggiring kalau sekiranya masih ada persyaratan yang akan dipenuhi dan insya Allah semua sudah dilengkapi.

Sebelum ini juga sudah disetujui Presiden RI Megawati Sockarno Putri antara lain karena sudah memenuhi persyaratan sebagai kabupaten dengan indikator bidang ekonomi, luar daerah, potensi SDA dan SDM

nya serta jumlah penduduk.

Bupati Solok ke Jakarta

Bupati Solok H. Garnawan Fauzi, SH.MM Rabu (19/11) berangkat ke Jakarta guna menghadiri peresmian Kabupaten Baru Solok Selatan ini sebagaimana yang disampaikan Bupati kepada "Haluan" se usai berbuka bersama di rumahnya di Arosuka Sabtu lalu.

Menurut Bupati kita merasa bersyukur terwujudnya cita-cita perjuangan masyarakat selama ini terutama para tokoh masyarakat baik di kampung maupun di perantauan asal Solok Selatan. Pembentukan kabupaten itu penting dimaksudkan untuk memperdayakan potensi yang ada sekaligus mampu memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). (Yal)

SABTU, 22 NOVEMBER 2003

Jadi Tonggak Sejarah Perjuangan Masyarakat Solok Bagian Selatan

Muara Labuh, Nop. (Haluan).
TERWUJUDNYA Kabupaten Baru Solok Selatan setelah pengesahan RUU melalui Rapat Paripurna DPR-RI Komisi II dipimpin Sutarjo Wk.Ketua DPR-RI pada Kamis lalu (20/11) adalah merupakan tonggak sejarah perjuangan masyarakat Solok Selatan, kata Bupati Solok H.Gamawan Fauzi SH.MM

kepada "Haluan" via telepon dari Jakarta Kamis malam (20/11) se usai menghadiri pengukuhan Kabupaten Baru dibagian wilayah yang dipimpinnya itu.

Karena itu, saya telah menyampaikan kepada para tokoh perantau Solok Selatan di Jakarta waktu itu agar dapat *Bersambung ke hal IX Kol. 8*

Sambungan halaman 1
JADI.....

mengarang sebuah buku tentang perjalanan perjuangan Kabupaten Baru ini". Sebab ini suatu sejarah yang nantinya dapat diketahui para generasi muda bagaimana liku-liku perjuangan maka lahir Kabupaten Baru Solok Selatan ini kata Bupati dibalik gagang telepon.

Dikatakan, sejarah akan mencatat perjalanan yang cukup panjang dimana para pejuang tokoh masyarakat menyampaikan aspirasi mereka untuk dapat berdirinya sebuah Kabupaten baru di daerah ini.

Kita tidak akan mencukupi dada sebagai pejuang, akan

tetapi keberhasilan ini adalah berkat dukungan semua pihak mulai dari aspirasi masyarakat sampai kepada pihak pemrintah dari bawah sampai ke tingkat pusat termasuk para wakil-wakil rakyat di Kabupaten sampai ke pusat sekarang ini. Tinggal sekarang bagaimana kita mewujudkan pembangunan bagi sejahteranya masyarakat, tanpa mengabaikan persatuan dan kesatuan yang kokoh antara masyarakat di kampung halaman dan diperantauan.

Kita juga tidak lupa mengucapkan syukur kepada Allah kata Bupati menambahkan karena selain kita selama berusaha tidak lepas dari tuntunan Maha Pencipta Allah Subhanahu wata'ala. Dengan rasa syukur itu pulalah secara bersama nantinya kita akan berbuat terbaik bagi kemajuan Kabupaten baru ini dan tidak terlepas dari bimbingan serta dukungan kabupaten induk ucap Bupati mengakhiri. (Yal)

Komisi II DPR-RI Agendakan Jadwal Pembahasan UU Pemekaran Solok Selatan

Masyarakat Berharap Aspirasi Mereka Sejak Puluhan Tahun Lalu Dapat Terkabul

Muara Labuh, Agust (Haluan). KOMISI II DPR-RI sudah mengagendakan jadwal pembahasan Undang Undang (UU) untuk Pemekaran Kabupaten Solok Selatan menurut rencana akhir bulan Agustus 2003 dilakukan bersama dengan pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri (Depdagri).

Pembahasan Undang Undang Pemekaran ini selain Solok Selatan juga termasuk daerah lain di Sumatera Barat juga mengusulkan menjadi kabupaten yaitu Kabupaten Pasaman Barat di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Damas Raya di Kab.Sawahlunto Sijunjung diusulkan sejak beberapa bulan lalu yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan

dari masing-masing kabupaten induk kemudian telah ditinjau ke lapangan oleh Tim DPOD Pusat kata Des.H.Syafrizal JMSi Kepala Kantor Penghubung Provinsi Sumbar Jakarta pembicaraan melalui telepon Rabu (13/8) dengan Haluan di Muara Labuh.

Menurut Syafrizal dari pembicaraan dengan anggota Komisi II DPR-RI Rusdi Zen bahwa pembahasan Undang Undang Pemekaran Kabupaten ini diagendakan selama tiga hari dari tanggal 27 - 29 Agustus 2003 dan ketiga daerah yang akan dimekarkan ini tidak masalah lagi mudah-mudahan dapat terwujud.

Selanjutnya Syafrizal mengatakan bahwa khusus untuk Kab.Solok Selatan, masyarakat

nya sudah sangat berharap aspirasi mereka yang dilahirkan sejak puluhan tahun lalu itu dapat terkabul. Baik dari luas daerah maupun penduduk betul-betul salah satu persyaratan yang sangat mendukung.

Sebagaimana di lapangan telah dilihat dari dekat oleh Tim DPOD dari pusat beberapa bulan lalu dimana juga pihak Kabupaten Induk sangat merespon aspirasi masyarakat daerah ini.

Kata pembicaraan Undang Undang Pemekaran ini selanjutnya akan dibahas dengan pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri RI nanti kita berharap waktu dekat realisasi Kab.Solok Selatan yang kita idamkan dapat terwujud kata Syafrizal yang juga adalah sebagai putra Solok yang berjuang dengan petanlay serta tokoh masyarakat di kampungnya mencapai cita-cita pemekaran tersebut. (Yal).

UU Pemekaran Segera Disahkan

Pembentukan 3 Kabupaten Sumbar Disetujui Presiden

Padang, Okt. (Haluan).

UNDANG-undang Pemekaran Kabupaten Solok, Sawahlunto, Sijunjung dan Pasaman, Sumbar, diperkirakan sebelum akhir Oktober 2003 atau menunggu sidang paripurna DPR RI tentang penetapan jadwal sidang paripurna terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Pemekaran itu.

Asisten I Sekda Prov Sumbar, Drs Yulrizal Baharin MSI, kepada wartawan di Padang, Senin, mengatakan, diperkirakan dalam minggu ini RUU itu segera disahkan menjadi UU sebab pada 28 Oktober 2003 ini panitia musyawarah (Panmus)

DPRD-RI akan menetapkan jadwal persidangnya.

Ia mengatakan, pembentukan kabupaten itu penting dimaksudkan untuk memberdayakan potensi yang ada sekaligus mampu memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Dengan terbentuknya tiga kabupaten baru itu, maka pelayanan kepada masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan baik dan cepat karena ibukota kabupaten terletak makin dekat hingga ke daerah yang terletak paling jauh dari pusat ibukota kabupaten lama," katanya.

Menurut dia, rencana pembentukan tiga kabupaten di Sumbar—bersamaan dengan 19 kabupaten lainnya di tanah air—itu sudah disetujui Presiden RI Megawati Soekarno Putri, antara lain karena telah memenuhi persyaratan sebagai kabupaten dengan indikator bidang ekonomi, luas daerah, potensi SDA dan SDM, serta jumlah penduduk.

Ia mengatakan, kabupaten baru itu nantinya akan dipimpin oleh pejabat bupati berdasarkan SK mendagri. Khusus untuk pengisian anggota DPRD tiga daerah itu akan ditentukan setelah Pemilu 2004 dengan sistem penetapan berdasarkan daerah asal.

Yulrizal memastikan pembentukan kabupaten tersebut

mendesak juga karena didorong oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingat alokasi anggaran untuk KPU di seluruh Indonesia termasuk rencana 22 kabupaten yang akan dimekarkan itu sudah dialokasikan.

Calon kabupaten Pasaman Barat dengan ibukota Simpang Empat, dengan luas daerah 3.887,77 km² terdiri atas tujuh kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 311.306 jiwa.

Calon Kabupaten Solok Selatan dengan ibukota Muaro Labuli dengan luas daerah 3.346,2 km² yang terdiri atas lima kecamatan dengan jumlah

penduduk sebanyak 123.542 jiwa.

Sedangkan calon kabupaten Damastraya dengan ibukota Pulau Punjung, dengan luas daerah mencapai 2.961,13 km² terdiri atas empat kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 158.666 jiwa.

"Selain memiliki kesamaan potensi SDA hutan kayu dan perkebunan sawit yang terdapat di Damastraya dan Solok Selatan, Pasaman juga memiliki potensi kelautan yang cukup besar, hingga kini belum dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya. (Ant)

Bupati Gamawan Fauzi Gembira, Kabupaten Solok Selatan Disahkan :

3 Kabupaten Baru di Sumbar Disahkan DPR

*** Pemerintah Diminta Undangkan 24 Daerah Otonom Baru**

Jakarta, November (Haluan).

UNDANG-undang pembentukan tiga daerah otonom baru di Sumbar, yaitu Kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat dan Damas Raya telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR-RI, Kamis (20/11).

Dengan disahkannya pembentukan ketiga daerah otonom baru tersebut, dengan demikian maka di Sumatera Barat sekarang terdapat 19 kabupaten/kota.

Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjoguritno dan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno, seluruh fraksi-fraksi dalam pemandangan umumnya me-

nyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan daerah otonom baru itu menjadi undang-undang.

Pembentukan daerah otonom baru itu sebanyak 23 kabupaten yang tersebar di 13 provinsi. Tiga diantaranya adalah kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat dan Damas Raya.

Suasana sidangpun bergemuruh yang selalu diwarnai tepuk tangan pengunjung si-

idang. Ruang sidang penuh sesaknya dan sebagian terpaksa menyaksikan jalannya sidang melalui pesawat televisi yang disediakan sekretariat jenderal DPR.

Bahan banyak anggota DPR yang mengalah, karena tempat

duduk mereka sudah diisi oleh para pengunjung. Pasalnya, wakil dari setiap daerah pemekaran menghadiri sidang yang cukup bersejarah bagi daerah mereka masing-masing.

Kewenangan Gubernur
Ketua Komisi II Teras Na-
Bersambung ke hal XI Kol. 5

Sambungan halaman 1

3 KABUPATEN.....

rang dalam sambutannya dalam sidang paripurna tersebut mendesak pemerintah untuk segera mengundang UU Pembentukan 24 daerah otonom baru tersebut karena berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2004.

"Kami meminta pemerintah untuk bisa mengundang pembentukan 24 daerah otonom baru ini awal Desember nanti dan minggu pertama Desember seluruh daerah otonom baru itu sudah bisa diresmikan," kata Teras Narang.

Sebab, kata Teras Narang, dalam pembahasan pembentukan daerah otonom baru itu antara Panja Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), peresmian 24 daerah otonom baru itu harus paling lambat minggu pertama Desember sehingga tidak mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu 2004.

Sesuai kesepakatan Panja Komisi II dengan KPU, jelas Teras Narang, di daerah hasil pemekaran tersebut tidak dibentuk KPUD, hanya dibentuk semacam sekretariat. Sedangkan tugas pelaksanaan Pemilu di kabupaten baru itu dilaksanakan oleh KPUD kabupaten induk.

Sedangkan Mendagri Hari Sabarno dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah akan secepatnya mengundang UU pembentukan 24 daerah otonom tersebut.

"Jika semua pejabat bupati dari daerah otonom baru ini sudah ditetapkan maka akan diresmikan secepatnya secara bersama-sama di Jakarta," jelas Hari Sabarno.

Tentang Penjabat bupati yang akan diangkat, Hari menegaskan bahwa yang mengusulkan itu masih kewenangan pemerintah bukan partai politik.

"Yang berwenang mengusulkan Penjabat Bupati daerah otonom baru ini adalah gubernur, yang dikoordinasikan dengan bupati kabupaten induk," jelas Mendagri.

Bupati Solok

Bupati Solok H. Gamawan Fauzi, SH, MM sangat bergembira dengan telah disahkannya pembentukan kabupaten Solok Selatan bersama 23 kabupaten/kota lainnya di Indonesia dalam sidang Paripurna DPR RI Kamis kemaren.

Bupati Gamawan Fauzi mengatakan kabupaten Solok sebagai kabupaten Induk akan membantu kabupaten Solok Selatan, agar kabupaten itu cepat tumbuh dan berkembang mengikuti kabupaten-kabupaten lainnya.

Kita akan membimbing Solok Selatan kata Gamawan Fauzi, dan akan membantu dalam bidang materil dan moril. Bidang materil terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan kegiatan rutin kabupaten Solok Selatan, sesuai dengan kemampuan kabupaten Solok. (SA/SY)

Aspirasi Solok Selatan Sejak 52 Tahun Lalu Jadi Kenyataan

DPRD Sumbar Setuju, Jumat Ini Bahannya Dikirim ke Mendagri

Padang, Agustus (Haluan). PULUHAN masyarakat Solok Selatan memberikan tepuk tangan yang meriah, begitu Ketua DPRD Sumbar, M. Arwan Kasri yang memimpin sidang paripurna di ruang sidang utama Dewan, Kamis kemarin (22/8), menyetujui rancangan disetujuinya pemekaran Kabupaten Solok.

Keputusan DPRD Sumbar No. 12/SH/2002 tentang persetujuan pemekaran Kabupaten

Solok menjadi dua kabupaten itu, diambil setelah seluruh fraksi yang ada di lembaga legislatif ini (kecuali F-PKB yang tidak hadir) menyatakan sangat setuju dan mendukung sekali pemekaran tersebut.

Apalagi ketika Gubernur

Sambungan halaman 1

ASPIRASI..... langsung kepada Mendagri Hari Sabarno di Jakarta, Jum'at hari ini, membuat tepukan tangan masyarakat Solok Selatan yang hadir semakin bergemuruh.

Rapat paripurna yang juga dihadiri Asisten I bidang Pemerintahan Drs. Yulrizal Baharin, MSi dan jajaran pemprop Sumbar lainnya, Sekdakab Solok Syafril Khätib, anggota DPRD kabupaten Solok serta tokoh masyarakat setempat, diawali dengan pandangan akhir fraksi. Dari 13 fraksi yang ada di DPRD Sumbar, 12 fraksi menyatakan setuju dilakukan pemekaran kabupaten Solok, sedangkan 1 fraksi yaitu F-PKB tidak hadir.

Fraksi PBB dalam pandangan akhirnya yang disampaikan Drs. H. Mocstamir Makmoer mengatakan, aspirasi pemekaran kabupaten Solok sudah disuarakan sejak tahun 1950 yang terwujud dalam konperensi Tambulün di Sangir. Tahun 1968 kembali diapungkan dalam konperensi tokoh pemuda dan pemuda masyarakat di Muara Labuh, namun aspirasi ini belum tertampung seutuhnya.

Terakhir Maret 2002, aspi-

rasinya H. Zainal Bakar, SH dalam sambutannya sebelum sidang ditutup, dengan lantang menyatakan bahwa semua do kumen dan surat-surat menyangkut pengusulan pemekaran tersebut, akan dikirim

Bersambung ke hal XII Kol. 1

rasi masyarakat dari 5 kecamatan masing-masing kecamatan Batang Hari, kec. Sangir Jujan, kec. Sangir, kec. Sungai Pagu dan kec. Parik. Gadang Diatch yang ingin pemekaran kabupaten Solok itu, baru mendapat respon dari pemerintah dengan keluarnya surat Bupati Solok tentang persetujuannya dan rekomendasi pemekaran kabupaten Solok menjadi 2 kabupaten, keputusan DPRD kab. Solok tentang hal yang sama, dan surat Gubernur Sumbar kepada DPRD Sumbar tentang usulan pemekaran.

Sebelum persetujuan ini diberikan, lanjutnya, pihaknya telah turun ke Muara Labuh bersama semua ketua fraksi dan "leading sector" Komisi "A" bidang Pemerintahan DPRD Sumbar, untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dari 5 kecamatan ini.

F-PBB juga menginginkan, agar tercipta "bapisah bukannya bacarai" hendaknya kabupaten termuda ini menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan kabupaten induknya, misalnya menggerakkan transmigrasi lokal dari utara ke selatan. Sebab bila dilibat dari jumlah

penduduknya maka kabupaten ke-17 ini sangat kekurangan penduduk sementara luas wilayahnya hampir sama dengan induknya.

Hal senada disampaikan F-PPP, F-PAN, F-PH Masyumi, F-PUI, F-TNI/Polri, F-PKP, F-PK, F-PP, F-PPP, F-KAMI dan F-PDIP. Melihat geografis kabupaten Solok dengan luas 7.084 km2 dan jumlah penduduk 450.082 jiwa, maka sudah waktunya dilakukan pemekaran. Setelah pemekaran, luas kabupaten induk dengan dukungan 14 kecamatan akan menjadi 3.737,8 km2 dan penduduk 331.923 jiwa, dan kabupaten baru didukung 5 kecamatan seluas 3.346,20 km2 dan penduduk 118.159 jiwa.

"Kami menilai, keinginan pemekaran ini merupakan aspirasi murni masyarakat Solok Selatan yang dipertanggungjawabkan sejak 52 tahun lalu, tumbuh dari bawah tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari kelompok lain," ujar Ketua F-PH Masyumi Hj. Marhaeny Z. Azwar.

Sementara Gubernur Sumbar Zainal Bakar dalam sambutannya mengatakan, dilandasi pertimbangan optimalisasi pemanfaatan potensi, peningkatan pelayanan dan percepatan pertumbuhan kawasan, maka keputusan pemekaran kabupaten Solok ini merupakan pilihan yang tepat, apalagi didasari keinginan yang kuat dari masyarakat Solok.

Satu wilayah yang cukup luas, seringkali menyulitkan aparat pemerintahan memberikan pelayanan prima kepada masyarakatnya. Apalagi dengan keterbatasan daya jangkau dan berbagai keterbatasan lainnya, tak jarang menimbulkan kelambatan yang tak bisa dihindari. Padahal, kecepatan penanganan masalah dan ketepatan mencetuskan akar permasalahan itu sendiri merupakan keharusan yang bersifat mutlak.

Menurut Gubernur, apabila diperhitungkan pula pertumbuhan dan penyebaran penduduk, perkembangan aktivitas ekonomi dan sosial, serta peningkatan keberagaman tuntutan kebutuhan masyarakat, maka pemekaran wilayah memang menjadi sebuah pilihan yang tepat. Dinamika kehidupan yang bergerak semakin cepat, pada akhirnya akan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan sendiri.

"Proses alamiah inilah yang telah kita coba untuk mewadahi dengan memekarkan Kabupaten Solok menjadi dua wilayah kabupaten," ujar gubernur. [dv/JER/M2S]

Sambungan halaman 1

GUBERNUR.....

Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sjachriel Darham, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno ambil langkah aman. Saat ditanya apakah pemecatan itu salah prosedur, Hari mengatakan dirinya tidak berani melawan wakil rakyat.

Hal itu dikemukakan Hari saat ditemui wartawan sesaat sebelum menghadiri sidang kabinet terbatas bidang politik dan keamanan (polkam) di Sekretariat Negara, Jl. Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2002).

Apakah pemberhentian Gubernur Kalsel salah prosedur? "Saya tidak mengatakan demikian. Saya tidak berani melawan wakil rakyat. Saya hanya mengatakan tata cara prosedur kepala daerah sesuai PP 108 dan pengertian PP itu untuk legislatif dan eksekutif," jawab Hari.

Hari justru mempertanyakan apakah memang prosedur pemberhentian tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. "Karena dalam PP 108 tentang tata cara pertanggungjawaban

kepala daerah, ada yang lima tahunan dan ada yang tahunan dalam rangka melaksanakan penggunaan dana APBD dan ada terhadap hal-hal tertentu," ungkap mantan wakil ketua MPR tersebut.

Apakah di dalam penghentian itu masuk dalam aspek hal-hal tertentu, menurut Hari, jika demikian maka biasanya kepala daerah diundang dulu untuk menjelaskan tentang keputusan atau kebijakan yang menimbulkan permasalahan.

"Nanti kalau tidak diterima oleh dewan, bagian mana yang tidak diterima, nanti diberi waktu untuk dijelaskan ulang," inibuh dia.

Apakah sudah dibentuk tim untuk masalah tersebut? "Sedangkan kita proses. Belum sampai pada pembicaraan ketua (tim)," demikian Hari Sabtu no.

Seperti diberitakan, pemecatan itu terjadi pada Rabu (21/8/2002) pukul 23.10 WIB. Sjachriel dan wakilnya, Husin Kasah, diberhentikan dari jabatannya oleh DPRD lewat sebuah sidang paripurna di Gedung DPRD, Banjarmasin, tanpa dihadiri sang gubernur. (dc).

Koh Perantau Solok Selatan di Jakarta ambut Baik Pemekaran Kabupaten Solok

Labuh, Agust. (Haluan).
DKOH perantau Solok
n Drs. H. Syafrizal me
ut baik tentang persetujuan
pemekaran daerah Kabu
Solok menjadi dua kabu-
yakni Kab. Solok dan
Solok Selatan, secara akta-
DPRD Kab. Solok me
unya pada sidang plenu
pada akhir Juli 2002

jalanan panjang masya
Solok Selatan memakan
kl. 52 tahun untuk dapat
sendiri menjadi sebuah
aten maka akhirnya ter-
sudah; namun masih
puh beberapa prosedur
ik pada tingkat provinsi
a pusat nantinya.

tuk lebih mempercepat
selanjutnya menghimbau
ur Sumatera Barat,
Prop. Sumbar Mendagri
on kegunaan rakyat
adalah melalui perjuangan
nerasi keempat sekarang
erujud melalui Undang-
No. 22 Tahun 1999 kata
al putra Sangir Solok
yang juga adalah Kepa
akilan Pemda Sumbar di
kepada Haluan melalui
raan telepon Sabtu lalu.
atakan, Pemda Kab. So
membuat sejarah pada
si sekarang telah mem-
ntu berdirinya Kab.
elatan; kedepannya nan
membawa kemajuan
gi daerah ini maupun
lmbat pengembangan
daerah termasuk kem-
kepentintahan nagari
cepat pelayanan bagi
at. Maka para perantau
elatan sangat menyam-
serta terima. Kepa-
pihak termasuk kepa-
mur Sumbar yang nan-
aktu dekat responya
upai ke tingkat pusat.
gkan tokoh perantau
Mudjadid Dulwathan
MBL juga menyam-
kepada Haluan dari

sambutan perantau berdirinya
Kab. Solok Selatan ini yang
nantinya mungkin akan dirobah
namanya menjadi kab. Kawah
Selatan setelah melalui kesepa-
katan, untuk tingkat pusat se-
dang dipersiapkan segala sesu-
atu bagi pengurusannya baik
melalui DPR-RI maupun ke
Mendagri nantinya.

Untuk cepatnya proses dit-
ingkat pusat ini juga sangat
ditentukan pengiriman dari
daerah terutama dari pihak Gu
berhur Sumbar maupun DPRD
Prop. Sumbar sendiri. Sebelum
penetapan nanti berdirinya ka
bupaten ini juga akan dituruk

an: Tim dari pusat menjajaki se
cara langsung ke daerah ber-
sangkutan dan dalam hal ini
juga memerlukan bantuan Pem
da Sumbar tanpa terlalu mem-
beratkan kepada pihak Panitia
BP2KS ataupun kepada pihak
Pemda Kab. Solok sendiri. Ka
rena dengan terwujudnya kabu-
paten baru ini dampak posi-
tifnya akan menambah masukan
bagi Sumbar melalui dana ban-
tuan dari pusat nantinya antara
lain berupa Dana Alokasi
Umum (DAU) ucap Mudjadid
yang juga adalah Ketua LP-
HAM Independen Indonesia
putra Solok Selatan. (Yal).

Tokoh Masyarakat Solok Selatan Harapkan :

Gubernur agar Mensikapi Aspirasi dari Masyarakat

Untuk Berdirinya Kabupaten Solok Selatan yang Didambakan

Muara Labuh, Agust. (Haluan).
 TOKOH masyarakat Solok Selatan di Jakarta Drs. H. Mudjadid Dulwathan SH.MH. MBL mengharapkan Gubernur Sumbar dapat menyikapi serta merespon aspirasi masyarakat untuk berdirinya Kabupaten Solok Selatan sebagai mana eksekutif maupun legislatif telah menyetujuinya pada sidang pleno khusus DPRD Kab. Solok, Senin lalu (29/7).

Secara aklamasi menyetujui pemekaran kabupaten Solok menjadi dua kabupaten itu yakni Kabupaten Solok dan kabupaten Solok Selatan dituangkan dalam Keputusan DPRD Kab. Solok dengan suratnya No.08 Tahun 2002 sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) UU. No.22 Tahun 1999 tentang Pemekaran Daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu Daerah apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari proses berikutnya sa-

ngat diharapkan pihak Gubernur Sumbar dapat membantu dalam waktu secepatnya pengirimannya ke tingkat Pusat, sehingga aspirasi masyarakat ini dapat terwujud yang juga adalah kepentingan perkembangan pembangunan daerah Sumbar masa mendatang.

Hal tersebut diatas disampaikan Drs. H. Mudjadid Dulwathan SH.MH.MBL selaku tokoh masyarakat Solok Selatan melalui telepon kepada Haluan di Muara Labuh sehubungan dengan pemekaran Kab. Solok Selatan yang sudah puluhan tahun menjadi idaman masyarakatnya.

Dikatakan, bantuan Gubernur sangat diperlukan juga bagi penuntasan Kab. Solok Selatan sesuai dengan prosedurnya, termasuk membantu pihak Panitia BP2KS2 disaat tim survey yang turun ke lapangan nantinya. Kita yakin bahwa keberhasilan ini berdirinya Kab. Solok Selatan 'nama baik' juga bagi Sumbar termasuk memperbesar DAU

disamping kabupaten yang sudah ada sekarang. (Yal).

Prop Sumbar Tatap Muka Bahas Rencana Kabupaten "Solse"

Muara Labuh, Agust. (Haluan).
TIM Kerja Persiapan Proses Kabupaten Solok Selatan dari Kantor Gubernur Sumbar turun ke Solok Selatan dan bertatap muka dengan tokoh masyarakat, Ninik Mamak, Alim Ulama dan Pemuda, serta unsur Ketua BPN bertempat di Gd. Nasional Muara Labuh Kamis (15/8).

Anggota Tim 5 orang diketuai Drs. Khairul Darwis Kepala Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Sumbar didampingi Drs. Aliman Salim Kep. Pemer-

intahan Kantor Bupati Solok. Hadir pada acara Muspika se Solok Selatan termasuk para

Ketua KAN masing masing dari Kec. Sangir, Batanghari, Sangir Jujuan, Sangir, Sei. Pagu dan Koto Parik Gadang Diateh.

Sebelum dialog Ketua Tim Drs. Khairul Darwis menyampaikan kedatangan Tim ini dibentuk sebagai Ketua dan Penanggung jawab adalah Gubernur Sumbar H. Zainal Bakar bertujuan untuk mendingar aspirasi masyarakat secara langsung tentang keinginannya Solok Selatan berdiri sendiri menjadi sebuah Kabupaten.

Tatap muka dengan langsung berdialog berjalan cukup tertip dan alot dimana dari masing masing kecamatan yang masuk Kab. Solok Selatan sesuai dengan Surat Keputusan DPRD Kab. Solok No.08 Th.2002 menyetujui Kab. Solok menjadi dua Kabupaten pada sidang pleno khusus 29 Juli 2002. Untuk Kabupaten baru ini daerah 5 kecamatan Sangir Jujuan, Sangir Batanghari, Sangir dan Sei. Pagu termasuk Koto Parik Gadang Diateh.

Tokoh masyarakat Kenegarian Pasir Talang Syukrial Syukur Dt. Majo Basa menyampaikan dari aspirasi yang berkembang dalam perjalanan yang cukup lama kl. 52 Tahun masyarakat Solok Selatan sudah berkeinginan daerahnya menjadi sebuah Kabupaten. Dalam kurun waktu cukup lama sudah 4 generasi dan pada generasi keempat sekarang perjuangannya terwujud kendatipun belum pada prosedur Final. Terkendala karena belum ada peraturan dan Undang Undang yang mendukung pemekaran daerah baru dimaksud dan setelah adanya ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang Undang No.22 Th. 1999 Otonomi Daerah

maka Solok Selatan mendapat peluang menyalurkan aspirasinya.

Untuk proses selanjutnya tokoh masyarakat mengharapkan kepada pihak Tim Kerja Proses Kab. Solok Selatan secepatnya dapat memproses sekaligus membayarnya ke DPRD Sumbar dan mudah mudahan akhir bulan ini menuntai prosedurnya dapat dilantik ketunggal pusat.

Aspirasi 5 Kecamatan disampaikan dengan suara bulat tentang keinginan adanya Kab. Solok Selatan dan berharap Gubernur Sumbar bersama DPRD Sumbar secepatnya merealisasikan keinginan rakyat Solok Selatan dimaksud.

Semua aspirasi yang disampaikan mendapat tanggapan serius dari pihak Tim Kerja Persiapan Proses Kab. Solok Selatan. (Yal)

Tim DPRD Sumbar Dengar Langsung Aspirasi Masyarakat Solok Selatan

Muara Labuh, Agust. (Haluan).

TIM DPRD Sumatera Barat sebanyak 8 orang terdiri dari Ketua-Ketua Fraksi mendengar langsung aspirasi masyarakat keinginannya untuk berdirinya Kabupaten Solok Selatan bertempat di Gd. Nasional Muara Labuh Senin (19/8).

Tatap muka dengar aspirasi ini dihadiri Bupati Solok diwakili Asisten I Drs. Aliman Salim, Wakil Ketua DPRD Kab. Solok Saltono, Muspika se Solok Selatan, Panitia BP2KS2 juga utusan KAN dan Tokoh Masyarakat dari 5 kecamatan masing-masing Sangir Jujuan, Sangir Bt.Hari, Sangir, Koto Parik Gadang Diateh dan Sei. Pagu termasuk di dalam wilayah Pemekaran Kab. Solok Selatan.

Sebelum dialog Ketua Tim DPRD Sumbar AG.MS. Dt. Paduko Baharo menyampaikan kunjungan ini berdasarkan keputusan rapat di DPRD Sumbar perlu mendengar aspirasi masyarakat Solok Selatan secara langsung atas keinginan mereka berdiri sendiri adanya Kab. Solok Selatan.

Selain itu juga berdasarkan adanya surat baik dari Bupati Solok maupun dari pihak DPRD Kab. Solok menyampaikan berdirinya Kab. Solok Selatan sebagaimana diputuskan persetujuannya melalui sidang paripurna khusus dengan surat keputusan No.8 Tahun 2002 tanggal 29 Juli 2002 telah dikirimkan ke DPRD Sumbar.

Kami pihak DPRD Sumbar sangat menyikapinya serius aspirasi masyarakat Solok Selatan yang berkembang dan juga dari dekat mengetahui bagaimana potensi-potensi yang cukup besar di daerah ini termasuk punya aset sejarah yang tidak mungkin dilupakan karena saat itu dimasa perjuangan PDRI saya ikut di dalamnya, kata Ketua Tim DPRD Sumbar AG. MS. Dt. Paduko Baharo disambut tepuk tangan gemuruh hadirin.

Kesempatan dialog dipimpin Drs. Aliman Salim dimana dari Kec. Sungai Pagu disampaikan Syukrial Syukur Dt. Majo Basa dimulai dari sejarah perjuangan keinginan Solok Selatan menjadi sebuah kabupaten ini sejak 52 tahun lalu melalui perjuangan 4 generasi dan ini merupakan generasi yang keempat. Pada pemerintahan reformasi sekarang inilah dapat berhasil dengan adanya ketentuan ps.6 ayat 22 UU. No.22 th.1999 Pemerintah Daerah. Sedangkan adanya anggapan negatif berdirinya Kab. Solok Selatan adalah bagi kepentingan seseorang atau golongan adalah tidak benar, tetapi adalah murni aspirasi rakyat Solok Selatan yang juga disambut suara gemuruh dari hadirin "betul, betul". Sementara dari Sangir aspi-

rasinya disampaikan M. Zen Dt. Bandaro, Sangir Jujuan oleh Suhailis, Sangir Bt. Hari oleh Ir. Khaidir dan Koto Parik Gadang Diateh disampaikan oleh Andi, kesemuanya mendukung berdirinya kab. Solok Selatan dan bermohon realisasinya dalam waktu secepatnya.

Dari semua aspirasi yang telah disampaikan ini mendapat tanggapan sangat serius, sehingga Ketua Tim DPRD Sumbar AG. MS. Dt. Paduko Baharo menyampaikan bahwa pembahasannya Pemekaran Kab. Solok Selatan ini sidangnya akan diadakan pada hari Kamis (22/8) dipersiapkan dari para tokoh masyarakat Solok Selatan mengahadirinya di gedung DPRD Sumbar juga kembali suara gemuruh dari yang hadir "hidup DPRD Sumbar". (Yal)

Haluan" Melaporkan :

"Wakil-wakil Rakyat" Menanggapi Positif !

* Aspirasi Masyarakat dari Wilayah Solok Selatan
* Hari Senin Ini Rakyat Menunggu Keputusan DPRD

Solok, Juli (Haluan).

KABUPATEN Solok Selatan semakin dekat perwujudannya dan menunggu pengetokan pada setelah melalui sidang DPRD Kab. Solok pemaparan proposal dari pihak Panitia BP2KS2 mendapat tanggapan positif dari 19 orang anggota Dewan yang menyampaikan tanggapannya.

Sidang paripurna DPRD wakil Ketua Saltono didampingi Kab. Solok ini dipimpin oleh pihak eksekutif Sekda Kab. So

lok Drs. H. Syafril Khatib dan Panitia Pemekaran Kab. Solok Selatan (BPKS2) langsung alot di ruang sidang DPRD Kab. Solok di Koto Baru Jum'at (26/7). Sementara diluar gedung tidak kurang dari 300 orang anggota Masyarakat Solok Selatan sengaja datang mempergunakan 6 buah bus dan puluhan kendaraan pribadi secara tertib mendengarkan jalannya sidang, beberapa lembar spanduk tergantung di depan kantor Wakil

rakyat ini diantaranya bertuliskan "Masyarakat Solok Selatan Bertekad menjadi Kabupaten". Masyarakat yang datang ini dari 5 kecamatan masing-masing Sangir Jujan, Sangir Batang Hari, Sangir, Sei. Pagu, dan Koto Parik Gadang Diateh, termasuk juga para perantau di beberapa kota dalam Sumbar termasuk para mahasiswa ikut bergabung dengan tertib di luar gedung ini.

Sidang paripurna DPRD Kab. Solok kali ini betul-betul menampakkan para wakil rakyat betul-betul telah menyikapi aspirasi masyarakat Solok Selatan yang sudah cukup lama berkeinginan menjadi sebuah Kabupaten dimulai sejak tahun 1956.

Beberapa anggota dewan yang menyampaikan tanggapannya setelah mendengar pemaparan proposal tentang pemekaran Solok Selatan menjadi sebuah kabupaten itu disampaikan Sekretaris BPKS2 Ir. Musril Kusai antara lain disampaikan Drs. Erizal Kasuma dari Fraksi PDI Perjuangan tegas-tegas sangat mendukung berdirinya Kabupaten Solok Selatan, apalagi perjuangan yang sudah cukup panjang dan lama dari para tokoh masyarakat Solok Selatan sudah sepantasnya disikapi secara positif sesuai dengan UU No.22 tahun 1999 bagi pemekaran suatu daerah.

Juga menyampaikan tanggapan dari Listo, BA dari FPG, Drs. Desra Ediwan (FPG), Nu syirwan (FPPP), Irwandi (FPAN), Nuzuar Said (FPAN), Abu Hanifah (FPBB), Ahmad Jati (FPPP), Nazar Dt. Rajo Intan (FPG), M.Sati Nurdin (FPK), Suhartoni SH dan Edi Salim Dt. Basa kesemuanya mengarah kepada tujuan yang sangat menyikapi aspirasi rakyat Solok Selatan kemudian mendukung berdirinya Kabupaten Solok Selatan.

Setiap tanggapan para anggota Dewan ini selalu mendapat tepuk tangan gemuruh diberikan para tokoh masyarakat Solok Selatan yang mengikuti jalannya sidang paripurna ini.

Maka dari kesepakatan bersama baik dari pihak Eksekutif maupun pihak legislatif termasuk Panitia BP2S2 sidang paripurna DPRD Kab. Solok ditetapkan untuk dilanjutkan hari Senin (29/7) dan merupakan sidang terakhir pengetokan pada atas persetujuan berdirinya kab. Solok Selatan. (Haluan)



SOLOK SELATAN. Sidang paripurna DPRD Kab. Solok mendengarkan pemaparan proposal pemekaran Solok Selatan menjadi sebuah kabupaten berjalan alot dan tanggapan positif dari anggota fraksi di ruang sidang DPRD Kab. Solok di Koto Baru Solok Jum'at (26/7). Gambar di atas, Sekda bersalaman dengan Ketua Panitia BP2KS2 DR. Armen Mukhtar dan kemudian bersama di depan sebuah spanduk digantung di depan kantor wakil rakyat itu, Wakil Ketua Solok Saltono (pakai peci) dan DR. Armen Mukhtar Ketua Panitia BP2KS2 (berdasi). (Khalid Syukur)

Pasaman Barat, Damas Raya dan Solok Selatan Penuhi Persyaratan

Untuk Dimekarkan Menjadi Kabupaten Baru di Sumbar

Padang, Sept (Haluan).

TIGA daerah yang akan dimekarkan menjadi kabupaten di Sumbar, masing-masing Pasaman Barat, Damas Raya dan Solok Selatan tetap dinyatakan telah memenuhi persyaratan, selanjut dipersiapkan dalam pembahasan draft RUU guna dibahas oleh Komisi II DPR-RI yang bersamaan dengan 19 daerah lain yang ikut dimekarkan. Pernyataan ini telah disampaikan pada Rapat Persiapan Penyusunan/ Pembahasan Draft RUU Pembentukan 22 Daerah Otonom Baru di Hotel Mercure Jl. Hayam Wuruk No 123 Jakarta

Jumat (19/9) yang dihadiri Bupati, Ketua DPRD serta Lesson Officer (LO) mewakili 22 Kabupaten yang dimekarkan.

Rapat yang dibuka Sekretaris Dirjen Otda Depdagri Ny. Hutri sedangkan pimpinan rapat Kasubdin Pemekaran Otda Depdagri Eri Yuceri. Dari Solok hadir Wabup Drs. Elfi Shalan, AMPT dan Ketua DPRD. Drs. H. Saaduddin didampingi Drs. H. Syafrizal Kepala Perwakilan Sumbar di Jakarta serta Syukrial Syukur Dt. Majo Basa dari Solok Selatan.

Rapat yang dibuka dengan dialog masing-masing calon

Kabupaten dapat menyampaikan usul diantaranya sebagai mana disampaikan Wabup Solok Dr. Elfi Shalan meminta melalui Depdagri bahwa akhir September 2003 sudah dapat ditetapkan Draft RUU Pembentukan 22 Daerah Otonom Baru ini sedangkan berbagai data lain dapat diberikan kepada masing-masing daerah Kabupaten yang akan dimekarkan menjadi pedoman selanjutnya.

Sementara beberapa calon Kabupaten lainnya juga mengusulkan hal yang sama termasuk mengharapkan kepada

pihak pemerintah melalui Depdagri nantinya agar biaya-biaya pemekaran ini ditetapkan melalui APBN. Dari rencana Pembahasan Draft RUU di Komisi II DPR-RI semula direncanakan tanggal 24/9 namun masih tetap menunggu kepastian berikutnya sebagai ditetapkan nantinya oleh DPR-RI sendiri kata Kasubdin Pemekaran Otda Depdagri Eri Yuceri pada akhir rapat ini. (Yal)

DPR Segera Proses Keinginan Solok Selatan Jadi Kabupaten

Padang, Sept (Haluan).

KETUA DPR-RI, Akbar Tandjung mengungkapkan, DPR-RI melalui Komisi II yang antara lain dalam tugasnya terkait dengan Depdagri dan akan selalu menyikapi setiap keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran wilayahnya, asal bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, kita segera men-

proses dan menyikapi keinginan

Sambungan halaman 1

DPR SEGERA

dimaksud dengan membuatkan UU-nya, termasuk keinginan masyarakat Solok Selatan yang menginginkan menjadi kabupaten tersendiri. Semua itu, tentunya perlu dilengkapi persyaratannya sebagai bahan pertimbangan merancang RUU, sehingga Komisi II DPR-RI segera memprosesnya.

Demikian dikemukakan Akbar Tandjung ketika bertemu dengan Penasehat Hukum Badan Penggerak Pembentukan Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2) H. Mudjadid Dulwathan dan Tokoh Masyarakat Solok Selatan, Syukrial Syukur di DPR-RI, seperti diungkapkan oleh Mudjadid kepada "Haluan" Minggu (8/9) kemarin.

Menurut Mudjadid, Ketua DPR-RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu malah mendesak panitia untuk melengkapi semua persyaratan yang diperlukan dan meminta Bupati dan DPRD setempat lebih proaktif menyikapi aspirasi yang berkembang, ujarnya.

Mudjadid dan Syukrial Syukur lebih jauh menjelaskan, selain Akbar Tandjung, juga ditemui beberapa anggota DPR-RI diantaranya Drs. HM. Laode Djani Hasmar, S.Sos dan Marah Simon (Komisi II), Dr. Azwir Dainy Tara, anggota DPR-RI utusan daerah Kab. Solok dan Soetardjo Suryoguritno dari F. PDI Perjuangan.

Pada prinsipnya semua anggota DPR-RI itu sangat mendukung adanya pemekaran wilayah dan malah saat ini sedang dilakukan pembahasan pemekaran wilayah lainnya di Indonesia, baik propinsi maupun kabupaten.

Azwir Dainy Tara menurut Mudjadid mengungkapkan, kabupaten Solok Selatan harus segera terwujud, sehingga panitia tim sebelas mulai dari Depdagri, Otda, Hankam, Keuangan, Kehutanan, Komisi II, dll bisa pula bekerja dengan lancar.

Sementara Laode Djani Hasmar meminta panitia daerah lebih gesit dan membuat jaringan komunikasi untuk semua administrasi yang diperlukan sewaktu-waktu. Artinya, bila sudah lengkap, tentu pekerjaan lancar dan masyarakat jadi tenang.

Laode tidak menginginkan adanya berkas yang tidak lengkap, sehingga tidak menjadi tumpukan sampah di DPR-RI. Tentunya sesuai aturan, maka Bupati, DPRD setempat segera memenuhi persyaratan, termasuk yang paling urgent adalah pernyataan Bupati membina daerah baru yang akan berdiri dalam waktu maksimum 3 tahun, ungkapnya.

Mudjadid juga mengungkapkan, diakui bahwa Bupati Solok yang energik dan piawai sebagai pamong itu cukup besar perannya dalam pemekaran wilayah kab. Solok menjadi 2 bagian yakni rencana Kab. Solok

Selatan (Solsel) dan berharap agar masyarakat lebih objektif menilai pemimpinnya sendiri.

Ketika ditanya adanya tim lain yang menghadap Mendagri seperti diberitakan Haluan, Sabtu (7/9), Mudjadid menyebutkan, kami berbagi tugas, karena kesediaan Mendagri dan Ketua DPR-RI bersamaan waktunya.

"Jadi, tidak perlu pula dipermasalahkan adanya tim yang terpisah. Namun prinsipnya kita bekerja secara bersama. Selain tokoh-tokoh masyarakat gabungan Solsel itu, juga ada sejumlah tokoh masyarakat di kecamatan pada wilayah itu yang juga berjuang untuk kepentingan yang sama. Itu wajar saja, ujar Mudjadid mengakhiri. (DA).-

UU Pemekaran Segera Disahkan

Pembentukan 3 Kabupaten Sumbar Disetujui Presiden

Padang, Okt. (Haluan).

UNDANG-undang Pemekaran Kabupaten Solok, Sawahlunto Sijunjung dan Pasaman Sumbar, diperkirakan sebelum akhir Oktober 2003 atau menunggu sidang paripurna DPR RI tentang penetapan jadwal sidang paripurna terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Pemekaran itu.

Asisten I Sekda Prov Sumbar, Drs Yulrizal Baharin MSI, kepada wartawan di Padang, Senin, mengatakan, diperkirakan dalam minggu ini RUU itu segera disahkan menjadi UU sebab pada 28 Oktober 2003 ini panitia musyawarah (Panmus)

DPRD-RI akan menetapkan jadwal persidangnya.

Ia mengatakan, pembentukan kabupaten itu penting dimaksudkan untuk memberdayakan potensi yang ada sekaligus mampu memberi kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

"Dengan terbentuknya tiga kabupaten baru itu, maka pelayanan kepada masyarakat akan dapat dilaksanakan dengan baik dan cepat karena ibukota kabupaten terletak makin dekat hingga ke daerah yang terletak paling jauh dari pusat ibukota kabupaten lain," katanya.

Menurut dia, rencana pembentukan tiga kabupaten di Sumbar—bersamaan dengan 19 kabupaten lainnya di tanah air—itu sudah disetujui Presiden RI Megawati Soekarno Putri, antara lain karena telah memenuhi persyaratan sebagai kabupaten dengan indikator bidang ekonomi, luas daerah, potensi SDA dan SDM-nya serta jumlah penduduk.

Ia mengatakan, kabupaten baru itu nantinya akan dipimpin oleh pejabat bupati berdasarkan SK mendagri. Khusus untuk pengisian anggota DPRD, tiga daerah itu akan ditentukan setelah Penulu 2004 dengan sistem penetapan berdasarkan daerah asal.

Yulrizal memastikan pembentukan kabupaten tersebut

mendesak juga karena didorong oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingat alokasi anggaran untuk KPU di seluruh Indonesia, termasuk rencana 22 kabupaten yang akan dimekarkan itu sudah dialokasikan.

Calon kabupaten Pasaman Barat dengan ibukota Simpang Empat, dengan luas daerah 3.887,77 km² terdiri atas tujuh kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 311.306 jiwa.

Calon Kabupaten Solok Selatan dengan ibukota Muaro Labuh dengan luas daerah 3.346,2 km² yang terdiri atas lima kecamatan dengan jumlah

penduduk sebanyak 123.542 jiwa.

Sedangkan calon kabupaten Damasraya dengan ibukota Pulau Punjung, dengan luas daerah mencapai 2.961,13 km² terdiri atas empat kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 158.666 jiwa.

"Selain memiliki kesamaan potensi SDA hutan kayu dan perkebunan sawit yang terdapat di Damasraya dan Solok Selatan, Pasaman juga memiliki potensi kelautan yang cukup besar, hingga kini belum diolah optimal untuk kesejahteraan masyarakat," ujarnya. (Ant)

Muara Labuh, Sept. (Haluan).-

RENTANG pemekaran calon Kabupaten bagi tiga daerah masing-masing untuk Pasaman Barat, Damas Raya dan Seleok Selatan di Provinsi Sumatera Barat suda tidak ada masalah dan sudah memenuhi syarat.

Hal yang demikian pada rapat pembahsan Draft RUW baik yang akan dilaksanakandengan lintas Departemen maupun Komisi II DPR-RI diadakan hati Jum'at tgl 19 September 2003 bertempat di Hotel Mercure Jln Hayam Wuruk No. 123 Jakarta.

Rapat ini dibuka Sekretaris Dirjen Otda Depdagri Ny. Nutri didampingi Kepala Subdin Pemekaran Otda Eri Yuneri dihadiri Gubernur atau mewakili 13 provinsi bersama Bupati dan Ketua DPRD dari 22 calon Kabupaten yang akan dimekarkan.

Dalam rapat ini dari pihak Depdagri baik yang disampaikan oleh Sekretaris Dirjen Otda Ny. Nutri maupun Eri Yuneri selaku Kasubdin Pemekaran Depdagri dari berbagai persyaratan tentang pemekaran sebuah daerah Kabupaten. Antara lain dapat memenuhi persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah dengan didukung potensial lainnya seperti terdapatnya daerah transmigrasi.

Untuk daerah Provinsi Sumatera Barat paling memenuhi persyaratan dan berada pada peringkat atas sedangkan untuk dua calon kabupaten lainnya Damas Raya di Kab. Sawah Lunto-Sijunjung dan Seleok Selatan di Kab. Seleok juga telah memenuhi persyaratan yang dimintak pihak pemerintah ditetapkan melalui Dirjen Otda Daerah Depdagri.

Melalui Dialog pada rapat pembahasan Draft RUW yang akan disampaikan kepada Komisi II DPR-RI nanti dari utusan 22 calon kabupaten yang akan dimekarkan ini sepakat untuk memintak agar pihak Depdagri secepatnya merealisasikan RUW dibahas Komisi II DPR-RI dan kalau bisa akhir September 2003 ini dituntaskan sehingga nantinya tinggal menunggu Kepres tentang penetapan Kabupaten yang dimekarkan ini.

Sebagaimana juga disampaikan oleh Wabup Kab. Seleok Dr. Elfi Sahlan dan Atp yang ikut hadir pada rapat ini bersama Ketua DPRD Kab. Seleok Drs. H. Saadeeddin bersama Drs. H. Syafrisal Msi Kepala Perwakilan Sumbar di Jakrta memintak RUW ini yang direncanakan 27-28 September 2003 dibahas di oleh Komisi II DPR-RI dapat terwujud. Karena untuk calon Kab. Seleok Selatan dimekarkan sudah dipenuhi semua persyaratannya dan masyarakat sangat berharap. Sementara hadir pada rapat ini salah seorang dari tokoh masyarakat Seleok Selatan Syukrial Syukur Dt Maje Basa.

(Yal)

penulis berita ;

Syukrial Syukur

Pemkab Solok Usulkan Anggaran Dalam APBD 2003 Untuk Pemekaran Kabupaten

Solok, Jan. (Haluan)

BUPATI Solok Gamawan Fauzi, SH,MM mengungkapkan, Pemda Kabupaten Solok mengusulkan anggaran biaya dalam APBD Kabupaten Solok 2003 untuk kelancaran pemekaran kabupaten Solok sehingga dukungan untuk mewujudkan kabupaten Solok Selatan bukan hanya aksi secara moral, tetapi juga financial.

Perlunya dukungan secara financial karena tanpa budget tak mungkin setiap pekerjaan akan menuai sukses, apalagi pemekaran kabupaten Solok sudah sampai ditingkat DPR-RI setelah melalui proses yang melelahkan dari tingkat bawah, ujar Gamawan Fauzi, SH,MM menjawab "Haluan" ketika jumpa pers Senin lalu.

Pemekaran kabupaten Solok kata bupati tampaknya akan menjadi kenyataan dan bukan lagi sekadar impian, hal itu didasari keinginan besar masya-

rakat Solok Selatan dan dukungan penuh masyarakat, beserta Pemda dan DPRD Kabupaten Solok termasuk DPRD propinsi dan gubernur sendiri. Usulan itu sudah disampaikan ke Mendagri bersama perantau Solok Selatan.

Bahkan katanya dari banyak usulan pemekaran kabupaten di Indonesia, kabupaten Solok dinilai pihak Depdagri dan DPR-RI tidak punya masalah. Karena tahapan-tahapan yang diinginkan itu sudah dilalui, termasuk no protes dari pihak-pihak lain. Artinya pemekaran kabupaten Solok sudah suatu kebutuhan yang perlu diwujudkan.

Makanya kata Gamawan untuk kebutuhan pembiayaan pemekaran itu diusulkan dalam APBD kabupaten Solok, biaya itu bisa saja untuk tamu-tamu yang datang maupun tim keberangkatan ke Jakarta mengurus administrasi.

Selain itu, Pemda kabupaten Solok membentuk tim pelepasan aset-aset daerah. Tim tersebut menghitung aset yang ada di wilayah Solok Selatan dan nantinya dalam pelepasan hak itu ada berita acaranya.

Fraksi PKP DPRD Sumbar. Sementara itu di tempat terpisah Ketua Fraksi PKP DPRD Sumbar Drs Afrizal yang ditanya perihal tentang anggaran pemekaran kabupaten Solok dia sependapat perlunya bupati menempatkan pos ter sendiri karena pemekaran itu membutuhkan dana untuk berbagai keperluan.

Sebaliknya kata dia, fraksi PKP juga akan mengusulkan ke gubernur untuk mencantumkan biaya pemekaran kabupaten di Sumbar melalui APBD Sumbar 2003 sehingga tanggung jawab itu bukan hanya di kabupaten pemekaran tapi juga propinsi. (S.02)

Ketua LKPMs Drs. Ramalis Dt. Tangkerullah :

Sudah Sewajarnya Kabupaten Solok Dimekarkan

Solok, Mei (Haluan).

KETUA Lembaga Kesejahteraan Petinggi Masyarakat Solok (LKPMs) Drs. Ramalis Dt. Tangkerullah mengungkapkan, Kabupaten Solok memang sudah sewajarnya "di mekarkan" karena melihat dari luas daerah yang ada sekarang.

Pemekaran Kabupaten Solok terutama di kawasan Solok Selatan menjadi daerah tingkat II otomem memenuhinya dari segi sumber daya manusia, pendidikan dan gografisnya, jelas Ramalis Dt. Tangkerullah menjawab "Ha

luan" di Solok Kamis.

Menurut, Ramalis yang saat ini bergerak dibidang sosial itu, keinginan pemekaran Kabupaten Solok dari masyarakat Solok Selatan yakni Kecamatan Panai Cermit, Sungai Pagu dan Sangir (sebelum kecamatan dimekarkan) sudah diusulkan sejak tahun 1950 lalu. Kemudian oleh tokoh-tokoh masyarakat Solok Selatan itu diusul lagi tahun 1968 lalu bahkan 3 tahun terakhir ini juga diadakan seminatnya.

"Saya rasa, sudah wajar Kabupaten Solok dimekarkan

karena didukung pula dengan UU No.22 tahun 1959, selain itu pemekaran itu lahir dari masyarakat alias mambusek dari bumi, maka demikian tidak akan mengalami kendala", ujar Ramalis.

Bagi daerah lain seperti Mentawai, Kotip Paritaman dan Mading di Tapanuli-Selatan bisa terlaksana pemekaran wilayah, pada hal pemekaran itu lahir dari pemerintah daerah dan DPRD-nya. Kenapa di Kabupaten Solok tidak bisa pula dinas Sosial era orde baru itu.

Pemerintah daerah Kabupaten Solok dan DPRD-nya perlu melihat permasalahan itu secara makro dan masa depan masyarakat kawasan Solok Selatan secara menyeluruh. Dan jangan dilihat dari segi defisit Pendapat Asli Daerah (PAD), katanya.

Sementara itu panitia pemekaran Kabupaten Solok Syukriat Syukur, Dt. Maja Basa menjawab "Haluan" secara terpisah mengatakan, lahimya keinginan membentuk daerah tingkat II di kawasan Solok Selatan supaya sistem pelayanan lebih cepat dan

prima. Pemerintah Kabupaten Solok dan DPRD-nya perlu proaktif terhadap keinginan masyarakat tersebut tanpa mengabaikan celah untuk mengurung niat pemekaran Kabupaten Solok.

Ya... ibarat rumah tangga, kalau anak sudah dewasa dan bertumbuh tangga wajar saja mereka berpisah dan tidak harus satu rumah dengan mertua agar anak tadi bisa mandiri. Namun bukan berarti induknya akan...
Ja, malahan akan selalu minta bimbingan ujar Syukriat(S.02)

DPR Segera Proses Keinginan Solok Selatan Jadi Kabupaten

Padang, Sept (Haluan).

KETUA DPR-RI, Akbar Tandjung mengungkapkan, DPR-RI melalui Komisi II yang antara lain dalam tugasnya terkait dengan Depdagri dan akan selalu menyikapi setiap keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran wilayahnya, asal bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, kita segera memproses dan menyikapi keinginan

Sambungan halaman 1

DPR SEGERA..... dimaksud dengan membuatkan UU-nya, termasuk keinginan masyarakat Solok Selatan yang menginginkan menjadi kabupaten tersendiri. Semua itu, tentunya perlu dilengkapi persyaratannya sebagai bahan pertimbangan merancang RUU, sehingga Komisi II DPR-RI segera memprosesnya.

Demikian dikemukakan Akbar Tandjung ketika bertemu dengan Penasihat Hukum Badan Penggerak Pembentukan Kabupaten Solok Selatan (BP2KS2) H.Mudjadid Dulwathan dan Tokoh Masyarakat Solok Selatan, Syukrial Syukur di DPR-RI, seperti diungkapkan oleh Mudjadid kepada "Haluan" Minggu (8/9) kemarin.

Menurut Mudjadid, Ketua DPR-RI yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu malah mendesak panitia untuk melengkapi semua persyaratan yang diperlukan dan meminta Bupati dan DPRD setempat lebih proaktif menyikapi aspirasi yang berkembang, ujarnya.

Mudjadid dan Syukrial Syukur lebih jauh menjelaskan, selain Akbar Tandjung, juga ditemui beberapa anggota DPR-RI diantaranya Drs.HM. Laode Djani Hasmar, S.Sos dan Marah Simun (Komisi II), Dr.Azwir Dainy Tara, anggota DPR-RI utusan daerah Kab.Solok dan Soetardjo Suryoguritno dari F-PDI Perjuangan.

Pada prinsipnya semua anggota DPR-RI itu sangat mendukung adanya pemekaran wilayah dan malah saat ini sedang dilakukan pembahasan pemekaran wilayah lainnya di Indonesia baik propinsi maupun kabupaten.

Azwir Dainy Tara menurut Mudjadid mengungkapkan, kabupaten Solok Selatan harus segera terwujud, sehingga panitia tim sebelas mulai dari Depdagri, Otda, Hankam, Keuangan, Kehutanan, Komisi II, dll bisa pula bekerja dengan lancar.

Sementara Laode Djani Hasmar meminta panitia daerah lebih gesit dan membuat jaringan komunikasi untuk semua administrasi yang diperlukan sewaktu-waktu. Artinya, bila sudah lengkap, tentu pekerjaan lancar dan masyarakat jadi tenang.

Laode tidak menginginkan adanya berkas yang tidak lengkap, sehingga tidak menjadi tumpukan sampah di DPR-RI. Tentunya sesuai aturan, maka Bupati, DPRD setempat segera memenuhi persyaratan, termasuk yang paling urgent adalah pernyataan Bupati membina daerah baru yang akan berdiri dalam waktu maksimum 3 tahun, ungkapnya.

Mudjadid juga mengungkapkan, diakui bahwa Bupati Solok yang energik dan piawai sebagai pamong itu cukup besar perannya dalam pemekaran wilayah kab.Solok menjadi 2 bagian yakni rencana Kab.Solok

Selatan (Solsel) dan berharap agar masyarakat lebih objektif menilai pemimpinnya sendiri.

Ketika ditanya adanya tim lain yang menghadap Mendagri seperti diberitakan Haluan, Sabtu (7/9), Mudjadid menyebutkan, kami berbagi tugas karena kesediaan Mendagri dan Ketua DPR-RI bersamaan waktunya.

"Jadi, tidak perlu pula dipermasalahkan adanya tim yang terpisah. Namun prinsipnya kita bekerja secara bersama. Selain tokoh-tokoh masyarakat gabungan Solsel itu, juga ada sejumlah tokoh masyarakat di kecamatan pada wilayah itu yang juga berjuang untuk kepentingan yang sama. Itu wajar saja, ujar Mudjadid mengakhiri. (DA).

72/1

**BADAN PENGGERAK PEMBENTUKAN KABUPATEN
SOLOK SELATAN (BP2KS2)**

Padang, 24 September 2002

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

Spesial Sekretaris DT. Muzi Kasri
.....
~~Anggota DPR-D~~/Fungsionaris Partai Politik

Kabupaten Solok Bagian Selatan

di

Tempat

Perihal : *Undangan Rapat*

Dengan hormat,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Keputusan Pengurus IKASUPA Riau No. 03/IKASUPA/2002 tanggal 28 Agustus 2002, tentang Pembentukan dan Pemekaran Kabupaten Solok Selatan, bersama ini kami mengundang Bapak untuk hadir pada :

Hari / Tanggal : *MINGGU, 29 September 2002*
Jam : *12.00 s/d. Selesai*
Tempat : *Restoran MIRAMA-PADANG*
Acara : Pembahasan Surat IKASUPA Riau No. 03/IKASUPA/2002 bersama BP2KS2 dan DPR-D utusan Solok Selatan

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

**BADAN PENGGERAK PEMBENTUKAN KABUPATEN
SOLOK SELATAN**

Armen Muchtar
DR. ARMEN MUCHTAR

Ketua Umum



Musril Kusai
IR. MUSRIL KUSAI

Sekretaris Umum

Sekretariat

Jalan Ikhlas IV No. 1
Andalas Barat Padang
Telp. (0751) 29720

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT
-----------	-------	-------	---------

MENDAGRI

Tanggal/Waktu :
Jumlah Perkataan :

1. YTH. 1. SDR. GUB. NAD DI BANDA ACEH
2. SDR. GUB. SUMUT DI MEDAN
3. SDR. GUB. SUMBAR DI PADANG
4. SDR. GUB. SUMSEL DI PALEMBANG
5. SDR. GUB. RIAU DI PEKANBARU
6. SDR. GUB. BENGKULU DI BENGKULU
7. SDR. GUB. NTB DI MATARAM
8. SDR. GUB. SULTENG DI PALU
9. SDR. GUB. SULTRA DI KENDARI
10. SDR. GUB. SULUT DI MANADO
11. SDR. GUB. KALBAR DI PONTIANAK
12. SDR. GUB. MALUKU DI AMBON
13. SDR. GUB. PAPUA DI JAYAPURA
U.P. SEKDA

1. YTH. IBU SEKJEN DEPDAGRI
2. YTH. BPK DIRJEN OTDA (SBG LAPORAN)
3. YTH. SDR. DUP. ACEH TENGAH, TOBASA, DELI SERDANG, SAWAHLUNTO, SIJUNJUNG, SOLOK, PASAMAN, OKU, OKI, KEP. RIAU, REJANG IFRONG, SUMBAWA, POGEO, BUTON, KOLAKA, MINAHASA, SINTANG, SANGGAU, MALUKU TENGGARA, DAN BIAK NUMFOR

KLASIFIKASI : SEGERA T. 091/1305/OTDA

SHB DGN PROSES PEMBENTUKAN 22 CALON KAB SBG DAERAH OTONOM BARU KMA
DH DIBERITAHUKAN KPD SDR HAL SBB TTK DUA

SATU TTK DUA DALAM RANGKA PERSIAPAN PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN DRAFT-RUU BAIK YG AKAN DILAKSANAKAN DGN LINTAS DEPT MAUPUN DGN KOMISI II DPR-RI KMA DIMOHON KEHADIRAN SDR. BUPATI DAN KETUA DPRD PADA MASINGS DRH PEMEKARAN UTK HADIR DLM RAPAT YG AKAN DILAKSANAKAN PD HARI JUMAT TGL 19 SEPTEMBER 2003 PUKUL 19,00 WIB KMA TEMPAT DI HOTEL MERCURE JLN HAYAM WURUK NO 123 JAKARTA TTK KMA

DUA TTK DUA GUNA MEMUDAHKAN KOMUNIKASI GARING KOORDINASI ANTARA PUSAT DAN DRH DLM PROSES PEMEKARAN/PEMBENTUKAN CALON KAB KMA DIHARAPKAN SDR BUPATI DARI MASINGS DRH PEMEKARAN MENUNJUK SALAH SATU PJBT YG BERTUGAS MENGURUSI PROSES PEMBENTUKAN KAB DRH OTONOM BARU BAIK PENGURUSAN KELENGKAPAN ADM MAUPUN TEKNIS SAMPAI DGN PEMBAHASAN DRAFT RUU MENUANGI BERTUGAS SBG LEISON OFFICER TTK KMA

TIGA TTK DUA BIAYA PERJALANAN DAN AKOMODASI SELAMA DI JKT DIBEDANKAN KPD MASINGS DAERAH TTK KMA

EMPAT TTK DUA UTK KONFIRMASI LEBIH LANJUT DAPAT MENGHUBUNGI DEPDAGRI CO DITJEN OTDA TELP 021 3440306 DAN 021 3453492 TTK KMA

LIMA TTK DUA DUM DAN MENDAPATKAN PERHATIAN DLM PELAKSANAAN TTK HBS

MENDAGRI

Tanggal waktu pembikinan 15 - 9 - 2003

LEPDAGRI
K. H. TRIYUNI SOEMARTONO, MM
KORDEKORIS DITJEN OTDA



No. Code	Waktu		Lalu Lintas	Paraf Operator
	Terima	Kirim		

Ketua Umum LSM Peduli Masyarakat (Yapemas) Muara Labuh-Ahmad Yani, Amd :

Pemkab Solok Tidak Dengar Lagi Aspirasi Masyarakat Sungai Pagu Tentang Pengusulan Status Nagari di Sungai Pagu

Muara Labuh, Juni.(Haluan) KETUA Umum LSM Peduli Masyarakat (YAPEMAS) Muara Labuh, Ahmad Yani Amd menilai tentang pengusulan status nagari sesuai aspirasi masyarakat kecamatan Sei Pagu yang berkembang, sudah tidak didengar lagi oleh Pemda kab.Solok Cq Kabag

Pemberdayaan Nagari jabatannya dipegang oleh Drs Indra Merdi, dimana hasil musyawarah pada sosialisasi kembali kenagari dilaksanankan di Gd.Nasional Muara Labuh beberapa bulan lalu tidak berarti sama sekali.

Dikatakan Ahmad Yani dalam menjawab pertanyaan Haluan sehubungan dengan diminta pen-

dapatnya tentang kepastian pemerintahan nagari yang disampaikan sesuai dengan aspirasi masyarakat sampai saat ini masih belum ada realisasinya dari Pemda Kab.Solok.

Masyarakat keramatan Sei Pagu masih menunggu-nunggu tentang kepastian nagari di daerah ini, sedangkan beberapa daerah

lain dalam wilayah Kab.Solok sudah terwujud selain pelantikan BPN juga sudah ada wali nagarinya yang dilantik. Bagi kecamatan Sei.Pagu sesuai dengan yang disepakati baik bersama pemerintah kecamatan maupun Pemda Kab.Solok dari 9 nagari yang diusulkan sudah membentuk masing-masing anggota BPN dan kemudian dilaporkan ke pihak berwenang di tk.Kab.Solok namun masih belum ada kepastiannya dan yang terakhir di dengar ada permainan yang tidak sehat dilakukan pihak pengelola Pemberdayaan nagari Pemda Kab. Solok ucap Ahmad Yani.

Dari anggota DPRD Kab.Solok asal Sei.Pagu Masrial Dt Indo Mangkuto juga selaku Ketua KAN Pasir Talang kepada Haluan mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan sesuai dengan aspirasi masyarakat tentang permintaan jumlah nagari di daerah ini, namun amat disayangkan dari pihak Kabag.Pemberdayaan Nagari Kantor Bupati Solok Drs Indra Merdi menyikupinya lain sekolah-olah tidak memberi peluang serta mengesampingkan aspirasi masyarakat yang sedang berkembang sekarang. Apalagi dianya telah memutar balikan melalui berita koran bahwa suara yang disampaikan kemauan pribadi bukan aspirasi masyarakat ucap Masrial.

Sedangkan anggota DPRD Kab.Solok juga asal Muara Labuh Yulius Syarif Dt Rangkayo Basa kepada Haluan menyampaikan kalau pihak Pemda Kab.Solok tidak menyikapi aspirasi masyarakat sebagaimana hasil musyawarah di Gd.Nasional Muara Labuh bulan lalu itu tentu berarti bagaikan menutup pintu untuk daerah ini berkembang.

Dari hasil pembicaraan Bupati Solok Gamawan Fauzi SH dengan para anggota DPRD asal Muara Labuh beberapa waktu lalu itu tetap memberi peluang untuk penekanan nagari sepanjang melalui musyawarah secara bersama masyarakat dan berapa jumlah nagari yang diinginkan dapat diusulkan. Dan disaat Bupati Gamawan Fauzi tidak ditempat para pejabat pembantunya sudah bermacam-macam lingkahnya seolah-olah tidak berpijak kepada peraturan yang berlaku atau berbuat hanya dengan kemauan pribadi seperti yang dilakukan Drs Indra Merdi selalu Kabag Pemberdayaan Nagari ucap Yulius Syarif mengakhiri. (Yul).

era Jadi mbung Rasa

dengan hasil dari negara lain.

Persaingan ini akan semakin ketat dimasa yang akan datang karena tidak lama lagi kita akan memasuki era pasar bebas Asean. Untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya memikirkan bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan hasil produksi casiavera ini. Sebagai titik awalnya untuk memasarkan hasil produksi casiavera ini adalah mendirikan pasar Lelang lokal Casiavera yang berlokasi di Guguk Katitiran Batusangkar, yang satu-satunya di Indonesia ini. Hakekatnya adalah dalam rangka merubah pola pemasaran yang bersifat tradisional menjadi pola pemasaran yang transparan, sehingga tidak merugikan semua pihak.

Hadir dalam acara sambung rasa ini Dinas Instansi terkait tingkat propinsi dan kabupaten Tanah Datar, para ekportir dan pedagang pengumpul, Ketua Kadin Tanah Datar, Ketua Ketua Komisi B DPRD Tanah Datar serta undangan lainnya. (NM)

Drs. Martias Mahyuddin, M.Sc kat di Hiroshima Jepang

selama disana disetiap diskusi akan membentangkan peta daerah Sumbang dengan segala daerah objek wisatanya dan secara khusus saya akan tonjokkan situasi tempat menarik turis Jepang itu sendiri untuk mendaangi Padang Pariaman. ujar Martias serius.

Seperti kita ketahui lagi, bangsa Jepang sangat antusias sekali melihat dari dekat apa yang dimiliki oleh Sumbang dan Padang Pariaman khususnya dan peluang seperti ini tidak akan saya biarkan lewat begitu saja.

Menyinggung terpillhnya dia bersama 6 orang lagi rekannya untuk menimba ilmu pengetahuan di negeri Sakura tersebut dia men-

Perusda Tanah Saiyo Padangpanjang Sudah Kirim "Wed Blue" ke Pabrik Kulit Jakarta

Padangpanjang, Juni (Haluan)

PERUSAHAAN Daerah "Tuah Saiyo" sebagai pengelola UPT (Unit Pelaksana Teknis) kulit Padangpanjang sudah mengirim "Wed blue" atau kulit setengah jadi ke pabrik kulit Jakarta. Produksi mesin Shaving yang dinilai bermasalah itu, bulan Juni ini mengirim untuk ketiga kalinya sebanyak 370 lembar dengan ukuran 4000 Sward Feet.

Direktur Utama Perusda Tuah Saiyo Padangpanjang Alimir Kanin kepada Haluan di ruang kantornya kemarin mengatakan, bahan baku kulit yang akan diolah untuk jenis kulit wed blue di beli kepada pedagang kulit mentah termasuk kulit dari RPH Padangpanjang dengan harga berkisar Rp 15.000/kg.

Menurut Surya manager produksi yang telah di laih di Jokya untuk mengelola produksi kulit Padangpanjang ini dalam kesempafan sama mengatakan, sesuai permintaan, kulit setengah jadi yang dihasilkan Perusda Tuah Saiyo ini akan dikembangkan un-

tuk kulit sepatu, tas dan ikat pinggang atau sesuai dengan kebutuhan.

Kulit yang dihasilkan, ujar Surya, kualitasnya sudah sama dengan kulit yang selama ini dipergunakan untuk sepatu. Misalnya untuk Cibaduyut ataupun pabrik sepatu terkenal di Jakarta.

Selain memproduksi kulit setengah jadi yang dipesan perusahaan sepatu dan tas Jakarta, Perusda Tuah Saiyo yang masih berusaha mengembangkan sayapnya ini juga menghasilkan kulit sol sepatu.

Dalam waktu dekat ini, kata Alimir Kanin dan Surya, akan didatangkan lagi mesin jahit kulit, sehingga Perusda Tuah Saiyo Padangpanjang ini dapat pula menghasilkan sapatu jadi, ini sangat dimungkinkan karena selama ini kota Padangpanjang juga terkenal dengan industri sepatunya, dan hila ini sudah berkembang maka kota Padangpanjang bakal jadi Cibaduyutnya Sumatera Barat" ujar Alimir Kanin mengakhiri. (IWAN DN)



UPT Kulit yang kini dikelola Perusda "Tuah Saiyo" Padangpanjang sudah mulai produksi kulit setengah jadi untuk dikirim ke pabrik sepatu di Jakarta. Terlihat dalam gambar ini kondisi kulit setelah dikeringkan. (Foto: IWAN DN).

D. I. ... Al. ... C. ...

Sei. Pagu Minta Keluar dari Kabupaten Solok

Jika Pemkab Solok Tidak Dengarkan Aspirasi Masyarakat Sei. Pagu

Muara Labuh, Juli. (Haluan)
KOMISI A DPRD Kab. Solok turun ke Muara Labuh kec. Sungai Pagu dan sekaligus melakukan tatap muka dengan para tokoh masyarakat guna mendengar aspirasi mereka tentang pemekaran nagari bertempat di Gd. SD 08 Kp. Palak Muara Labuh.

Tim Komisi A DPRD Kab. Solok langsung diketuai oleh Buspa Daiwar Di Kayo didampingi beberapa anggota lainnya sedangkan dari pihak Pemda Kab. Solok diwakili Drs Alisman Salim dengan didampingi M. Saleh SH kabag Hukum Ktr. Bupati Solok.

Pertemuan yang cukup alot dan sedikit aktual ini selain dihadiri Muspika Sei Pagu juga hadir para ninik mamak, tokoh masyarakat, cerdik pandai dan bundo kanduang berikut Ketua KAN Pasir Talang, Koto Baru dan Alam Pauh Duo Pk. Selasa secara terbuka melakukan dialog mendengar aspirasi masyarakat tentang pemekaran nagari di daerah ini.

Sebelum dialog dibuka, Ketua Komisi A DPRD Kab. Solok Buspa Daiwar Di Kayo menyampaikan sambutan berkenaan dengan pemerintah nagari sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2001, sedangkan terbentuknya pemerintahan nagari akan lebih mengalah persatuan dan kesatuan serta menumbuhkan rasa kebersamaan termasuk dalam memperkudat adat yang salingka nagari.

Dalam kesempatan dialog telah disampaikan masing oleh Sy. Syukur Di Majo Basa selaku tokoh masyarakat antara lain mengungkapkan setelah dicanangkan Perda No. 4 Th. 2001 dari masing bakal calon nagari yang diusulkan sebanyak 9 nagari itu setelah melalui musyawarah bersama dimasing-masing nagari disponsori masing-masing KAN dengan dihadiri Camat Sei. Pagu Drs. Dedy Permana. Penyampaian usulan KAN se kec. Sungai Pagu mengenai penetapan Pemerintahan Nagari ini telah disampaikan kepada Bupati Solok oleh Camat Sei. Pagu dengan suratnya Np. 131/047/Pem-2001 tgl. 27 Maret 2001 dan kenyataannya tidak ada realisasinya malah beberapa nagari lain di Kab. Solok sudah dilantik BPMN termasuk karateker wali nagarinya.

Menurut Sy. Syukur Di Majo Basa hal ini seolah-olah ada permainan di pihak Pemda Kab. Solok dan seolah-olah tidak mendengarkan lagi aspirasi masyarakat dan kalau aspirasi yang disampaikan pada dialog tatap muka sekarang masih saja tidak ada realisasinya mengambil suatu kesimpulan bahwa Sei. Pagu tidak lagi menerima pemerintahan nagari dan tetap menjadi desa sesuai UU 5 Th 1979 atau terakhir mintak

keluar dari Kab. Solok akan bergabung dengan Kab. Kerinci atau Kab. Pesisir Selatan sebagai tanggapan disambut tepuk tangan para tokoh masyarakat yang hadir.

Sedangkan hal yang sama juga disampaikan tokoh masyarakat lain Tamrin Jamal dari kenegarian Koto Baru, Zadri Syukur dari Kenegarian Ps. Talang termasuk Ziad Nur Ketua KAN Alam Pauh duo Pk. Selasa berharap aspirasi masyarakat untuk pengusulan 9 nagari ini dapat diterima dan waktu dekat akan ada realisasinya.

Dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang disampaikan ini baik Ketua Komisi A Buspa Daiwar Di Kayo maupun Drs Alisman Salim sebagai mewakili Bupati Solok berjanji akan memperhatikan aspirasi masyarakat Kecamatan Sungai Pagu. Kemudian dalam hal aspirasi masyarakat sebelumnya melalui surat kepada Bupati Solok dengan tembusan kepada DPRD Kab. Solok tentang pengusulan menjadi nagari tersebut tidak ada maksud untuk tidak memperhatikannya, akan tetapi masih dalam pembahasan bersama baik dari Pemda Kab. Solok maupun di pihak DPRD Kab. Solok sendiri.

Sedangkan dari usul yang juga disampaikan tentang pemekaran untuk Solok Selatan menjadi sebuah Kabupaten sendiri menurut Buspa Daiwar Di Kayo masih tetap menjadi perhatian dari pihak anggota Dewan dan mudah-mudahan waktu dekat akan dapat menjadi bahan pembahasan kembali.

Pada kesempatan dialog ini juga mengungkap berbagai hal yang disampaikan kepada anggota Komisi A DPRD Kab. Solok juga kepada pihak Pemda sendiri antara lain tentang pendirian SMU Negeri 2, permintaan untuk penetapan satu unit pemadam kebakaran di Muara Labuh, tentang RS UD Muara Labuh yang kondisinya "amburadul" baik dalam pelayanan kesehatan maupun kebersihannya dan yang lebih serius lagi tentang dana pendidikan BOM untuk SLTP I Negeri Muara Labuh yang dananya diselewengkan oknum mantan Kepsek bersangkutan bernama Sy. J. sebanyak kl Rp 20 juta setelah hak pengurus BP3 melaku-

porkan kasus ini kepada pihak kepolisian di Muara Labuh dan dalam pengusutan, secara tiba-tiba dari Pemda Kab. Solok dengan surat yang ditanda tangani Wakil Bupati Solok Elvi Sahlan Ben kepada Kapolres Solok agar penyidikan dihentikan dan dananya akan dibayar pihak oknum pelaku dengan menstorkannya ke kas Pemda Kab. Solok. Suatu hal yang sangat menonjolkan wibawa Pengurus BP3 kata Ketua BP3 sekolah ini Irwadi disampaikan kepada Tim Komisi A DPRD Kab. Solok saat ini. Sementara Ketua Komisi A Buspa Daiwar Di Kayo berjanji akan memanggil Wabup dan menanyakan tentang kasus tersebut. (Yai).

Kanwil Depag Pantau Kegiatan Para Penyuluh Agama di Sumbar

Padang, Juli (Haluan)
KEPALA Bidang Penerangan Agama Islam Kanwil Depag Sumatera Barat H. Abdurahman, S. Can menyatakan, sekitar 2135 orang penyuluh agama Islam (da'i) yang telah tersebar ke daerah-daerah di Sumatera Barat sejak Januari 2001 lalu sampai sekarang selalu dipantau kegiatannya.

Jika mereka tidak melakukan kegiatannya sebagai seorang penyuluh agama di masjid yang telah ditentukan, maka mereka tidak diberi honor, bahkan tidak boleh lagi melakukan kegiatannya dan posisinya diganti dengan orang lain.

Demikian dinyatakan H. Abdurahman S. Can pada "Haluan" di kantornya jalan Kuini Padang, Jumat kemarin.

Dikatakan, sebetulnya penyuluh agama Islam di daerah ini cukup banyak, namun sebahagian mereka tidak mau memberikan penerangan di desa-desa karena bayaran yang terlalu kecil, bahkan ada hanya yang secara sukarela.

Sementara mereka sebagai seorang da'i juga membutuhkan biaya hidup yang cukup tinggi, sehingga sebahagian besar penyuluh agama itu beroperasi di kota-kota besar saja, dengan harapan bayaran cukup layak dan bisa memenuhi kebutuhan harian mereka. (SF)

Direktur RSUD Adnan WD Payakumbuh Dr. Yanuar Hamid Akui :

Masih Ada Staf RSUD Adnan WD Kurang Simpatik pada Pasien

Payakumbuh, Juli. (Haluan)

DIREKTUR RSUD Adnan WD Payakumbuh, Dr. Yanuar Hamid mengakui, bahwa masih ada diantara stafnya yang masih kurang simpatik dalam memberi pelayanan terhadap pasien di rumah sakit tersebut.

Namun dia tidak akan menutup mata terhadap tingkah laku dan perbuatan stafnya yang kurang simpatik tersebut, karena perbuatan tersebut sangat merusak citra rumah sakit di mata masyarakat.

Demikian diungkapkan oleh Direktur RSUD Adnan WD ketika dihubungi Haluan 29 Juni 2001 di rumah sakit yang dipimpinnya tersebut.

Untuk mengantisipasi para stafnya yang kurang memahami tugasnya tersebut, maka stafnya tersebut diberi tiga kriteria.

Pertama, memberikan lampu hijau, maksudnya memberi kepercayaan yang cukup kepada yang jujur dan rajin serta disiplin dalam melaksanakan tugasnya.

Kedua, memberikan lampu kuning, atau memberikan peringatan terhadap mereka yang lalai melaksanakan tugasnya setengah hati atau yang kurang menghayati pekerjaannya yang ditugaskan itu.

Ketiga, memberikan lampu merah kepada pegawai yang pemalas, yang kasar terhadap pasien serta tidak jujur dan disiplin dalam tugasnya itu.

Mereka yang termasuk pegawai kategori ketiga itu, selalu dipantau dan diberi pembinaan sehingga mereka sadar terhadap tindakannya itu.

Tapi, bagi mereka yang "mada" atau tidak mau dibentuk atau diarahkan, maka diberikan

tindakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terima Sertipikat.

RSU Adnan WD Payakumbuh di bawah pimpinan dr. Yanuar Hamid tersebut menerima "Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit" dengan status "Penuh Tingkat Dasar" yang berlaku dari 2 Maret 2001 s/d 2 Maret 2004.

Ketika ditanyakan Haluan, apa usahanya untuk meningkatkan prestasinya itu, dijawabnya diantaranya adalah membina stafnya lebih-lebih bagi stafnya yang mada atau yang kurang memahami tugasnya tersebut.

Sudah itu meningkatkan pelayanan pada masyarakat, serta melengkapi kekurangan yang masih dirasa kurang. (AN)

Menyelidiki



SOLOK

Komisi "A" Putuskan Sungai Pagu Jadi 5 Nagari

Koto Baru—Komisi A DPRD Kabupaten Solok, dalam rapat di ruang kerjanya Rabu (23/1/2002) berhasil memutuskan jumlah nagari di kecamatan Sungai Pagu. Dalam rapat tersebut Komisi yang nembidangi pemerintahan dan keamanan ini, telah memutuskan Sungai Pagu menjadi 5 nagari.

Menurut ketua komisi A, Buspadewar Dt. Kayo, BA, dipuskannya Sungai Pagu menjadi 5 nagari didasarkan atas usulan dan kesepakatan yang telah disampaikan Tim 9 Muara Labuh yang dikuatkan Ketua KAN setempat. Kelima Nagari yang direkomendasikan itu adalah; Pasir Talang I, Pasir Talang II, Sako, Pauh Duo dan nagari Koto Baru.

Selanjutnya, kata Buspadewar, komisi A akan segera melayangkan surat resmi kepada Bupati Solok untuk merestui kelima nagari yang telah diputuskan tersebut. Sebab kata Buspadewar pula, keputusan tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan daerah dan ketentuan lainnya, karena hal ini masih dalam proses pengukuhan / penetapan Nagari bukan termasuk dalam pekarangan Nagari.

Dari sisi lain, tambah Buspadewar, komisi A melihat Sungai

Pagu dari segi historisnya. Pada Era Orde lama, Sungai Pagu dibagi dalam 7 kanagarian. Dua dari tujuh nagari tersebut kini telah masuk dalam wilayah kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Yaitu Nagari Pakan Rabaa dan Sungai Kalu. Oleh sebab itu kini yang termasuk Sungai Pagu tinggal lima nagari lagi. Dan kelima nagari inipun telah disepakati oleh Ninik Mamak dan seluruh komponen masyarakat Sungai Pagu, sesuai dengan surat tertanggal 17 Januari 2002 yang alamatkan pada Bupati Solok dan tembusannya dikirimkan ke DPRD Kabupaten Solok.

Disamping itu, rapat komisi A juga membahas sejumlah surat masuk yang menjadi bidang tugas komisi ini. Dari sekian banyak surat itu, sebahagian besar mengeluhkan masalah pemerintahan nagari. Seperti, Lurah Nan Tigo Kecamatan Kubung... Taratak Pauh dan Sungai Nanam yang keseluruhannya perlu penanganan serius.

Untuk itu, dalam waktu dekat komisi A akan segera turun kelapangan, meninjau nagari-nagari yang bermasalah, sesuai keluhannya dalam surat, tutup Buspadewar dengan pasti.

(das/liem)

Melihat dari segi historisnya, pada era orde lama, Sungai Pagu dibagi dalam 7 kanagarian. Dua dari tujuh nagari tersebut kini telah masuk dalam wilayah kecamatan Koto Parik Gadang Diateh. Yaitu Nagari Pakan Rabaa dan Sungai Kalu. Oleh sebab itu kini yang termasuk Sungai Pagu tinggal lima nagari lagi. Dan kelima nagari inipun telah disepakati oleh Ninik Mamak dan seluruh komponen masyarakat Sungai Pagu, sesuai dengan surat tertanggal 17 Januari 2002 yang alamatkan pada Bupati Solok dan tembusannya dikirimkan ke DPRD Kabupaten Solok.

Disamping itu, rapat komisi A juga membahas sejumlah surat masuk yang menjadi bidang tugas komisi ini. Dari sekian banyak surat itu, sebahagian besar mengeluhkan masalah pemerintahan nagari. Seperti, Lurah Nan Tigo Kecamatan Kubung... Taratak Pauh dan Sungai Nanam yang keseluruhannya perlu penanganan serius.

Untuk itu, dalam waktu dekat komisi A akan segera turun kelapangan, meninjau nagari-nagari yang bermasalah, sesuai keluhannya dalam surat, tutup Buspadewar dengan pasti.

